



STATISTIK BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2016



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM



KATA PENGANTAR



Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) sebagai unit eselon satu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mempunyai tugas dan fungsi (tusi) menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan SDM LHK dan menjadi *supporting system* pada pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Badan P2SDM dapat menjalankan tugas dan fungsi secara lebih optimal, jika didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat, terkini, terpadu dan berkesinambungan. Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi tentang Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Badan P2SDM menyusun Buku Statistik Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Buku Statistik ini berisi tentang organisasi Badan P2SDM dan unit kerja di bawahnya, di antaranya Perencanaan dan Pengembangan SDM, Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK, Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, Unit Pelaksana Teknis (Balai Diklat LHK dan SMK Kehutanan Negeri) serta Sekretariat Badan P2SDM sebagai fungsi administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun buku statistik ini.

Kami menyadari buku statistik ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaannya, dan akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

KEPALA BADAN P2SDM,

Ir. HELMI BASALAMAH, MM.
NIP. 19611119 198802 1 001



DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APHI	: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BBKSDA	: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
BBTN	: Balai Besar Taman Nasional
BDLHK	: Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BP2SDM	: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPDAS	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPHM	: Balai Pengelolaan Hutan Mangrove
BPKH	: Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan
BP2HP	: Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
BPTH	: Balai Perbenihan Tanaman Hutan
BTN	: Balai Taman Nasional
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
GPS	: <i>Global Positioning System</i>
KHDTK	: Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KKBHL	: Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
KMDM	: Kecil Menanam Dewasa Memanen
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHK	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KWT	: Kelompok Wanita Tani
LP2UKS	: Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya
PDASHL	: Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
PGL	: Pengembangan Generasi Lingkungan
PHKA	: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
PHPL	: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PKSM	: Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat
PKTL	: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPKL	: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
PPI	: Pengendalian Perubahan Iklim
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PSLB3	: Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya
RHL	: Rehabilitasi Hutan dan Lahan



SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMKK	: Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
SPKP	: Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan
SVLK	: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR SINGKATAN	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KELEMBAGAAN BADAN P2SDM	5
BAB III PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM.....	19
Tabel 3.1. Distribusi Tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2016	22
Tabel 3.2. SKKNI Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	23
Tabel 3.3. Sebaran Hasil Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Tahun 2016	29
BAB IV PENYULUHAN	31
Tabel 4.1. Model Desa Konservasi Tahun 2016	34
Tabel 4.2. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya	35
Tabel 4.3. Pos Penyuluhan Kehutanan Desa Tahun 2016	36
Tabel 4.4. Koperasi Kelompok Tani Hutan Tahun 2016	36
Tabel 4.5. Daftar Kelompok Tani Hutan Tahun 2016.....	40
Tabel 4.6. Daftar Penyuluhan Kehutanan Pusat dan Daerah Tahun 2016.	53
Tabel 4.7. Daftar Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Tahun 2016.....	61
Tabel 4.8. Daftar Penyuluhan Kehutanan Swasta Tahun 2016	65
Tabel 4.9. Daftar Penerima Penghargaan Juara Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2016	66
Tabel 4.10. Daftar Materi Penyuluhan Tahun 2016.....	67
BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.....	69
Tabel 5.1. Jumlah Peserta Diklat Aparatur dan Non Aparatur Berdasarkan Bidang Diklat Tahun 2016.....	72
Tabel 5.2. Jumlah Peserta Diklat Aparatur dan Non Aparatur Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2016.....	75

Tabel 5.3.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2016.....	76
Tabel 5.4.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur di Balai Diklat LHK Bogor Tahun 2016.....	77
Tabel 5.5.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur di Balai Diklat LHK Kadipaten Tahun 2016	78
Tabel 5.6.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur di Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2016	79
Tabel 5.7.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur di Balai Diklat LHK Pekanbaru Tahun 2016.....	80
Tabel 5.8.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur di Balai Diklat LHK Samarinda Tahun 2016	81
Tabel 5.9.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur di Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2016.....	82
Tabel 5.10.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur di Balai Diklat LHK Kupang Tahun 2016	83
Tabel 5.11.	Jumlah Lulusan Karyasiswa Program Pasca Sarjana Kementerian LHK Tahun 2016	84
Tabel 5.12.	Lulusan Karyasiswa Kementerian LHK Program S2 dan S3 Berdasarkan Program Studi Tahun 2016.....	84
Tabel 5.13.	Lulusan Karyasiswa Kementerian LHK Program S2 dan S3 berdasarkan Perguruan Tinggi Tahun 2016.....	85
Tabel 5.14.	Lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) Negeri Tahun 2016.....	87
Tabel 5.15.	Jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan Tahun 2016	88
Tabel 5.16.	Penyelenggaraan Kerjasama Diklat Tahun 2016	89
Tabel 5.17.	Daftar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Lingkup Badan P2SDM.....	98
BAB VI	PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN	99
Tabel 6.1.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Generasi Muda Lingkungan Hidup Tahun 2016	102
Tabel 6.2.	Jumlah Pelatihan Kader Lingkungan Hidup Tahun 2016.....	103
Tabel 6.3.	Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016.....	104
Tabel 6.4.	Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2016.....	117
Tabel 6.5.	Jumlah Pelatihan Pengenalan Saka Kalpataru Tahun 2016 ...	120



BAB VII DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA.....	123
Tabel 7.1. Jumlah PNS Badan P2SDM Menurut Golongan/Ruang Tahun 2016.....	126
Tabel 7.2. Jumlah PNS Badan P2SDM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016.....	127
Tabel 7.3. Jumlah PNS lingkup Badan P2SDM Menurut Jenis Jabatan	128
Tabel 7.4. Jumlah PAGU dan Realisasi Anggaran Badan P2SDM Tahun 2016.....	129
Tabel 7.5. Daftar Kerjasama lingkup Badan P2SDM Tahun 2016	130
Tabel 7.6. Daftar Barang Milik Negara (BMN) lingkup Badan P2SDM Tahun 2016.....	133
Tabel 7.7. Daftar Peraturan Perundang-undangan lingkup Badan P2SDM Tahun 2016.....	134
BAB VIII PENUTUP.....	137

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I. PENDAHULUAN

Arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan Renstra Kementerian LHK Tahun 2015 – 2019 difokuskan untuk mewujudkan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 600 unit, pemberian ruang kelola bersama masyarakat melalui skema perhutanan sosial seluas 12,7 Juta hektar (Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Adat), Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 4,1 Juta Hektar (dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan/alas hak), Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di KPH/Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas, maupun upaya internalisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Program yang telah dirancang dan akan dikembangkan tersebut akan dapat terwujud sesuai tujuan “jika dan hanya jika” didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dengan kualitas yang memadai sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Atas kebutuhan SDM tersebut, keberadaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM memiliki peran penting dan sebagai *main institution* dalam mendukung kesiapan dan penataan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BP2SDM didukung oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM (Pusrenbang), Pusat Penyuluhan (Pusluh), Pusat Diklat SDM LHK, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, Sekretariat Badan, dan 7 (tujuh) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta 5 (lima) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan.

Perencanaan dan pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan merupakan bagian penting dari pembangunan aparatur sipil negara secara umum dan aparatur SDM LHK pada khususnya. Untuk dapat membangkitkan partisipasi masyarakat (SDM Non Aparatur), harus diciptakan terlebih dahulu aparatur negara



yang kompeten, bersih, kuat dan melayani. Atas dasar itulah peran Pusrenbang menjadi penting untuk merencanakan ketersediaan SDM LHK dari segi jumlah dan kualitas atau kompetensinya.

Penyuluhan pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Penyuluhan berperan dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang dirangkai dengan upaya pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan.

Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, diperlukan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Diklat memegang peranan penting serta memiliki kontribusi besar dalam mempersiapkan aparatur yang profesional di bidangnya, memiliki etos kerja tinggi serta menjunjung tinggi etika dan moral yang baik serta kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dengan tujuan pembentukan kader lingkungan yang peduli dan berperan aktif dalam pelestarian alam.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka di tiap unit Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diselenggarakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Mengacu tugas dan fungsi unit kerja Badan P2SDM sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015, maka kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM dilaksanakan oleh Sekretariat Badan P2SDM.

Peran penting BP2SDM dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan proses pembelajaran yang panjang dan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Melalui unit kerja dibawahnya, peran tersebut menghasilkan rantai nilai pengembangan SDM yang dimulai dari perencanaan dan pengembangan SDM yang matang, pendidikan dan pelatihan SDM berbasis kompetensi, pelatihan masyarakat dan pengembangan



generasi lingkungan serta penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang transformatif.

Dalam era keterbukaan informasi sekarang ini, tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data statistik yang semakin beragam dan berkualitas (lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan) semakin hari juga semakin meningkat. Tak terkecuali data statistik tentang penyuluhan dan pengembangan SDM.

Data statistik merupakan faktor penting dalam proses manajemen, karena merupakan pendukung atau *supporting* fungsi-fungsi manajemen mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Data statistik perlu dikelola, diolah, dikemas dan disebarluaskan kepada para pengguna, baik eksternal maupun lingkungan internal.

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.6/Menhut-II/2008 tentang Statistik Kehutanan, informasi disusun secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan pelayanan bagi publik dan dunia usaha, mulai tingkat nasional sampai tingkat tapak. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun berdasarkan data yang dihimpun dari masing-masing unit kerja dibawahnya, termasuk BP2SDM.

Sejalan dengan data statistik kementerian, statistik BP2SDM disusun dengan bersumber pada data satuan kerja eselon dua dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta instansi pemerintah daerah yang terkait.

Data statistik yang telah disusun, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data dan informasi akurat dan terkini serta menjadi satu pintu sumber data bagi pihak, baik eksternal maupun internal dalam mewujudkan perencanaan bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis data.

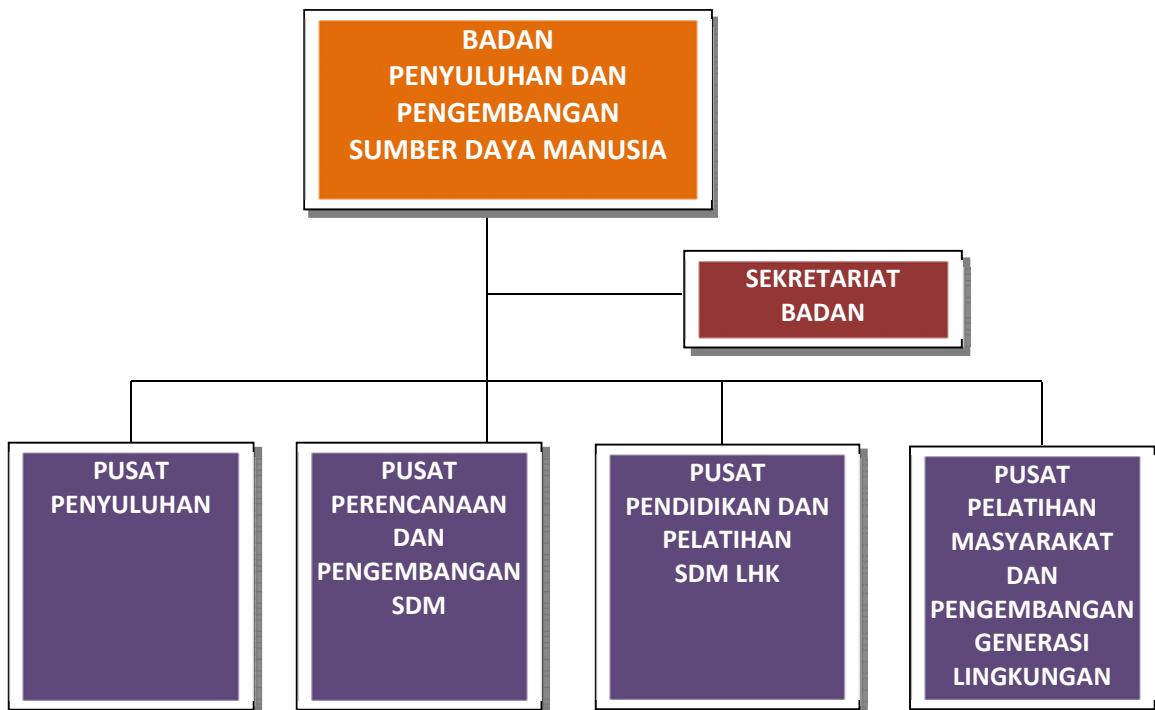
Struktur data statistik ini adalah dimulai dengan informasi tentang kelembagaan BP2SDM, sebagai salah satu unit eselon satu Kementerian LHK, kemudian langsung disajikan data statistik masing-masing unit eselon dua dan lingkup BP2SDM, yaitu Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, Pusat Penyuluhan, Pusat Diklat SDM LHK, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, dan Sekretariat Badan. Statistik UPT Balai Diklat LHK dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dimasukkan dalam statistik Pusat Diklat SDM LHK.

BAB II.

KELEMBAGAAN BADAN P2SDM

BAB II. KELEMBAGAAN BADAN P2SDM

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015, Badan P2SDM dipimpin oleh Kepala Badan P2SDM yang membawahi lima unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan P2SDM, Pusat Penyuluhan, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan. Struktur organisasi Badan P2SDM sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



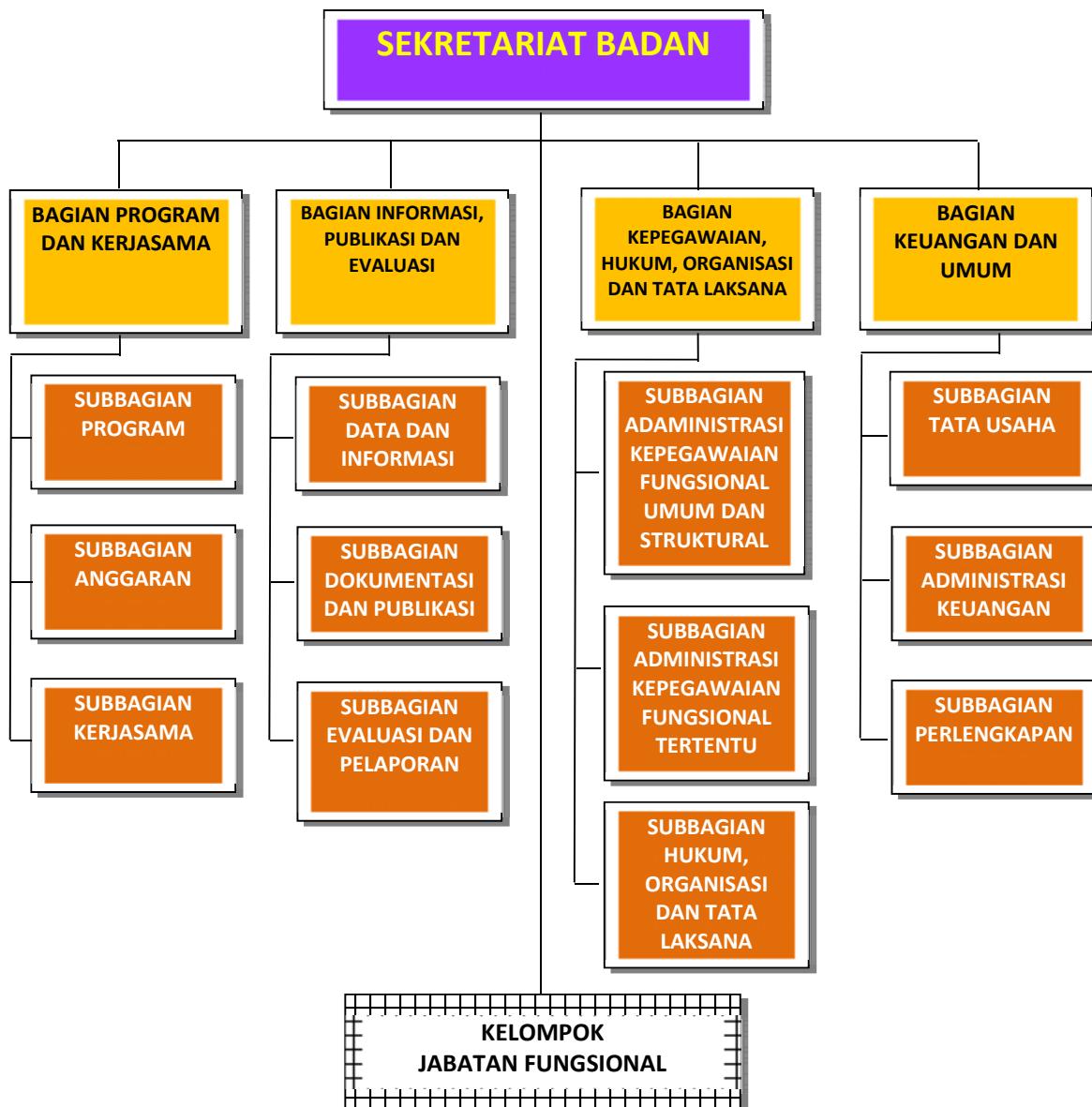
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan P2SDM

Sekretariat Badan P2SDM dipimpin oleh Sekretaris Badan yang membawahi empat bagian, masing-masing bagian membawahi tiga subbagian. Adapun empat Bagian tersebut yaitu :

- 1) Bagian Program dan Kerja Sama;
- 2) Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi;
- 3) Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan

4) Bagian Keuangan dan Umum.

Bagan struktur organisasi Sekretariat Badan P2SDM disajikan pada Gambar 2.



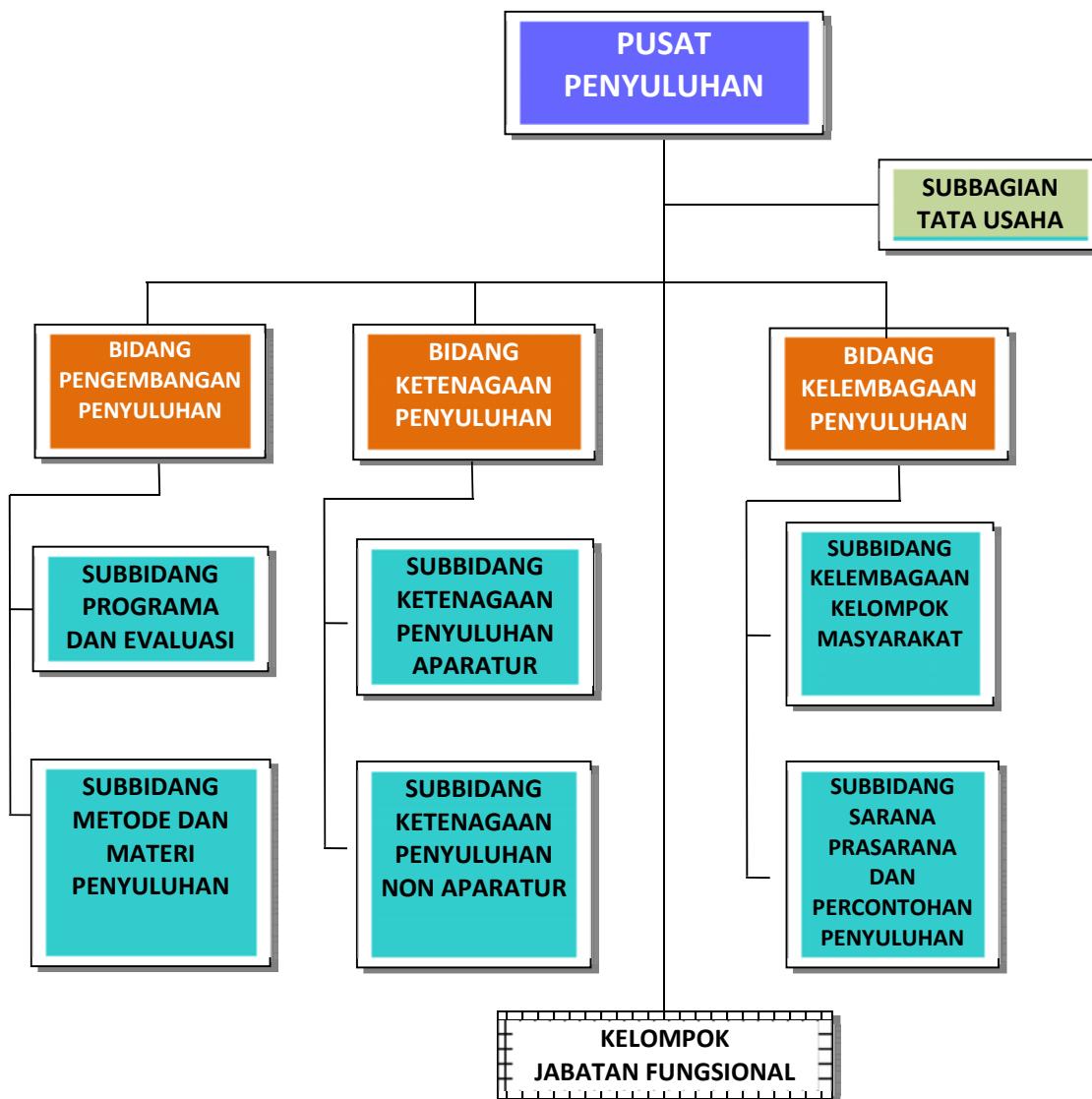
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Badan

Pusat Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Pusat yang membawahi tiga Bidang dan satu Subbagian Tata Usaha, masing-masing bidang membawahi dua Subbidang. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat. Adapun tiga Bidang pada Pusat Penyuluhan yaitu :

- 1) Bidang Pengembangan Penyuluhan;
- 2) Bidang Ketenagaan Penyuluhan; dan
- 3) Bidang Kelembagaan Penyuluhan.

Bagan struktur organisasi pada Pusat Penyuluhan dapat dilihat pada Gambar 3.



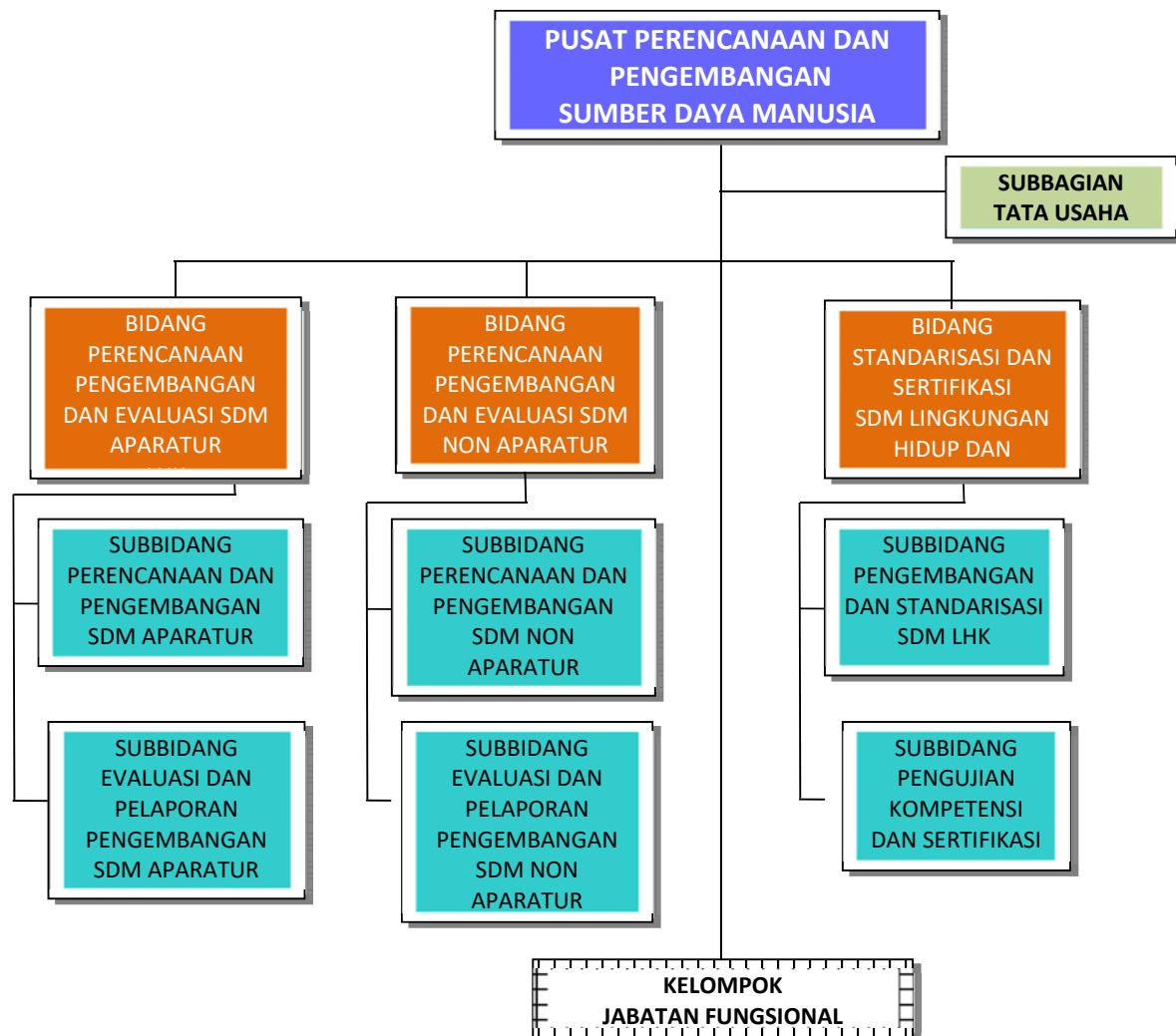
Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan



Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Pusat yang membawahi tiga Bidang dan satu Subbagian Tata Usaha, masing-masing Bidang membawahi dua Subbidang. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat. Adapun tiga Bidang pada Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

- 1) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- 3) Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagan struktur organisasi pada Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Gambar 4.



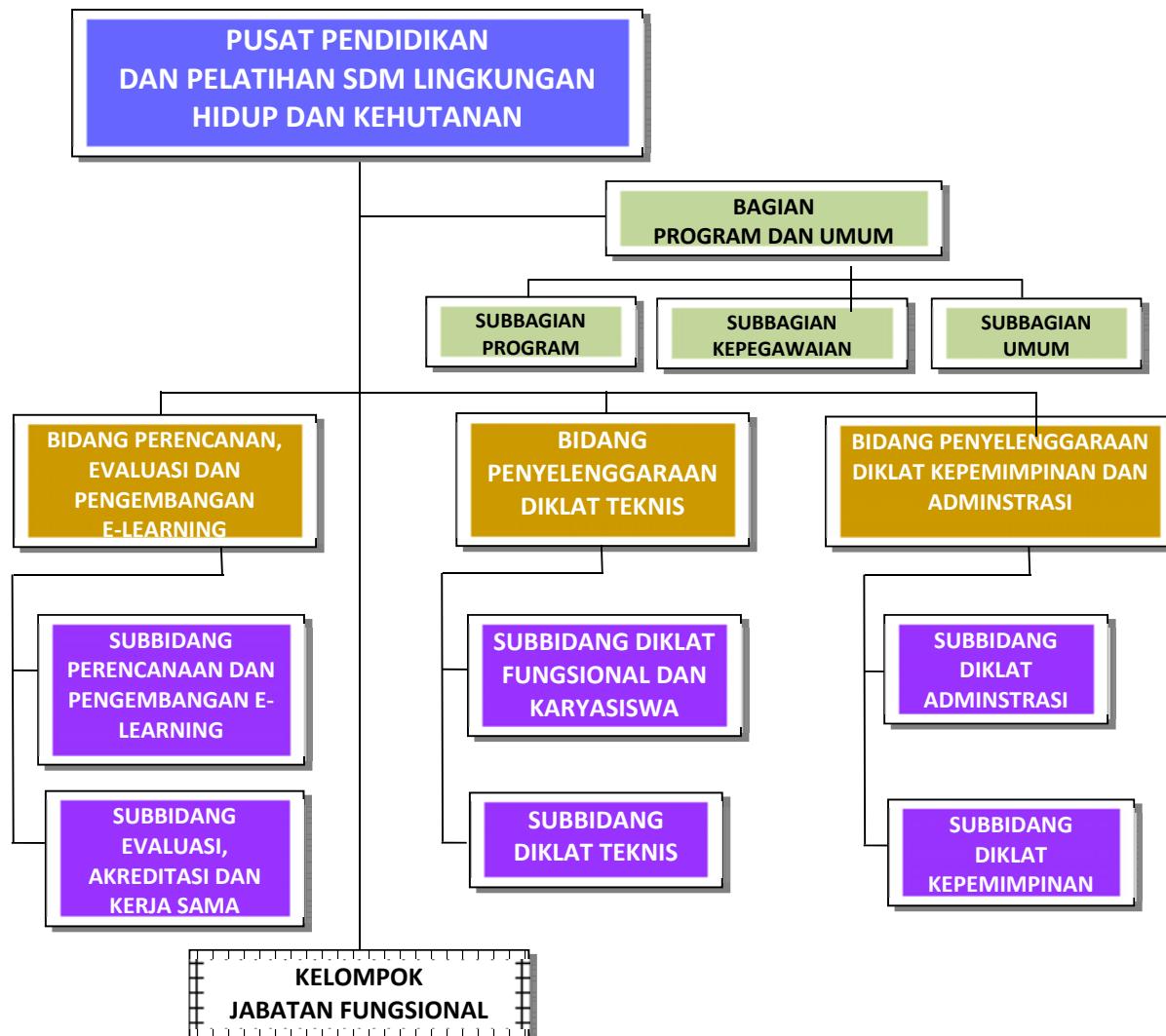
Gambar 3. Struktur Organisasi Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Pusat yang membawahi tiga Bidang dan satu Bagian. Masing-masing Bidang membawahi dua Subbidang dan satu Bagian membawahi tiga Subbagian. Tiga Bidang dan satu Bagian pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :

- 1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning;
- 2) Bidang Penyelengaraan Diklat Teknis;
- 3) Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi; dan

4) Bagian Program dan Umum.

Bagan struktur organisasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada Gambar 5.

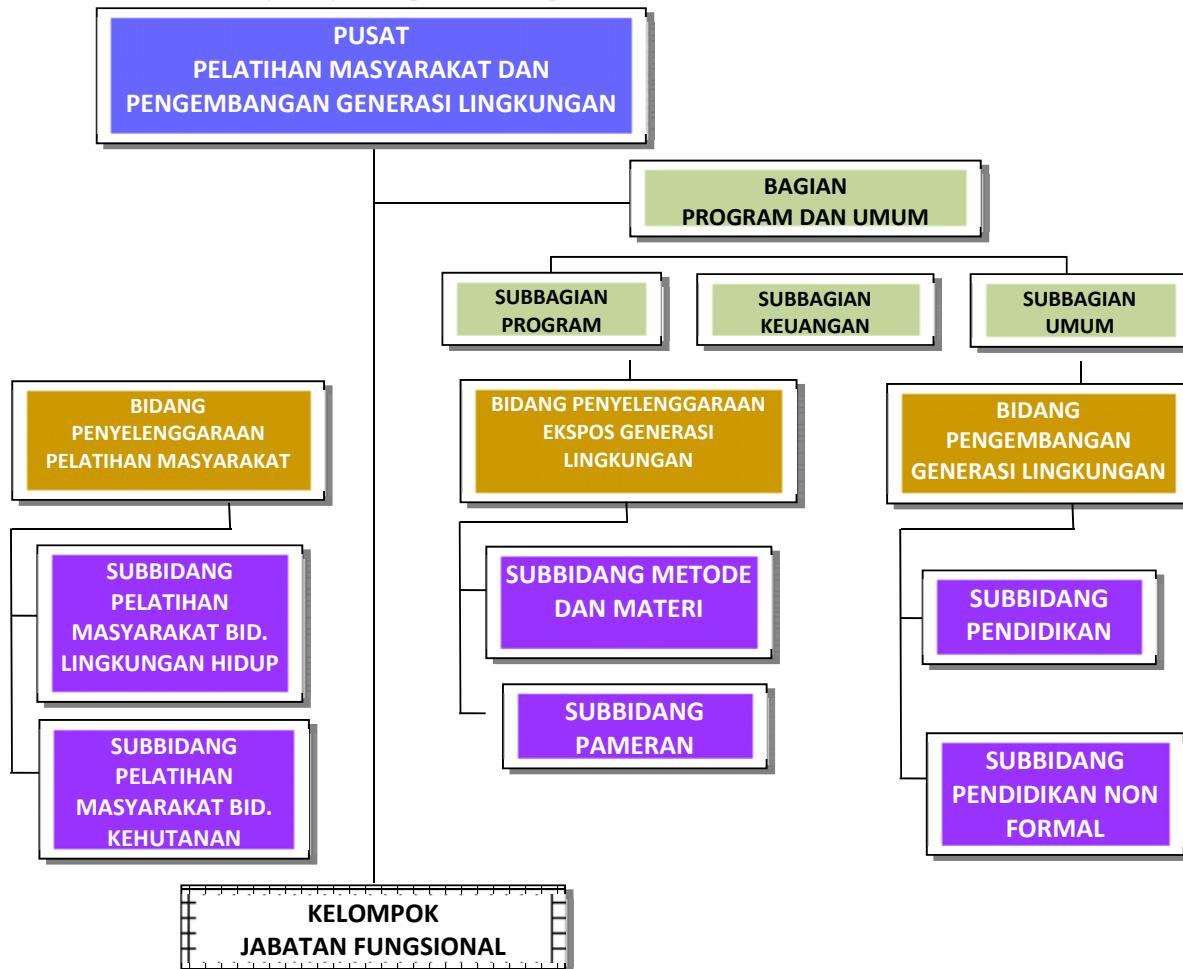


Gambar 5. Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK

Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan dipimpin oleh Kepala Pusat yang membawahi tiga Bidang dan satu Bagian. Masing-masing Bidang membawahi dua Subbidang dan Satu Bagian membawahi tiga Subbagian. Tiga Bidang dan satu Bagian pada Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, yaitu :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat;
- 2) Bidang Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan
- 3) Bidang Pengembangan Generasi Lingkungan; dan
- 4) Bagian Program dan Umum.

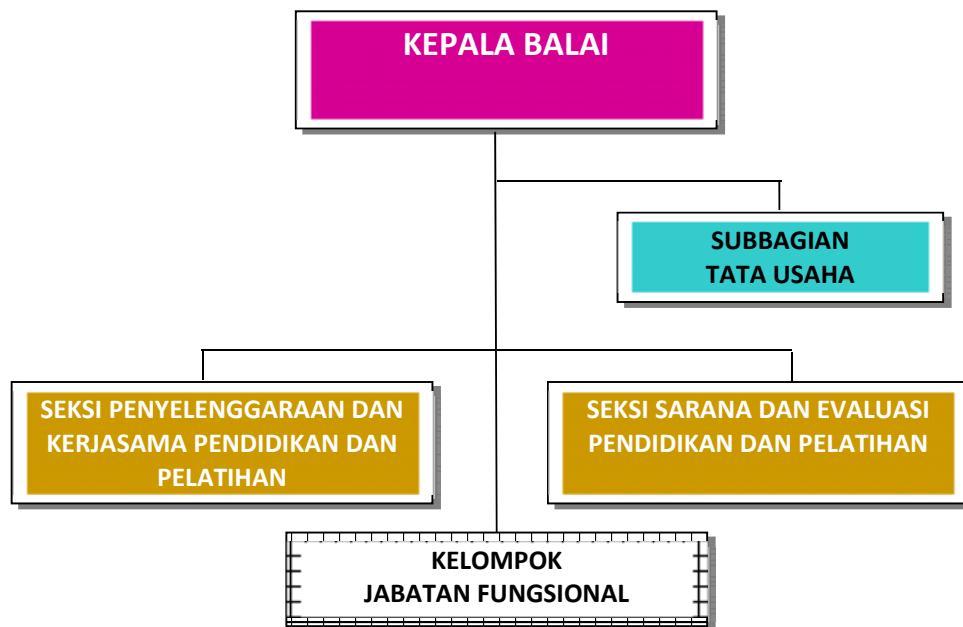
Bagan struktur organisasi Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, struktur organisasi BDLHK terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dan Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi BDLHK sebagaimana disajikan pada Gambar 7.

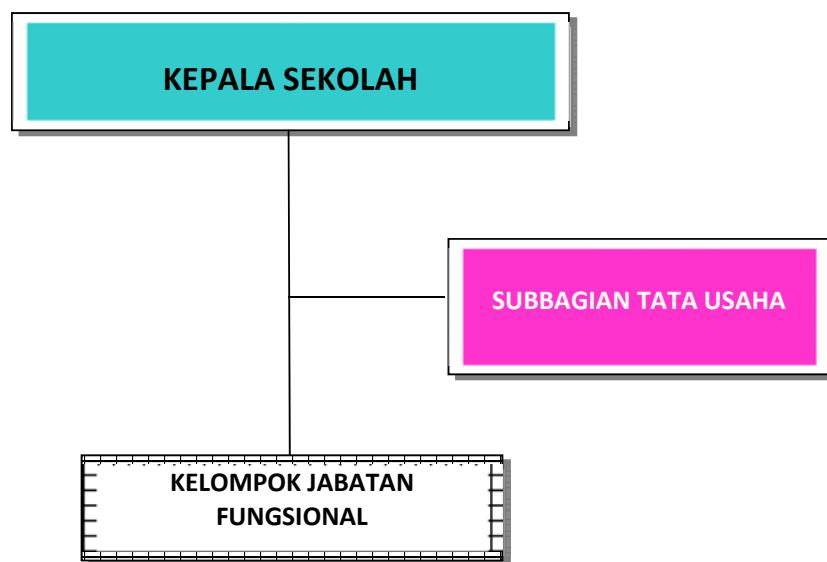


Gambar 7. Struktur Organisasi Balai Diklat LHK



Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan formal di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, struktur organisasi SMK Kehutanan Negeri terdiri atas Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi SMK Kehutanan Negeri sebagaimana disajikan pada Gambar 8.



Gambar 7. Struktur Organisasi SMK Kehutanan Negeri

Badan P2SDM merupakan unsur pendukung Kementerian LHK yang memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Peran penting Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sebagai *main institution* Kementerian LHK adalah menjamin ketersediaan SDM yang cukup dengan kualitas yang memadai sesuai dinamika



pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM laksana "MATAHARI" yang terus bersinar tiada henti untuk menumbuhkembangkan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten, tidak hanya dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi juga bagi instansi di tingkat pemerintahan daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB III

PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN SDM



Perencanaan dan pengembangan SDM merupakan bagian penting dari pembangunan aparatur SDM Negara pada umumnya dan SDM aparatur LHK pada khususnya. Untuk dapat membangkitkan partisipasi masyarakat (SDM Non Aparatur), harus diciptakan terlebih dahulu aparatur Negara yang bersih, kuat dan melayani.

SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur SDM yang berperan sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses pembangunan. Kompetensi SDM aparatur merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pengembangan SDM berbasis kompetensi, telah disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjadi dasar dan acuan dalam pendidikan profesi, pelatihan kerja maupun pengembangan karir di tempat kerja.

Semakin meningkatnya kebutuhan jumlah SDM yang kompeten di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung pengelolaan hutan di tingkat tapak dan pengelolaan lingkungan hidup, telah diisi melalui Program Bakti Rimbawan. Sampai dengan Tahun 2016, telah direkrut 1.941 orang Tenaga Bakti Rimbawan yang ditempatkan pada 210 Instansi di seluruh Indonesia.

Pemenuhan SDM secara kualitas dan kuantitas menjadi penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada Buku Statistik BP2SDM Tahun 2016 ini, data yang ditampilkan terkait dengan perencanaan dan pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Distribusi Tenaga Bakti Rimbawan, SKKNI Sektor LHK dan Standar Khusus, Sebaran Kelulusan Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan, Polhut, PEH, SDM pengelola KPH.

1. Distribusi Tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2016

Program Bakti Rimbawan merupakan Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat terampil dan ahli pada instansi kehutanan, dan untuk mengembangkan profesi di bidang kehutanan bagi sekolah menengah kejuruan (SMK) Kehutanan, Diploma, Sarjana, serta program magang/praktek bagi Siswa SMK Kehutanan dan Mahasiswa Fakultas/Program Studi/Jurusan Kehutanan dalam rangka melaksanakan pengabdian pada Negara khususnya pembangunan kehutanan.

Tabel 3.1. Distribusi Tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2016

No.	Provinsi	Instansi Penempatan	Jumlah Bakti Rimbawan per tahun (Org)		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
1	NAD	KPHK, KPHL	-	20	39
2	Sumatera Utara	KPHK, KPHL, KPHP, BDLHK, KHDTK	2	41	15
3	Sumatera Barat	KPHK, KPHL	4	59	16
4	Riau	KPHK, KPHL, KPHP	7	52	24
5	Kep. Riau	KPHL	-	12	-
6	Jambi	KPHK, KPHL, KPHP	3	28	19
7	Sumatera Selatan	KPHK, KPHL, KPHP, KHDTK	1	65	42
8	Bangka Belitung	KPHP	-	20	19
9	Bengkulu	KPHK, KPHL, KPHP	1	30	14
10	Lampung	KPHL, KPHP	10	83	12
11	Banten	KPHK	-	5	3
12	DKI Jakarta	KPHK	-	-	3
13	Jawa Barat	KPHK	-	6	6
14	Jawa Tengah	KPHK	-	-	6
15	D.I.Yogyakarta	KPHK, KPHP	4	16	7
16	Jawa Timur	KPHK	-	-	6
17	Bali	KPHK, KPHL	8	37	11
18	NTB	KPHK, KPHL, KPHP	10	108	36
19	NTT	KPHK, KPHL, KPHP	1	43	37
20	Kalimantan Utara	KPHL	-	-	3
21	Kalimantan Selatan	KPHK, KPHL, KPHP	3	49	25
22	Kalimantan Tengah	KPHK, KPHL, KPHP	2	57	21
23	Kalimantan Barat	KPHK, KPHP	4	26	19
24	Kalimantan Timur	KPHK, KPHL, KPHP	4	62	20
25	Sulawesi Barat	KPHL, KPHP	11	55	22
26	Sulawesi Selatan	KPHK, KPHL, KPHP, BDLHK	7	64	26



No.	Provinsi	Instansi Penempatan	Jumlah Bakti Rimbawan per tahun (Org)		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
27	Sulawesi Utara	KPHK, KPHL, KPHP	2	10	10
28	Sulawesi Tenggara	KPHK, KPHL, KPHP	4	62	38
29	Sulawesi Tengah	KPHK, KPHP	4	69	33
30	Gorontalo	KPHL, KPHP	3	39	14
31	Maluku	KPHK, KPHP	-	29	7
32	Maluku Utara	KPHP	-	30	5
33	Papua	KPHK, KPHL, KPHP	2	36	22
34	Papua Barat	KPHK, KPHL, KPHP	2	28	20
JUMLAH			99	1.241	600

2. Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Standar kompetensi kerja adalah pondasi sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi. Standar kompetensi kerja menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program SDM berbasis kompetensi, antara lain dalam program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi/uji kompetensi sebagai dasar rekruitmen, penempatan jabatan, dan pengembangan karier SDM.

Tabel 3.2. Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Keputusan Menteri	Judul SKKNI	Profesi yang ada dalam SKKNI
1	2	3	4
1	Kep. 59/MEN/III/2009	SKKNI Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Rehabilitasi Hutan	<ul style="list-style-type: none">1 Pelaksana Evaluasi (Evaluator) Inventarisasi Tegakan Hutan2 Penyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan Hutan3 Pelaksana Inventarisasi Tegakan Hutan4 Pengawas Penguji Kayu Bundar5 Pengukur dan Penguji Kayu Bundar6 Pengawas Penguji Kayu Gergajian7 Pengukur dan Penguji Kayu Gergajian8 Pengawas Penguji Kayu Lapis9 Penguji Kayu Lapis10 Pengawas Penguji Venir11 Penguji Venir12 Mandor Pemungutan Getah Pinus

No	Keputusan Menteri	Judul SKKNI	Profesi yang ada dalam SKKNI
1	2	3	4
			13 Penyadap getah Pinus 14 Penguki Getah Pinus 15 Penguki Minyak Terpentin 16 Penilai Bibit Tanaman Yang Siap Tanam
2	Kep. 45/MEN/III/2011	SKKNI Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Pengelolaaan DAS	1 Pelaksana Validasi Batas DAS dan Sub DAS 2 Pengumpul Data Karakteristik DAS 3 Pengolah dan Penganalisa Data Karakteristik DAS 4 Pembuat Peta Tematik Karakteristik DAS 5 Pengumpul Data Spasial dan Non Spasial Lahan Kritis 6 Pengkonversi Data Spasial dan Non Spasial Lahan Kritis 7 Pembuat Peta Tematik Lahan Kritis 8 Penyusun Laporan Hasil Identifikasi Lahan Kritis 9 Penganalisa Peran Kelembagaan Pengelolaan DAS 10 Fasilitator/Aktivator Forum DAS 11 Surveyor Kondisi DAS 12 Penyusun Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu 13 Pengidentifikasi Daerah Rawan Banjir 14 Pengidentifikasi Daerah Rawan Tanah Longsor 15 Pengukur Debit Sungai 16 Pengolah dan Penganalisa Data Debit Aliran 17 Pengukur Sedimentasi 18 Pengolah dan Penganalisa Data Sedimentasi 19 Pengukur Curah Hujan 20 Pengolah dan Penganalisa Data Curah Hujan 21 Pengumpul Data Penggunaan Lahan 22 Penganalisa Data Penggunaan Lahan 23 Pengumpul Data Sosial Ekonomi DAS 24 Pengolah dan Penganalisa Data Kondisi Sosial Ekonomi DAS 25 Pengumpul Data Kelembagaan DAS 26 Pengolah dan Penganalisa Data Kelembagaan DAS 27 Evaluator Kinerja DAS
3	KEP.93/MEN/IV/2011	SKKNI bidang Bina Pengelolaan DAS	1 Pengelola Pembangunan Sumber Benih 2 Perancang Pembangunan Sumber Benih 3 Perencana Pembangunan Sumber Daya

No	Keputusan Menteri	Judul SKKNI	Profesi yang ada dalam SKKNI
1	2	3	4
		dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Perbenihan Tanaman Hutan	Genetik 4 Pelaksana Pengada Benih 5 Pelaksana Penanganan Benih 6 Penguji Mutu Benih 7 Pemeriksa Mutu Benih 8 Pembuat Bibit Generatif 9 Pembuat Bibit Vegetatif 10 Perbanyak dengan Teknik Kultur Jaringan 11 Penguji Mutu Bibit
4	KEP. 99/MEN/IV/2011	SKKNI Bidang Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Perencana Pengembangan HHBK 2 Pengelola Pakan Ulat Sutera 3 Pengelola Pembibitan Ulat Sutera 4 Pengelola Pemelihara Ulat Sutera 5 Pengelola Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Murbei dan Ulat Sutera 6 Perencana Sertifikasi Telur Ulat Sutera 7 Penguji Mutu Kokon Segar 8 Penguji Mutu Kokon Kering 9 Penguji Mutu Benang Sutera 10 Pengelola Perleahan 11 Penguji Mutu Madu 12 Pengelola Pergaharuhan
5	KEP. 122/MEN/V/2011	SKKNI Bidang Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan	1 Penilai Bibit Siap Tanam 2 Mandor Persemaian Mangrove 3 Perencana Kegiatan Penanaman Mangrove 4 Pembuat Bangunan Konservasi Tanah 5 Perancang Bangunan Konservasi Tanah 6 Pelaksana Inventarisasi Areal Reklamasi Hutan 7 Pelaksana Penyusun Konsep Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan 8 Perencana Reklamasi Hutan 9 Penilai Keberhasilan Rekalamasi Hutan
6	KEP. 137/MEN/V/2011	SKKNI Bidang Penyuluhan Kehutanan	1 Penyuluhan Kehutanan Fasilitator 2 Penyuluhan Kehutanan Supervisor 3 Penyuluhan Kehutanan Advisor
7	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 601 Tahun 2012	SKKNI Bidang Inventarisasi Karbon Hutan	1 Pengenal Pohon 2 Perancang Sampling Design 3 Pengukur Parameter Biomassa 4 Pengukur Parameter Bahan Organik Tanah

No	Keputusan Menteri	Judul SKKNI	Profesi yang ada dalam SKKNI
1	2	3	4
			5 Analis Fisika Tanah 6 Analis Kimia Tanah 7 Teknisi Laboratorium 8 Analis Cadangan Biomassa Karbon 9 Penyusun Persamaan Allometrik 10 Analis Kandungan Karbon Hutan 11 Pengendali Mutu Data 12 Pengumpul Data Penginderaan Jauh 13 Operator Penginderaan Jauh 14 Analis Penginderaan Jauh 15 Pengendali Mutu Data dan Informasi Spasial 16 Analis Karbon Hutan Lanjutan 17 Pengendali Mutu Karbon Hutan Lanjutan
8	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 602 Tahun 2012	SKKNI Bidang Pemanfaatan Hutan sub Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu	1 Auditor PHPL Bidang Prasyarat 2 Auditor PHPL Bidang Produksi 3 Auditor PHPL Bidang Ekologi 4 Auditor PHPL Bidang Sosial 5 Auditor VLK Hutan 6 Auditor VLK Industri
9	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2013	SKKNI Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta Administrasi Kehutanan untuk Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	1 Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan 2 Kepala Seksi Perencanaan 3 Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemantauan 4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 5 Kepala Resort 6 Jabatan Fungsional Perencanaan 7 Jabatan Fungsional Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 8 Jabatan Fungsional Pemantauan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 9 Jabatan Fungsional Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 10 Jabatan Fungsional Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 11 Jabatan Fungsional Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 12 Jabatan Fungsional Pemberdayaan Masyarakat
10	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor	SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan, dan	1 Ganis Timber Cruising 2 Ganis Pembukaan Wilayah Hutan 3 Ganis Pemanenan Hasil Hutan

No	Keputusan Menteri	Judul SKKNI	Profesi yang ada dalam SKKNI
1	2	3	4
	144 Tahun 2013	Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan	4 Ganis Pembinaan Hutan 5 Ganis Kelola Lingkungan 6 Ganis Kelola Sosial 7 Ganis Pengujian Kayu Bundar Rimba 8 Ganis Pengujian Kayu Bundar Jati 9 Ganis Pengujian Kayu Gerjajian Rimba 10 Ganis Pengujian Kayu Gergajian Jati 11 Ganis Penguji Kayu Lapis 12 Ganis Penguji Chip 13 Ganis Penguji Arang Kayu 14 Ganis Kelompok Batang 15 Ganis Kelompok Minyak 16 Ganis Kelompok Resin 17 Ganis Kelompok Getah 18 Ganis Kelompok Kulit
11	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 151 tahun 2013	SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Kelompok Usaha Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	1 Polisi Kehutanan Fasilitator 2 Polhut Supervisor 3 Polhut Advisor
12	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 205 Tahun 2013	SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Jasa Penunjang Kehutanan Bidang Kerja Pengendali Ekosistem Hutan	1 PEH Ahli 2 PEH terampil
13	Keputusan Menaker 122 tahun 2016	SKKNI Amdal	

No	Keputusan Menteri	Judul SKKNI	Profesi yang ada dalam SKKNI
1	2	3	4
14	Keputusan Menaker 166 tahun 2016	SKKNI Auditor Lingkungan Hidup	
15	Keputusan Menaker 167 tahun 2016	SKKNI Industri Kayu Lapis	
16	Keputusan Menaker 168 tahun 2016	SKKNI Pengambil Contoh Uji Air	
17	Keputusan Menaker 168 tahun 2016	SKKNI Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bersifat nasional, mengakomodir kompetensi SDM non aparatur tapi tidak menutup kemungkinan mengakomodir kompetensi SDM aparatur lingkungan hidup dan kehutanan. Sampai dengan Tahun 2016 telah dihasilkan 17 (Tujuh Belas) SKKNI, 7 diantaranya telah diatur pemberlakunya secara wajib.

3. Sebaran Hasil Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Polhut, Penyuluhan Kehutanan, PEH dan SDM Pengelola KPH Tahun 2016

Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.

Tabel 3.3. Sebaran Hasil Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Tahun 2016

No	Provinsi	Peserta	Jabatan								Total	
			Polhut		Penyuluhan Kehutanan		PEH		SDM KPH			
			K	BK	K	BK	K	BK	K	BK	K	BK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Riau	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0
2	DKI Jakarta	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
3	Jawa Barat	31	0	0	0	0	0	0	30	1	30	1
4	Jawa Tengah	30	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0
5	Kalimantan Timur	66	35	0	0	0	30	1	0	0	65	1
6	Kalimantan Selatan	26	3	1	0	0	22	0	0	0	25	1
7	Kalimantan Tengah	26	12	0	0	0	14	0	0	0	26	0
8	Kalimantan Barat	73	44	0	1	0	28	0	0	0	73	0
9	Sulawesi Selatan	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0
10	Sulawesi Utara	24	10	1	1	0	12	0	0	0	23	1
11	Sulawesi Tengah	41	17	1	0	0	23	0	0	0	40	1
12	Sulawesi Tenggara	54	28	4	1	0	21	0	0	0	50	4
13	Sulawesi Barat	64	17	0	2	0	45	0	0	0	64	0
14	Gorontalo	11	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0
15	Maluku	29	7	0	0	0	22	0	0	0	29	0
16	Maluku Utara	17	6	0	0	0	11	0	0	0	17	0
17	Papua	56	43	1	2	0	11	0	0	0	55	1
18	Papua Barat	33	22	0	1	0	10	0	0	0	33	0
	TOTAL	634	266	8	40	0	260	1	58	1	624	10

Tahun 2016, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM cq. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM telah memfasilitasi uji kompetensi bagi 634 pejabat fungsional dari beberapa jenjang jabatan dan SDM Pengelola KPH di 18 Provinsi yaitu : Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

BAB IV

PENYULUHAN



Penyuluhan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejak era otonomi daerah, penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut dihadapkan pada minimnya jumlah penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan jika dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja. Jumlah tenaga fungsional penyuluhan kehutanan (PNS) saat ini sebanyak 3.669 orang yang terdiri dari 3.408 orang penyuluhan daerah, dan 261 penyuluhan pusat (Badan P2SDM 19 orang dan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya 242 orang).

Kegiatan penyuluhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi peningkatan kelas kelompok tani hutan (KTH) dari pemula menjadi madya, pembentukan lembaga pemagangan LP2UKS, fasilitasi pos penyuluhan kehutanan desa, pemberdayaan masyarakat desa konservasi, dan fasilitasi pembentukan koperasi KTH.

Adanya keterbatasan jumlah SDM penyuluhan diharapkan tidak menjadi hambatan utama dalam mensukseskan penyuluhan kehutanan dalam rangka mendukung pembangunan hutan dan kehutanan sampai di tingkat tapak.

Pada Buku Statistik BP2SDM Tahun 2016 ini, data yang ditampilkan terkait dengan penyuluhan adalah sebaran model desa konservasi, sebaran LP2UKS, sebaran Posluhhutdes, Koperasi KTH, Sebaran Peningkatan kelas KTH, Jumlah Penyuluhan Kehutanan PNS, PKSM dan penyuluhan kehutanan swasta, dan daftar penerima penghargaan juara lomba wana lestari.

1. MODEL DESA KONSERVASI

Tabel 4.1. Model Desa Konservasi Tahun 2016

No 1	Provinsi 2	Kabupaten 3	Nama KTH 4	Alamat 5
1	Sumatera Utara	Langkat	Lembaga Pariwisata Batu Katak (LPPK)	Desa Batu Jong-Jong Kecamatan Bahorok
2	Jawa Barat	Sukabumi	Kompak (Kelompok Peduli Alam Konservasi Alam)	Kampung Cibilik RT 001 RW 008 Desa Nanggerag, Kecamatan Cicirug
3	Jawa Barat	Bogor	Lembah Pinus	Kampung Lemah Neundeut RT 005 RW 004 Kecamatan Megamendung
4	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Beraan Pare	Dusun Pagung, Desa Datah Diaan, Kec. Putussibau Utara
5	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Batang Binjai	Dusun Bakul, Desa Labian Ira'ang, Kec. Batang Lutar
6	Riau	Indragiri Hulu	Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)	Desa Lahai Kemuning, Kecamatan Batang Cenaku
7	Banten	Pandeglang	Ciwisata (Cinibung Wisata)	Kampung Cinibung RT 01 RW 05, Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur
8	Banten	Pandeglang	Pengerajin Patung Badak	Kampung Cibadak RT 03 RW 03, Desa Cibadak, Kecamatan Cimanggu
9	Jawa Barat	Lebak	Bina Tani	Kampung Cirompong, Desa Cirompong, Kecamatan Sobang
10	Jawa Barat	Bogor	MKK Cisangku	Kampung Cisangku, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung
11	Jawa Barat	Kuningan	Cakrawala	Desa Sangarahiang, Resort Darma SPTN Wil I Kuningan
12	Jawa Barat	Majalengka	Ciremai Indah	Argalinga, Resort Argalinga SPTN Wil II Majalengka
13	Jawa Tengah	Semarang	Manis Rejo	Dusun Cuntel, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan
14	Jawa Tengah	Klaten	Harapan Makmur	Dusun Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang
15	DIY	Sleman	Sekar Arum	Dusun Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi
16	DIY	Gunung Kidul	Ngudi Rejeki	Kompleks Kantor Suaka Margasatwa Paliyan, Kecamatan Paliyan
17	Jawa Timur	Banyuwangi	Kelompok Nelayan Bahari Stail Sejahtera	Dusun Krajan, Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar
18	Jawa Timur	Banyuwangi	Tribuwana Manunggal Purwo	Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo
19	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Suka Dame	Dusun Batu Santek Atas, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabuoaten Lombok Utara, Resort Senaru Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wil. I Balai Taman

No	Provinsi	Kabupaten	Nama KTH	Alamat
1	2	3	4	5
20	Kalimantan Barat	Kayong Utara	Kelompok dan Nelayan Peduli Mangrove " Melinsum Lestari"	Nasional Gunung Rinjani Dusun Melinsum Desa Sejahtera Kecamatan Sukadama

2. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya/LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)

Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya.

Tabel 4.2. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya

No	Provinsi	NAMA KTH	KETUA	JENIS USAHA	ALAMAT	PENYULUH PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7
1	Lampung	KORUT (Konsorsium Kotaagung Utara)	Fajar Sumantri	Drs. Eko Oesmanto, M.MP	Jl. Raya Gisting Permai, Blok 23, Pekon Gisting Permai, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus	Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Aneka Usaha Kehutanan
2	Banten	KUB Mitra Mandala	Anwar	Yaya Sudarya	Kp. Hariang, Desa. Hanang, Kec. Sobang, Kab. Lebak	Gula Aren
3	Jawa Barat	Giri Senang	Asep Rohman	Muhammad Yusuf, SP	Kp. Legok Nyenang, Desa. Giri Mekar, Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung	Penanaman Lahan Bawah Tegakan Hutan (PLBTH) dan Pengolahan Hasil
4	Jawa Timur	Margo Mulyo	Hariyanto	Nurhayadi, SP	Desa. Burno, Kec. Senduro, Kab. Lumajang	Agroforestry (Hutan Cadangan Pangan)
5	Kalimantan Selatan	Asuhan Murni	Hamzah	Subhan Fahrani, S.Hut.	Desa. Rantau Bujur, Kec. Telaga Bauntung, Kab. Banjar	Pembibitan
6	Sulawesi Tenggara	Meohai	Suparman	Uniar, S.TP	Desa. Onewila, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan	Lebah Madu
7	Gorontalo	SPKP Wana Lestari	Rahmat Lamaji, S.Sos	Nur Izati, S.Hut	Dusun. Piloibata, Desa. Bualemo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara	Gula Aren
8	Bali	Kembang Lestari	I Ketut Latra	I Made Suastana, SP, M.Si	Banjar. Tanah Ampo, Desa. Jungutan Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	Pembibitan dan Agroforestry
9	Sulawesi Selatan	Balla Tinggia	H. Thalib	Abd Haris T	Dusun. Mangempang I Desa. Mangempang, Kec. Bungaya, Kab. Gowa	Hutan Rakyat, Gula Aren dan Agroforestry
10	Jawa	KUP Margo	Juliyah	Triyono, S.TP	Dusun. Setana Kunci,	Kerajinan

No	Provinsi	NAMA KTH	KETUA	JENIS USAHA	ALAMAT	PENYULUH PENDAMPING
1	2	3	4	5	6	7
	Tengah	Rahayu			Desa. Grenggeng, Kec. Karanganyar, Kab. Kebumen	Pandan
11	Jawa Barat	Ruwas II	Endang Suryana	Haen Hendrik, SP	Dusun Karangjaya, Ds. Sukajaya, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran	Cuka Kayu
12	Jawa Barat	Lestari	Syamsudin	Entan Sukardi	Dusun Sukajaya Lama, Ds. Langensari, Kec. Blanakan, Kab. Subang, Prov. Jabar	Pengolahan Mangrove
13	Riau	Master Jaya	Ahmad Sobirin	Johan Wibowo, S.Hut	Dusun. Tegal Rejo, Desa. Pasir Jaya, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu	Lebah Madu
14	Aceh	GERBANG (Gerakan Rehabilitasi Mangrove Lamnga)	Muhammad	Hirwansyah, S.Hut	Desa. Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar	Pembibitan dan Konservasi Mangrove
15	Maluku	Citra Aroma	Rachel Tomahua	Rudy Ambeua, S.Hut	Dusun. Wesa, Negeri. Tawiri, Kota Ambon	Minyak Atsiry
16	Jawa Barat	Mekar Jaya	Dudung	Tati Karniati, SP	Desa. Sindanghayu, Kec. Beber, Kab. Cirebon	Jamur Kayu
17	Jawa Barat	KSM Rangga Mekar	Sandi Adam		RT. 01 RW. 10 Bogor Nirwana Residence, Kel. Rangga Mekar Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	Bank Sampah

3. Pos Penyuluhan Kehutanan Desa Tahun 2016

Tabel 4.3. Daftar Pos Penyuluhan Kehutanan Desa Tahun 2016

No	Provinsi	Nama KTH	Nama PKSM	Nama PK Pendamping
1	2	3	4	5
1	Jawa Timur	KTH Wana Lestari	Tasemad	Suyatno, SP
2	Jawa Timur	KTH Sumber Urip	Azizah Ahmad, S.Pd.I	Sudarto
3	Jawa Timur	KTH Baru Muncul	Abd Rahman	Budi Djoko Triyono, SP
4	NTB	KTH Suka Rela	Moh. Ihsan Effendi	Rusmin, SP
5	Sulawesi Tenggara	KTH Samaturu	Abd. Haris Tamburaka	Desyuliasari, S.Hut
6	Sumatera Barat	KTH Generasi Muda Patalangan	Supirman, SPd	Windra, SP
7	Sumatera Selatan	KTH Jaya Teriti	Ahadi Mazid	Winarsih, S.Hut
8	Lampung	KTH. Lestari 1	Umar Mansyur, S.Pd	Purwadi
9	Sulawesi Selatan	KTH Pattontongan	H. Hasan Suaib	Ridwan Rasyid, S.Hut
10	Sulawesi Selatan	KTH Peduli Lingkungan	Amir Esa	Muhlis, S.Hut, M.Si

4. Koperasi Kelompok Tani Hutan Tahun 2016

Tabel 4.4. Koperasi Kelompok Tani Hutan Tahun 2016

No	Nama KTH dan Bank Sampah	Alamat (Desa, Kec, Kab)	Provinsi	Kegiatan/Usaha	Ketua	Pendamping Koperasi
----	--------------------------	-------------------------	----------	----------------	-------	---------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	KTH Lembah Hijau	Ds. Karang Dima, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	Lebah Madu Hutan, Pembibitan dan olahan HHKBK	Witarsa	Dharmansyah, SP
2	KTH Karang Bayan Lestari	Ds. Karang Bayan Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	Lebah Madu, gula aren	Suadi	Dewa Ngakan Putu Antara, SP
3	KTH Bina Harapan	Ds. Penambangan, kec. Sedong, Kab. Cirebon	Jawa Barat	Hutan Rakyat, PLBTH	Sukardi	Dede Rustaman, SP
4	KWT Dewi Sri	Ds. Bojongpicung, Kec. Bojongpicung, Kab. Cianjur	Jawa Barat	Cuka Kayu	Euis Maryati	Achmad Abdul Hakim, SP
5	KTH Tanah Abang	Desa Gisting Atas, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus	Lampung	Penyulingan minyak atsiri, bibit MPTS, HHBK	Supardi	Arif Sudaryono
6	KTH Wana Jaya	Ds. Sendang Baru, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah	Lampung	Gula aren, kemiri, pinang	Marikun	Suhartono
7	KTH Sembodo	Dsn Kalibiru, Ds. Hargowilis Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo	D.I.Yogyakarta	Pengolahan empon-empon, wisata alam	Sumarjana	Suroso, SP
8	KTH Sumber Rejeki	Ds. Banaran 1, Ds. Banaran, Kec. Playen, Kab. Gunung Kidul	D.I.Yogyakarta	Lebah Madu	Purwanto	Widiyanto
9	KTH Lalayuan	Kel. Lahendong Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon	Sulawesi Utara	Gula Aren, HR, pengolahan etanol	Wellens Supit	Mantje Jopie Sumolang
10	KTH Wonoasri	Desa Kertosari. Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang	Jawa Timur	Penampungan dan penggergajian kayu (sawmill)	Sukiman	Nurhayadi, SP
11	KTH Rimba Mas	Desa Gerbo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan	Jawa Timur	Pembibitan, HR, Agroforestry, jahe instan, kopi bubuk, jamur tiram	Mulyadi	Suwandi, SP
12	KTH Sumber Makmur	Desa Manduro, Kec. Kabuh, Kab.Jombang	Jawa Timur	Budidaya tanaman hutan, penanaman bawah tegakan	Riono	Sudjarwo, SP
13	KTH Pancoran Lestari	Desa Mundeh Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan	Bali	Agroforestry, HR, Pembibitan	I Putu Wirawan	I Ketut Gede Intan Kurniawan, S.Hut

No	Nama KTH dan Bank Sampah	Alamat (Desa, Kec, Kab)	Provinsi	Kegiatan/ Usaha	Ketua	Pendamping Koperasi
1	2	3	4	5	6	7
14	KTH Maju Jaya	Ds. Tanjung Dalam, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong	Bengkulu	HKm	Bambang Irawan	Suroto
15	KTH Wana Lestari	Ds. Gunungsari, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati	Jawa Tengah	Penggilingan/pen golenhan kopi, ternak sapi dan kambing	Ngarjono	Sri Hastuti, SP
16	KTH Ngudi Utomo	Ds. Sukorejo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali	Jawa Tengah	Jamur tiram, anyaman bambu, pembibitan, pupuk organik	Sarono	Kukuh Subiyanto, SP
17	KTH Sari Murni	Ds. Hatungun, Kec. Hatungun, Kab. Tapin	Kalimantan Selatan	Lebah madu, pembibitan, HR, PLBTH	Ibnu Kasir Al Aqili	Muhammad Ikhsan, SP
18	KTH Sejahtera Bersama	Desa Nusapati, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah	Kalimantan Barat	Lebah madu, gaharu, MPTS	Ahmadiy Ham	Yanuar, SP
19	KTH Peureului Nanggroe	Ds. Pulo Gisa, Kec. Gandapura, Kab. Bireun	NAD	Silvopasture, HHBK pengolahan bambu	Muhammad Ali	Fauzah, S. Hut
20	KTH Aur Serumpun	Nagari Pasie Laweh, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman	Sumatera Barat	HKM, pembibitan, HHBK	Oyong Liza Arif	Jhoni Hendra, SP
21	KSU Tetesan Embun	Ilalang Panjang Indrapura, Kec. Airpura, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Sumatera Barat	Hutan Tanaman Rakyat	Safrizal	Otria, S. Hut
22	KTH Wana Mitra Koridor	Desa Cipeuteuy, Kec. Kabandungan, Kab. Sukabumi	Jawa Barat	Hutan Rakyat dan Agroforestry	Dayat Hidayat	Entis Sutisna
23	Bank Sampah Gerakan Untuk Lingkungan (GAUL)*	RW 16 Perumahan Bojong Depok Baru 2, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor	Jawa Barat	Penjualan limbah anorganik, kerajinan perca, bungkus kemasan minuman	Nurhasanah	Yuliana Rini DY, S. Pi, ME

No	Nama KTH dan Bank Sampah	Alamat (Desa, Kec, Kab)	Provinsi	Kegiatan/Usaha	Ketua	Pendamping Koperasi
1	2	3	4	5	6	7
24	Bank Sampah Untung Nabung Sampah (UNASA)*	Bumi Pertiwi blok FF 2, Blok FG-10 RT 2 RW 14 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor	Jawa Barat	Daur ulang plastik dan pupuk cair	Isti Wahyuni	Dewi Sawiyah Prangesti

Keterangan :

- *) Bukan merupakan kelompok tani hutan tetapi merupakan kelompok masyarakat yang bergerak dalam pengelolaan sampah

5. Daftar Kelompok Tani Hutan (KTH)

Tabel 4.5. Daftar Kelompok Tani Hutan (KTH) di 33 Provinsi Tahun 2016

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH DESA/KEL.	KECAMATAN	Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
1	2	3	4	5	7	8
1 JAWA BARAT						
1	Kab. Pangandaran	Jaya Kinanti	Ds. Ciakar	Kec. Cijulang	Hutan Rakyat,lebah madu	Irfan Afandi, S.Hut
2	Kab. Pangandaran	Hegarsari	Ds. Karangsari	Kec. Padaherang	Hutan Rakyat,lebah madu	Toni Afandi, S.Hut
3	Kab. Bandung	Mutiara Bukit	Ds. Mekarlaksana	Kec. Cikancung	HR, Jamurkayu,ternak	Ling Ibrahim, SP
4	Kab. Bandung	Pasijirak	Ds. Ciporeat	Kec. Cilengkrang	Persemaian,Jamur kayu	M. Yusuf, SP
5	Kab. Tasikmalaya	Unden I	Ds. Sukakerta	Kec. Jatiwaras	Hutan Rakyat,lebah madu	Taufik Hidayat
6	Kab. Tasikmalaya	Mekarsari V	Ds. Kubang Sari	Kec. Cikalong	HR, Persemaian,lebah madu	Usup, SP
7	Kab. Ciamis	Kadali Kencana	Ds. Hujungtiwu	Kec. Panjalu	Hutan Rakyat,lebah madu	Nandi Kuswandi
8	Kab. Ciamis	Wahana Mukti Jagabaya	Ds. Jabaya	Kec. Panawangan	Hutan rakyat	Rusdiaman, SP
9	Kab. Bogor	Wana Lestari	Ds. Sadeng	Kec. Leuwisadeng	Agroforestry	Sarah Wididyatami, S.Hut, MM
10	Kab. Bogor	Pabangbon	Ds. Gununggeulis	Kec. Sukaraja	Hutan rakyat	Mugia
2 BANTEN						
1	Kab. Pandeglang	Sinar Lestari	Ds. Cibaliung	Kec. Cibaliung	HR, agroforestry	
2	Kab. Pandeglang	Mekarsari	Ds. Cibitung	Kec. Munjul	HR, agroforestry	Jumhana Kosasih, SP
3	Kab. Pandeglang	Neglasari	Ds. Telaga Sari	Kec. Saketi	HR, agroforestry	Riksan Rustiawan, S.Hut
4	Kab. Pandeglang	Cikahuripan	Ds. Mandalasari	Kec. Kadhrjo	HR, agroforestry	RAR Cepy, STP
5	Kab. Pandeglang	Nagara	Ds. Tapos	Kec. Cadasari	HR, agroforestry	Eem Emaliah, S.Hut
6	Kab. Pandeglang	Tunas jaya	Ds. Ciherang	Kec. Picung	HR, agroforestry	Ilham Malik, S.Hut
7	Kab. Pandeglang	Karya Tani	Ds. Cimanis	Kec. Sobang	HR, agroforestry	Agus Hidayat
8	Kab. Lebak	Kadu Bandung	Ds. Badur	Kec. Cirinten	HR, agroforestry	Untung Timur
9	Kab. Lebak	Beranda Buit	Ds. Pamubulan	Kec. Bayah	HR, agroforestry	

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH DESA/KEL.	KECAMATAN	Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
1	2	3	4	5	7	8
10	Kab. Lebak	Sri Mukti	Ds. Bejod	Kec. Wanatasalam	HR, agroforestry	
11	Kab. Lebak	Teguh Santosa	Ds. Kalanganyar	Kec. Kalanganyar	HR, agroforestry	Dudi Permadi
12	Kab. Lebak	Hutan Mulya	Ds. Mekarmanik	Kec. Bojong Manik	HR, agroforestry	
13	Kab. Lebak	Gekombang Bukit	Ds. Cibarengkok	Kec. Pangarangan	HR, agroforestry, lebah madu	Oma Sukarma
14	Kab. Lebak	Karya Mulya	Ds. Kapunduhan	Kec. Cijaku	HR, agroforestry	
15	Kab. Serang	Mustikan Tani	Ds. Pancanegara	Kec. Pabuaran	HR, agroforestry	Sanwani
16	Kab. Serang	Karang Mas	Ds. Cisitu	Kec. Ciomas	HR, agroforestry	
3 JATENG						
1	Kab.Banjarnegara	Guyup Rukun	Ds. Rakitan	Kec. Madukara	sengon, agroforestry	Wahyu Dwi Maryati, SP
2	Kab. Banyumas	Pergunung	Ds. Melung	Kec. Madukara	Sengon, agroforestry,ternak	Setyo Jumanto, SP
3	Kab. Batang	Banjarsari	Ds. Semampir	Kec. Madukara	sengon,mahoni,kayu2n	Anjar Siswoyo,S.Hut
4	Kab. Batang	Bhakti Makmur	Ds. Wonomerto	Kec. Bandar	sengon,mahoni, kayu2n	Asikin, SP
5	Kab. Boyolali	Taru Kismo	Ds. Kaligentong	Kec. Ampel	Agroforestry, sengon,	Turut, S.TP
6	Kab. Boyolali	Wono Lestari	Ds. Pentur	Kec. Simo	sengon,mahoni,agroforestry	Margono, STP
7	Kab. Grobogan	Margo Luhur	Ds. Crewek	Kec. Kradenan	sengon,pembibitan kayu2an	Supaya, STP
8	Kab. Grobogan	Ngudi Rahayu II	Ds. Mojorebo	Kec. Wonosari	sengon,pembibitan kayu2an	Haris Endang, S, STP
9	Kab. Jepara	Ngudi Sampurno III	Ds. Jugo	Kec. Donorejo	Agroforestry, sengon	Tri AndikSetyawan, S.Hut
10	Kab. Karanganyar	Rimba Jati Lestari	Ds. Kebak	Kec. Jumantono	sengon,mahoni,	Joko Pramono, SP
11	Kab. Kebumen	Subur	Ds. Plumbon	Kec. Karang Sambung	sengon,mahoni, kayu2n	Muryani
12	Kab. Kebumen	Tlogo Mulyo	Ds. Tlogosari	Kec. Ayah	sengon,mahoni,kayu2n	Loso Riyanto
13	Kab. Klaten	Sidodadi	Ds. Sedayu	Kec. Tulung	sengon,mahoni,gaharu	Amir, SP
14	Kab. Kudus	Sari Rejo	Ds. Rahtawu	Kec. Gebog	sengon,mahoni,agroforestry	Ahmad Hidayatullah Biri, SP
15	Kab. Magelang	Margo Makmur	Ds. Ngrancah	Kec. Grabag	sengon,mahoni,kayu2n	Rima Nur Hikmah, A.Md
16	Kab. Pati	Wana Lestari Jonggol	Ds. Siti Luhur	Ds. Gembong	sengon,mahoni,agroforestry	Mustamir, SP

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH		Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
			DESA/KEL.	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	7	8
17	Kab. Pati	Wana Lestari Putra	Ds. Sidomulyo	Kec. Gunungwungkal	lebah madu,sengon,HR	Anik Sri Kismiyati, SP
18	Kab. Pekalongan	Krido Mulyo	Ds. Karangasem	Kec. Talun	HR, sengon	Suprapto, S.Hut
19	Kab. Pemalang	Tani Makmur	Ds. Nyalembeng	Kec. Pulosari	sengon,mahoni,kayu2n	Budiyanto, SP
20	Kab. Purbalingga	Cipta Utama	Ds. Cendana	Kec. Kutasari	HR, sengon,mahoni,Madu	Dwi Sulistiyono, S.Hut
21	Kab. Purbalingga	Mekar Manunggal	Ds. Sidareja	Kec. Kaligondang	sengon,HR,mahoni	Kumala Dewi, S.Hut
22	Kab. Purworejo	Wanajaya	Ds. Hargorojo	Kec. Bagelen	Salak,sengon,jati	NC. Teguh Santoso, S.hut
23	Kab. Purworejo	Sumber Makmur	Ds. Ngargosari	Kec. Loano	Madu,sengon,	Parwanta, STP
24	Kab. Rembang	Makmur	Ds. Pasucen	Kec. Gunem	sengon,mahoni,HR	Slamet, SP
25	Kab. Rembang	Rakuti	Ds. Sudo	Kec. Sulang	sengon,HR,pembibitan	Roni Sri Asih, SP
26	Kab. Semarang	Sido Hasil II	Ds. Bantal	Kec. Bancak	sengon,mahoni,HHBK	Abubakar, STP
27	Kab. Tegal	Mulya Tani	Ds. Karang Mulya	Kec. Bojong	sengon,mahoni,lebah madu	Yunida Wahyu D, SP
28	Kab. Temanggung	Ayo Makaryo	Ds. Tegalrejo	Kec. Bulu	sengon,tembako, kayu2n	Tuhu Suprapti, A.Md
29	Kab. Wonogiri	Wono Mulyo	Ds. Kenteng	Kec. Purwantoro	HKM,sengon,agroforestry	Endah Susilowati, SST
30	Kab. Wonosobo	Tegal Arum	Ds. Tlogojati	Kec. Wonosobo	sengon,mahoni, HHBK	Rohmadi, SP
4 DIY						
1	Kab. Gunung Kidul	Madusari	Payuyon Ds. Pacrejo	Kec. Semanu	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Sri Budi Setyowati
2	Kab. Gunung Kidul	Tani Mandiri	Ds. Nglipar	Kec. Nglipar	Sengon, HR,agroforestry	Hartadi, S.TP
3	Kab. Gunung Kidul	Bakti Wana XIII	Ds.Girihaarjo	Kec. Panggang	HR, Madu, HR,agroforestry	Santoso, S.TP
4	Kab. Gunung Kidul	Sidomulyo	Ds. Karangsari	Kec. Semin	Agroforestry, HR	YB. Endratno
5	Kab. Gunung Kidul	Ngudi Makmur	Ds. Gedangerjo	Kec. Karangmojo	Agroforestry, HR, madu	Sutaryono, S.TP
6	Kab. Gunung Kidul	Karya Mukti	Ds. Bohol	Kec. Rongkop	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Bambang Suntarno
7	Kab. Gunung Kidul	Karya Makmur	Ds. Hargasari	Kec. Tanjungsri	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Sutarmi
8	Kab. Sleman	Kentingan	Ds. Sindumartani	Kec. Ngemplak	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Sumini, SP
9	Kab. Sleman	Harapan	Ds. Sumber Rahayu	Kec. Mayudan	Tan.Kayu2an, agroforestry	Dwi Sulistyowati, SP
10	Kab. Sleman	Lestari Maju	Ds. Jogotirto	Kec. Berbah	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Susilo DwiHartanto, A.Md

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH DESA/KEL.	KECAMATAN	Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
1	2	3	4	5	7	8
11	Kab. Sleman	Ngudi Lestari	Ds. Wukirsari	Kec. Cangkringan	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Dwiantara, S.ST
12	Kab. Kulon Progo	Ngudi Makmur	Ds. Hargowilis	Kec. Kokap	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Suroso, SP
13	Kab. Kulon Progo	Ngudi Rejeki	Ds. Banjarharjo	Kec. Kalibawang	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Supriyanto
14	Kab. Kulon Progo	Ngudi Raharjo	Ds. Sidorejo	Kec. Lendah	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Wahyu Navitri H.S.Hut
15	Kab. Kulon Progo	Wono Segoro	Ds. Garongan	Kec. Panjatan	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Sukarjan, S.Hut
16	Kab. Kulon Progo	Wanasri Bogo	Ds. Kaliagung	Kec. Sentolo	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	M. Alex Zubaedi, S.Hut,MIL
17	Kab. Bantul	Amrih Widodo	Ds. Temuwuh	Kec. Dlingu	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Edy Priyatno, S.TP
18	Kab. Bantul	Ngudi Makmur	Ds. Bawuran	Kec. Pleret	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	SW Purnomo, S.Hut,MT
19	Kab. Bantul	Ngudi Lestari	Ds. Sendangsari	Kec. Pajangan	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	M. Aris K, S.Hut, MP
20	Kab. Bantul	Alhidayah	Ds. Selopamioro	Kec. Imogiri	Tan.Kayu2an, HR,agroforestry	Mawardi, S.TP, MM

5 JATIM

6 NAD

1	Kab. Aceh Tengah	Simahate	Kp. Dama Mulyo	Kec. Atu Lintang	Hkm, HR	Kana Emnurlis
2	Kab. Aceh Tengah	Rimbun	Ds. Gung Singit	Kec. Silih Nara	Hkm, HR	Rizallhamzah
3	Kab. Bener Meriah	Bina Usaha	Ds. Reronga	Kec. Gajah Putih	Hkm, HR	Idris, SP
4	Kab. Aceh Utara	Damai Karya	Ds. Biang Minyak	Kec. Sawang	Hkm, HR	Wardiah , SP
5	Kab. Aceh Besar	PentoSigeedoek	Ds. Gampong Seuum	Kec. Mesjid Raya	Hkm, HR	Hirwansyah, S.Hut
6	Kab. Bireun	Gunong Ijo	Ds. Blang Samagadeng	Kec. Pandrah	Hkm, HR	Ftiradi, S.hut
7	Kab. Bireun	Yakin Sabe	Ds. Krueng Meusegub	Kec. Simpang Mamplam	Hkm, HR	Elfia, S.Hut
8	Kab. Aceh Tamiang	Ujung Tamiang	Ds. Kuruk III	Kec. Seruway	Hkm, HR	Rijanalpa
9	Kab. Bireun	Tani Makmur	Ds. Gampang Blang Mane	Kec. Peusangan Selatan	Hkm, HR	Zainuddin, S.Hut

7 SUMATERA UTARA

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH DESA/KEL.		KECAMATAN	Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
1	2	3	4	5	7	8	
8	SUMATERA BARAT						
1	Kab. Padang Panjang	Agrovorestry Sawah Liek	Ds. Kampung Manggis	Kec. Padang panjang Barat	Hutan rakyat, Kopi, Jahe	Mada Rusli	
2	Kab. Dhamasraya	Kelta Sako Mandiri	Ds. Sitiung	Kec. Sitiung	Hutan rakyat, Kopi, Jabon	Zulbaini	
3	Kab. Pasaman Barat	Sukamenang Aia Kacang	Ds. Sinuruik	Kec. Talamau	Kayumanis, Aren, Kapulaga		
4	Kab. 50 Kota	Subur Jaya	Ds. Suliki	Kec. Suliki	Hutan rakyat, Karet, Durian dll	Monalisa	
5	Kab. Agam	Bukik Godang	Ds. Sarilamak	Kec. Harau	Hutan rakyat, pembibitan	Mimitra	
6	Kab. Agam	Amanah	Ds. Salimpariak	Kec. Banuhampu	Konservasi, Agroforestry	Elniferi	
7	Kab. Agam	Cangkiang	Ds. Sianok Anam Suku	Kec. IV Koto	Agroforestry, Mahoni, Sirian	Uri Samsuri	
8	Kab. Agam	Hutan Rimbo Wisata	Ds. Koto Tangah	Kec. Tilatang kamang	Jasling, Durian, Manggis	Elimarni	
9	Kab. Padang Pariaman	LPHN Lubuk Alung	Lubuk Alung	Kec. Lubuk Alung	Budi daya Gaharu	Joni Hendra	
10	Kab. Padang Pariaman	Usaha Mandiri	Sikucur	Kec. Koto Kampuang Dlm	Budidaya Gaharu	Arfan	
11	Kab. Solok Selatan	LPHN Bukik Panjang	Alam Pauh Duo	Kec. Pauh Duo	HHBK Jasa Lingkungan	Joni Putra	
9	RIAU						
1	Kab. Bengkalis	Sumber Rezki	Ds. Bantan Tengah	Kec. Bantan	Lebah Madu	Natalia	
2	Kab. Kampar	Mandiri Gunung Jati	Ds. Koto Baru	Kec. Tapung	Karet, Merica, Madu	Junaedi	
3	Kab. Kuantan Senggigi	Rimbo Kali Munjang	Ds. Perhentian Luas	Kec. Tanah Darat	Karet	Rohani Murti	
4	Kab. Rokan Hulu	Master Jaya	Ds. Pasir Jaya	Kec. Rambah Hilir			
10	KEPULAUAN RIAU						
11	JAMBI						
1	Kab. Bungo	Sungai Lamin	Ds. Senamat	Kec. Bathin III Ulu	Hutan Desa		
2	Kab. Tanjab Timur	Sabar Usaha	Ds. Catur Usaha	Kec. Dendang	HR, Tanaman Jelutung		

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH DESA/KEL.	KECAMATAN	Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
1	2	3	4	5	7	8
3	Kota Sungai Penuh	Jeruang Jaya	Ds. Sungai Jernih	Kec. Pondok Tinggi	Agroforestry	
4	Kab. Kerinci	Mitra Usaha	Ds. Sungai Betung Hilir	Kec. GunungKerinci	HR, Nilam,Agroforestry	

12 BENGKULU

13 BABEL

1	Kab. Beltung Timur	Aik Ruak I	Ds. Simpang Tiga	Kec. Simpang Renggiang	Agroforestry	Ria Mariana, A.Md
2	Kab. Belitung Timur	Wanita Tani	Ds. Jangkang	Kec. Dendang	Pemb.btan.hutan, Anyaman,Sirup	Binsar Daulay, S.Hut
3	Kab. Belitung	Tebat Tetebu	Ds. Air Seruk	Kec. Siju	Agroforestry, lebah madu, rotan	Anak Agung BD, S.Hut
4	Kab. Bangka Tengah	Gaharu Harapan I	Ds. Lubuk Pabrik	Kec. Lubuk Besar	HHBK	Mirwanto, A.Md
5	Kab. Bangka Tengah	Gaharu Harapan II	Ds. Lubuk Pabrik	Kec. Lubuk Besar	HHBK	Erfansyah, SP
6	Kab. Bangka Tengah	Gaharu Harapan III	Ds. Lubuk Pabrik	Kec. Lubuk Besar	HHBK, teh, daun gaharu	Erfansyah, SP
7	Kab. Bangka Tengah	Nadi Lestari	Ds. Periang	Kec. Lubuk Besar	HHBK,penyulng m.kayuputih	Mirwanto, A.Md
8	Kab. Bangka Tengah	Air Pasir Maju	Ds. Lampur	Kec. Sungai Selan	HHBK,madu,jamur,rotan,resam	Herowansa EdiAtmaja, SP

14 SUMSEL

1	Kab. Musirawas	KTH Sinar Tani I	Ds. Trijaya	Kec. BTS Ulu	Agroforestry, Gaharu	Bambang Pratisto, SP
2	Kab. Pali	KTH Peduli Sampah	Ds. Abang Jaya	Kec. Tanah Abang	HR, Pembuatan Pupuk	Isman Prabujaya

15 LAMPUNG

1	Kab. Pesawaran	Cadasari	Ds. Banut Seberang	Kec. Way Ratai	Pembibitan Damar, Mata kucing	
2	Kab. Pesawaran	Harum Damai	Ds. Kota Jawa	Kec. Way Khilau	Pembibitan Damar, Mata kucing	
3	Kab. Tanggamus 3 KTH	Randu Alas	Ds. Waringin Sari	Kec. Adiluwih	Bitit,Pernakan,sengon,aren	
4	Kab. Tanggamus	Bakti Makmur X	Ds. Teratas	Kec. Kota Agung	Kakao,Durian, Gula aren	

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH DESA/KEL.		KECAMATAN	Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
1	2	3	4	5	7	8	
5	Kab. Tanggamus	Lestari Jaya 2	Ds. Sumber Rejo	Kec. Sumber Rejo	Gula aren, kopi,pisang,cabe		
6	Kab. Tanggamus	Sido Lestari	Ds. Gisting Permai	Kec. Gisting	HR, Kayu2an, anggrek,pakis		
7	Kab. Lampung Selatan	Betung Jaya	Ds. Karang Jaya	Kec. Merbau Mataram	Lebah Madu, gula aren, kayu2an		
8	Kab. Lampung Tengah	Wana Harapan Baru	Ds. Sido Luhur	Kec. Bangun Rejo	Bibit Kayu2an, T. kambing,		
9	Kab. Lampung Tengah	Tunas Muda II	Ds. Sido Luhur	Kec. Bangun Rejo	HR, Kayu2an, Empon2, Jamur		
10	Kab. Lampung Barat	Wana Lesteri	Ds. Gedung Surian	Kec. Gedung Surian	Kopi, Pisang, Lebah Madu		
11	Kab. Pesisir Barat	Bina Wana	Ds. Tribudisyukur	Kec. Kebun Tebu	Pemb. Tanaman Endemik		
12	Kab. Pesisir Barat	Karya Mekar	Ds. Rajabasa	Kec. Bengkunat	Damar makucing,Sengon, Aren		
13	Kab. Pesisir Selatan	Pandawa Lestari	Ds. Pakunegara	Kec. Pesisir Selatan	Damar makucing,Sengon, Aren		
14	Lampung Selatan	Marga Mukti	Ds. Margajasa		Pengayaan Tanaman	Samsudin	
16	KALBAR						
1	Kab. Sintang	Batu Sira	Ds. Nawa Serangai	Kec. Serawai	Penanaman Mahoni	Restituta Harpina, S.Hut	
2	Kab. Sintang	Bukit Liang	Ds. Pelimping	Kec. Kelam Permai	HKm, Hutan Rakyat	Indra Kurniati, S.Hut	
17	KALTENG						
18	KALSEL						
1	Kab. Hulu Sungai Tengah	Karya Bersama	Ds. Bulayak	Kec. Hantakan	KBR, HR		
2	Kab. Banjarbaru	Rimba Asri	Ds. Landasan Ulin Barat	Kec. Liang Anggan	HR, posluhutdes		
3	Kab. Banjarbaru	Jamur Sejahtera	Ds. Landasan Ulin Barat	Kec. Liang Anggan	HHBK (Jamur)		
4	Kab. Banjar	Pucuk Mekar	Ds. Lok Tanah	Kec. Beuntung	HR, HHBK		
5	Kab. Tanah Laut	Tunas Harapan	Ds. Sumber Mulia	Kec. Pelaihari	HR, HHBK (lebah madu)		

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH DESA/KEL.	KECAMATAN	Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
1	2	3	4	5	7	8
6	Kab. Tanah Laut	Ingin Maju	Ds. Tebing Siring	Kec. Bejuin	HKM, KBR, HTR	
7	Kab. Tanah Laut	Hidup Baru	Ds. Telaga	Kec. Pelaihari	HR, KBR, RHL	
19 KALTIM						
20 KALUT						
21 SULAWESI UTARA						
1	Kab. Minahasa Tenggara	Sumber Rejeki	Ds. Pangu II	Kec. Ratahan Timur	HR, agroforestry	Irene Ch. Mandang, S.Hut
2	Kab. Minahasa Selatan	Tani Lestari	Ds. Boyong Pante	Kec. Sinon Sayang	HR, agroforestry	Leni Rorin, S.Hut
3	Kab. Minahasa Selatan	Tani Matuari	Ds. Rumoong Atas II	Kec. Tareran	HR, agroforestry	verra C.R. Linelejan, S.Hut
4	Kota Moba	Bangkuna	Ds. Moyatodulan	Kec. Kota Moba	HR, agroforestry	Windawatiluli, S.Hut
5	Kab. Bolaang Mongondow	Tapalinow	Ds. Tapadaka Utara	Kec. Dumoga Tenggara	HR, agroforestry	Basyiruddin M.A. S., S.Hut
6	Kab. B. Mongondow Timur	Ambang Jaya	Ds. Moyong Kota	Kec. Modayang Barat	HR, agroforestry	Abdul Rizal M, S.Hut
7	Kab. B. Mongondow Timur	Gaharu	Ds. Purworejo	Kec. Modayag	HR, agroforestry	Iwan Mokoginto, S.Hut
8	Kab. B. Mongondow Seltn	Jaya Sakti	Ds. Salomo Barat	Kec. Bolaang Uki	HR, agroforestry	I Ketut Astawa
9	Kab. Bitung	Meimo	Ds. Karondoran	Kec. Ranowulu	HR, agroforestry	Syahril Yusuf, S.Hut
10	Kab. Tomohon	Maesaan	Ds. Kayawu	Kec. Tomohon Utara	HR, agroforestry	Mantje J. Sumolang
11	Kab. Tomohon	Mahwoondo	Ds. Tara tara I	Tomohon Barat	HR, agroforestry	Jaffray W.P. Moningka
12	Kab. Manado	Bina Swadaya Mandiri	Ds. Kimka Atas	Mapanget	HR, agroforestry	Domianusmanaya, S.Hut
13	Kab. Minahasa Utara	Pangintoyan Jaya	Ds. Talelu Rondor	Kec. Dimembe	HR, agroforestry	Dezi Rande
22 SULAWESI TENGAH						
1	Kab. Parigi Mountong	Suka Makmur	Ds. Sausu Torono	Kec. Sausu		
2	Kab. Parigi Mountong	Sari Madu	Ds. Sausu Tambu	Kec. Sausu		
3	Kab. Poso	Mekar Jaya	Ds. Toini	Kec. Poso Pesisir		

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH DESA/KEL.		KECAMATAN	Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
1	2	3	4	5	7	8	
4	Kab. Tojo Una-Una	Lembah Jongi	Ds. Uebone	Kec. Ampana Tete			
5	Kab. Banggai	Bulu Teladan	Ds. Hion	Kec. Bunta			
6	Kab. Toli-Toli	Mitra Membangun	Ds. Malangga	Kec. Galang			
23 SULAWESI SELATAN							
1	Barru	Lereng Hijau	Binuang	Balusu		Erni Azis, S.Hut	
2	Bone	Samaturu	Bana	Bontocani		Syarkawi	
3	Bulukumba	Saromase	Anrang	Rilau Ale		Haeruddin	
4	Enrekang	Mattongan-Tongan	Cendana	Karrang		A. Satriani, S.Hut	
5	Gowa	Sipakainga	Parigi	Tinggimoncong		Sampara, S.Hut	
6	Gowa	Limapa Subur	Lonjoboko	Parangloe		Abd. Rauf	
7	Jeneponto	Permata Hijau	Kapita	Bangkala		Subaedah, SP	
8	Luwu	Malela Lestari	Malela	Suli		Habang	
9	Luwu Timur	Kencana Trigona	Lewonu	Burau		Abd. Samad Suhaeb	
10	Luwu Utara	Situju	Sassa	Baebunta		Diah Mustika, S.Hut, MP	
11	Pinrang	Chulande Sipatuo	Ulussaddang	Lembang		Muh. Hatta	
12	Sinjai	Hijau Maruddani	Lappa	Sinjai Utara		A. Rusdianty, S.Hut	
13	Sinjai	Bua Tanah	Bua	Tellulimpoe		Eka Mardiana Mardin, S.Hut	
14	Soppeng	Anrangae	Marioritenga	Marioriwaho		Ir. Idris	
15	Takalar	Panre Badong	Barugaya	Polombangkeng Utara		Mappaturung, S.Hut	
24 SULAWESI TENGGARA							
1	Kab. Kendari	Mepokuaso	Ds. Tobimeita	Kec. Abeli	Penanaman	Drs. Somba Peiter	
2	Kab. Kendari	Meohai	Ds. Oneiwila	Kec. Ranomeeto	Lebah madu	Uniar, S.Tp	
3	Kab. Konawe Selatan	Aopa Hijau	Ds. Aopa	Kec. Angata	HR	Rokibah	
4	Kab. Konawe Selatan	Mata Oleo	Ds. Amoito Jaya	Kec. Wolasi	HR, Agroforestry	Falkun	

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH DESA/KEL.	KECAMATAN	Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
1	2	3	4	5	7	8
5	Kotab. Konawe Selatan	Madu Sari	Ds. Lalonggapu	Kec. Landono	Lebah Madu	Uniar, S.Tp
6	Kab. Buton	Wana Sejuk	Ds. Kakenauwe	Kec. Lasalimo	Hutan Rakyat	M. Armin Rasyid
7	Kab. Muna	Melati	Ds. Wansugi	Kec. Kabangka	HR, Pembibitan	La Tolo, S.Ag
8	Kab. Muna	Lembo Modea	Ds. Lakologou	Kec. Tongkuno	Penanaman, Pembibitan	La Nduhu
9	Kab. Muna	Sangia Jaya	Ds. Kabangka	Kec. Kabangka	Penanaman,Pembibitan	Laode Foni, S.hut
10	Kab. Muna	Baru Terbit	Ds. Bengkali Barat	Kec. Watopute	Agroforestry	La Rato
11	Kab. Bombana	Rimba Raya	Ds. Rumbia	Kec. Lameroro	HR, Lebah Madu	Siti Arnidar, S.Hut
12	Kab. Bombana	La Lemo	Ds. Ladumpi	Kec. Rarowatu	HR, Lebah Madu	Suhaeda, S.Hut
13	Kab. Kolaka	Buana Lestari I	Ds. Watalara	Kec. Baula	Pembibitan	Paulina Pakeding
14	Kab. Kolaka	Buana Lestari II	Ds. Watalara	Kec. Baula	HR	Daria DjumiatiSumalu
15	Kab. Konawe	Mehiya	Ds. Batu Gong	Kec. Lalonggasu Meeto	HR,Pembibitan	Tatang Hadianto
16	Kab. Konawe	Bumi Segar	Ds. Lamendora	Kec. Kapoiala	Agroforestry	Tatanh Hadianto
17	Kab. Konawe	Transparan	Ds. Wawo Sanggula	Kec. Puriala	Pembibitan	Lolang Lolopayung
25	GORONTALO					
1	Kota. Gorontalo	Polohungo	Kel. Leato	Kec. Dumbo Raya	HR, Agroforestry	IndrahayuMakalunsenge,S.Hut
2	Kab. Gorontalo Utara	Alam Bulota	Kel. Bulota	Kec. Limboto	Agroforestry, Tan. Kehutanan	Yusuf Tasmo
3	Kab. Gorontalo	Wana Tani	Kel. Polohungo	Kec. Limboto	Agroforestry, Tan. Kehutanan	Yusuf Tasmo
4	Kab. Gorontalo	Gotong Royong	Ds. Dulamayo	Kec. Telaga	Agroforestry, Pembibitan	Asfariyanti, S.Hut
5	Kab. Gorontalo	Botu Kadera	Ds. Toyidito	Kec. Polubala	HR, Agroforestry	Asfariyanti, S.Hut
6	Kab. Gorontalo	Mentari	Ds. Batu Loreng	Kec. Bongomeme	Aren, cengkeh,	DeyefiFora LaodeS.Hut
7	Kab. Gorontalo	Gunung Putih	Ds. Tiohu	Kec. Asparaga	HTR,MPTS	Hamzah Usman, S.Hut
8	Kab. Gorontalo	Hula Walu	Ds. Bukit Aren	Kec. Pulubala	Aren	Masrori Sahlan
9	Kab. Pahuwoto	Mitra Lestari	Ds. Molamahu	Kec. Paguat	Lebah madu	Sandi Safril, S.Hut
10	Kab. Pahuwoto	Tanjung Harapan	Ds. Bulili	Kec. Duhiada	Mangrovf, MPTS	Roys Hamani, S.Hut

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH DESA/KEL.	KECAMATAN	Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
1	2	3	4	5	7	8
11	Kab. Bone Bolango	Rimba Lestastari	Ds. Meranti	Kec. Tapa	Pembibitan, MPTS	Ibrahim Van Gobel
12	Kab. Gorontalo Utara	Huyula	Ds. Tanjung Karang	Kec. Tomilito	Pebibitan, Agroforestry	Rati PetrusTammu, S.Hut
13	Kab. Gorontalo Utara	Tinemba	Ds. Pinontoyonga	Kec. Atinggola	Pembibitan Tan. Kehutanan	Susanti Dukalang, S.Hut
14	Kab. Gorontalo Utara	Mawar	Ds. Tolongia	Kec. Anggrek	Pembibitan	Wa Ode Nurfiati, S.Hut
15	Kab. Gorontalo Utara	Sangsibar	Ds. Sigaso	Kec. Atinggola	MPTS, cengkeh, tan Kehutanan	Nurizati, S.Hut
16	Kab. Gorontalo Utara	Sinar Emas V	Ds. Hiyalo	Kec. Anggrek	HR, Agroforestry	Viki Sastro Sulaeman,S.Hut
26	SULAWESI BARAT					
1	Kab. Mamuju	Puncak Indah	Ds. Botteng	Kec. Simboro	Hutan Rakyat	Ahmad
2	Kab. Majene	Lekopa'dis	Ds. Mossodua	Kec. Sendana	Pembibitan Tan. Kehutanan	Amiruddin, SP
3	Kab. Majene	Bunga Sulbar II	Ds. Binanga	Kec. Sendana	Ternak Lebah Madu	Syamsudin Matte
4	Kab. Majene	Rimba Mangrove	Ds. Binanga	Kec. Sendana	Tanaman Mangrove	Azil Anwar
5	Kab. Majene	Tuna Harapan II	Ds. Seppong	Kec. Tammerodo	Pembibitan Tan. Kehutanan	Basrum R
6	Kab. Polewali Mandar	Karya Bersama	Ds. Ongko	Kec. Campalagian	Hutan Rakyat	Toni Sultoni, SP
7	Kab. Polewali Mandar	Siamasei	Ds. Tenggelang	Kec. Luyo	Pembibitan Tan. Kehutanan	Ordanus, S.Hut
8	Kab. Polewali Mandar	Cinna Situru	Ds. Tuttula	Kec. Tapango	Gula Aren	Utoyo
9	Kab. Polewali Mandar	Buttu Kayang	Ds. Alu	Kec. Alu	Hutan Tan. Rakyat	Saharuddin, S.Hut
10	Kab. Mamasa	Kanaan	Ds. Rippung	Kec. Messawa	Hutan Rakyat	Markus P
27	MALUKU					
1	1. Kab. Seram Bagian Barat	Sumberwiji	Ds. Waemetal	Kec. Kairatu	Pembibitan	Pembibitan
2	2. Kab. Seram Bagian Barat	Harapan Jaya	Ds. NaKahena	Seram Barat	Pembibitan	Pembibitan
3	3. Kab. Seram Bagian Barat	Nakahena	Ds.Lumoli	Seram Barat	Pembibitan	Pembibitan
4	4. Kab. Seram Bagian Barat	Waisamu	Ds. Waisamu	Kairatu Barat	Pembibitan	Pembibitan
28	MALUKU UTARA					
1	1. Kab. Tidore	Basanohi	Ds. Way Ipa/Sarana	Kec. Sarana	Pengemb Jati	

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH		Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
1	2	3	4 DESA/KEL.	5 KECAMATAN	7	8
2	2. Kab. Tidore	Yana Kamdua	Ds. Bega	Kec. Sulabesi Tengah	Pengemb Jati	
3	3. Kota Ternate	Ruba Hongi	Ds.Ds. Maliaro	Kec. Ternate	Tan. kayu2an,madu, cengkeh	
4	4. Kab. Pulau Ternate Tengah	Makugawena	Ds. Takone	Kec. Pulau Ternate	Agroforestry,Jasling,Ternak	
5	5. Kab. Halmahera Barat	Mau Sigaro	Ds. Gamsungi	Kec. Sahu Timur	Tanaman hutan	
6	6. Kab. Halmahera Barat	Iyo Nongoru	Ds. Saria	Kec. Jailolo	HR	
7	7. Kab. Sula	Maku Dudara	Ds. Fanaha	Kec. Oba Tengah	HKm	
8	8. Kab. Sula	Pesisir Hijau Lestari	Somahude	Kec. Oba Utara	Samama,kenari,pala,cengkeh dll	

29	BALI					
1	1. Kab. Karangasem	Capalau	Ds. Abang	Kec. Abang	Suharyono	Pupuk org, lebah madu
2	2. Kab. Karangasem	Sari Kasih	Ds. Tenganan	Kec. Manggis	Supardi, SP	bitit gamelina
3	3. Kab. Badung	Wana Lestari	Ds. Kawuw	Kec. Mengwi	I Nyoman Jaya, SP	Gemelina, albesia
4	4. Jembrana	Giri Kerta Sari	Ds. Tukadaya	Kec. Mendoyo	I Nyoman Kardi	Hutan Rakyat albesia
5	5. Kab. Bangli	Tri Guna Karya	Ds. Catur	Kec. Kintamani	I Putu Sudiarta, SP	Hutan Rakyat Albesia
6	6. Kab. Buleleng	Wana Kerti	Ds. Bontihing	Kec. Kubutambamban	Putu Agus Murjadi	Pemb. Pupuk Pst, Lebah madu
7	7. Kab. Tabanan	Pondok Madu	Ds. Gadungan	Kec. Selemadeg Timur	I Nyoman Arsadana	Lebah madu

30	NUSA TENGGARA BARAT					
1	1. Kab. Lombok Barat	Hidup Jaya	Ds. Giri Madia	Kec. Lingsar	HKm, HR	HKm, HR
2	2. Lombok Tengah	Lampak Apik	Ds. Plambik	Kec. Praya Barat Daya	HR, HKm	HR, HKm
3	3. Kab. Lombok Timur	Dongo Baru	Ds. Sapit	Kec. Suela	Pisang, HKm, Ternak	Pisang, HKm, Ternak
4	4. Kab. Lombok Utara	Sinar Harapan	Ds. Pendua	Kec. Kayangan	HKm, HR	HKm, HR
5	5. Kab. Sumbawa Barat	Sahabat Bumi	Ds. Banjar	Kec. Taliwang	HKm, HR	HKm, HR
6	6. Kab. Sumbawa	Semongkat Makmur	Ds. Klungkung	Kec. Batu Lanteh	Polowijo, Mente	Polowijo, Mente

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	Nama KTH	LOKASI KTH		Kegiatan/Usaha KTH	PENDAMPING KTH
			DESA/KEL.	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	7	8
7	7. Kab. Dompu	Meci Angi	Ds. Riwo	Kec. Woja	HKm, HR, Mente	HKm, HR, Mente
8	8. Kota Bima	So Sanao	Ds. Kolo	Kec. Asa kota	Mente, HR	Mente, HR
9	9. Kab. Bima	Oi Loa	Ds. Runggu	Kec. Belo	Mente, HR	Mente, HR

31	NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Kab. Alor	Se Siwonok	Ds. Ds. Nailang	Kec. Alor Timur Laut	Agroforestry,HTR	Yohanis Saulus
2	Kab. Alor	Dian Lestari	Ds. Kopidil	Kec. Kabola	HR, tanaman buah alpokat	Sunardi
3	Kab. Alor	Tenangel	Ds. Lendola	Kec. Teluk Mutiara	Tan. Kayu2an	Siti QomariahHansumar
4	Kab. Alor	Tere Eno	Ds. Air Kenari	Kec. Teluk Mutiara	Ternak,agroforestry	Siti QomariahHansumar
5	Kab. Alor	Harapan Baru	Ds. Yoel Llu	Kec. Pantar Timur	Hkm, tan kayu2an	YohanisAmos Awu
6	Kab. Alor	Sinar Baupung	Ds. Lubu	Kec. Sembur	Tan kayu2an,kemiri,buah2an	Raymundus Sengga
7	Kab. Alor	Gunung Kenari	Ds. Lembur Timur	Kec. Sembur	Tan kemiri,kayu2an	Raymundus Sengga
8	Kab. Alor	Wang Miti	Ds. Kelaisi Tengah	Kec. Alor Selatan	Buah2an, kemiri	Dodi Hartadi Orasetya
9	Kab. Alor	Helanuki	Ds. Kelaisi Barat	Kec. Alor Selatan	HR, tanaman buah alpokat	Dodi Hartadi Orasetya
10	Kab. Alor	Usaha Bersama	Ds. Madar	Kec. Pantar	Buah2an, kemiri	Johanis Amos, S.Hut
32	PAPUA					
1	Kab. Kepulauan Yapen	Aneka Jaya	Ds. Kaimana	Kec. Kaisera		Obet NS Kayani
2	Kab. Jayapura	Remang	Ds. Kampung Babongkrok	Kec. Kebungfeo	Agroforestry, pembibitan dan rehabilitasi lahan	Margaret Suebu
3	Kab. Kerum	Dadi Makmur				
33	PAPUA BARAT					

6. Daftar Penyuluhan Kehutanan Pusat Dan Daerah, Tahun 2016

Tabel 4.6. Daftar Sebaran Penyuluhan Kehutanan Pusat dan Daerah Tahun 2016

No.	PROV/KAB/KOTA	Tingkatan		TOTAL
		Terampil	Ahli	
1	2	3	4	6
		1,529	1,855	3,669
I.	PUSAT	35	133	261
1	BBKSDA	5	17	28
2	BKSDA	10	21	57
3	BBTN	7	13	35
4	BTN	13	64	122
5	PUSLUH-KLHK	-	17	17
6	Balai Diklat LHK	-	2	2
II.	ACEH	10	44	54
1	KABUPATEN ACEH SELATAN	-	1	1
2	KABUPATEN ACEH TENGAH	3	4	7
3	KABUPATEN ACEH BESAR	1	5	6
4	KABUPATEN PIDIE	1	5	6
5	KABUPATEN ACEH UTARA	1	9	10
6	KABUPATEN BIREUEN	2	10	12
7	KABUPATEN GAYO LUES	1	-	1
8	KABUPATEN NAGAN RAYA	-	1	1
9	KABUPATEN ACEH TAMIANG	-	1	1
10	KABUPATEN BENER MERIAH	1	5	6
11	KABUPATEN PIDIE JAYA	-	3	3
III.	SUMATERA UTARA	49	22	77
1	Prov. SUMATERA UTARA	1	3	9
2	KABUPATEN TAPANULI UTARA	4	1	5
3	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	3	-	3
4	KABUPATEN LANGKAT	3	-	3
5	KABUPATEN KARO	5	-	5
6	KABUPATEN SIMALUNGUN.	20	3	23
7	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4	1	6
8	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	-	8	8
9	KABUPATEN SAMOSIR	4	-	4
10	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	-	4	4
11	KABUPATEN PADANG LAWAS	2	-	2
12	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	3	1	4
13	KOTA GUNUNG SITOLI	-	1	1
IV.	SUMATERA BARAT	38	32	70
1	KABUPATEN SOLOK	4	4	8
2	KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG	7	5	12
3	KABUPATEN DHARMASRAYA	2	1	3
4	KABUPATEN TANAH DATAR	5	3	8
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	1	3	4
6	KABUPATEN AGAM	7	1	8
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	7	4	11
8	KABUPATEN PASAMAN	2	1	3
9	KABUPATEN SOLOK SELATAN	2	3	5
10	KABUPATEN PASAMAN BARAT	-	6	6
11	KOTA SAWAHLUNTO	1	-	1

No.	PROV/KAB/KOTA	Tingkatan		TOTAL
		Terampil	Ahli	
1	2	3	4	6
12	KOTA PADANG PANJANG	-	1	1
V.	RIAU	28	7	37
1	Prov. RIAU	1	5	6
2	KABUPATEN KAMPAR	8	1	9
3	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	3	-	3
4	KABUPATEN BENGKALIS	-	1	1
5	KABUPATEN PELELAWAN	-	-	2
6	Kabupaten Kuantan Singingi	16	-	16
VI.	JAMBI	15	23	38
1	Prov. JAMBI	-	1	1
2	KABUPATEN KERINCI	2	2	4
3	KABUPATEN MERANGIN	2	2	4
4	KABUPATEN SAROLANGUN	2	7	9
5	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	-	1	1
6	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	-	3	3
7	KABUPATEN BUNGO	4	3	7
8	KABUPATEN TEBO	2	1	3
9	KOTA SUNGAI PENUH	3	3	6
VII.	SUMATERA SELATAN	40	34	75
1	Prov. SUMATERA SELATAN	1	2	3
2	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	-	1	1
3	KABUPATEN MUARA ENIM	15	2	17
4	KABUPATEN LAHAT	10	2	12
5	KABUPATEN MUSI RAWAS	3	7	10
6	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	1	3	4
7	KABUPATEN OGAN ILIR	-	1	1
8	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	5	3	8
9	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	-	1	2
10	KOTA PAGAR ALAM	-	5	5
11	KOTA LUBUK LINGGAU	-	1	1
12	KOTA PRABUMULIH	1	1	2
13	KABUPATEN EMPAT LAWANG	2	5	7
14	KABUPATEN PALI	2	-	2
VIII.	BENGKULU	10	54	67
1	Prov. BENGKULU	2	14	18
2	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	4	6	10
3	KABUPATEN REJANG LEBONG	1	6	7
4	KABUPATEN BENGKULU UTARA	-	10	10
5	KABUPATEN SELUMA	-	6	6
6	KABUPATEN LEBONG	-	6	6
7	KABUPATEN KEPAHIANG	-	4	4
8	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	3	2	6
IX.	LAMPUNG	105	52	157
1	Prov. LAMPUNG	-	1	1
2	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	2	4	6
3	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	15	4	19
4	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	8	4	12

No.	PROV/KAB/KOTA	Tingkatan		TOTAL
		Terampil	Ahli	
1	2	3	4	6
5	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	16	4	20
6	KABUPATEN TULANG BAWANG	1	2	3
7	KABUPATEN TANGGAMUS	24	9	33
8	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	11	8	19
9	KABUPATEN WAY KANAN	-	1	1
10	KABUPATEN PESAWARAN	8	4	12
11	KABUPATEN PRINGSEWU	13	6	19
12	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	-	4	4
13	KABUPATEN MESUJI	1	-	1
14	Kabupaten Pesisir Barat	6	1	7
X.	BANGKA BELITUNG	5	25	30
1	Prov. BANGKA BELITUNG	-	8	8
2	KABUPATEN BELITUNG	-	5	5
3	KABUPATEN BANGKA TENGAH	2	6	8
4	KABUPATEN BANGKA BARAT	-	2	2
5	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	3	4	7
XI.	KEPULAUAN RIAU	1	2	3
1	Prov. KEPULAUAN RIAU	1	2	3
XII.	JAWA BARAT	149	188	342
1	KABUPATEN BOGOR	8	4	12
2	KABUPATEN SUKABUMI	14	10	24
3	KABUPATEN CIANJUR	1	27	28
4	KABUPATEN BANDUNG	9	6	15
5	KABUPATEN GARUT	25	10	35
6	KABUPATEN TASIKMALAYA	14	23	37
7	KABUPATEN CIAMIS	7	26	33
8	KABUPATEN KUNINGAN	10	12	24
9	KABUPATEN CIREBON	3	7	10
10	KABUPATEN MAJALENGKA	19	13	32
11	KABUPATEN SUMEDANG	8	9	18
12	KABUPATEN INDRAMAYU	1	-	1
13	KABUPATEN SUBANG	3	6	9
14	KABUPATEN PURWAKARTA	15	15	30
15	KABUPATEN KARAWANG	-	6	6
16	KOTA BANJAR	1	1	2
17	KABUPATEN BANDUNG BARAT	9	8	17
18	KABUPATEN PANGANDARAN	2	5	9
XIII.	JAWA TENGAH	229	350	580
1	Prov. JAWA TENGAH	-	9	9
2	KABUPATEN CILACAP	17	28	45
3	KABUPATEN BANYUMAS	7	5	13
4	KABUPATEN PURBALINGGA	9	11	20
5	KABUPATEN BANJARNEGARA	6	23	29
6	KABUPATEN KEBUMEN	7	11	18
7	KABUPATEN PURWOREJO	2	16	18
8	KABUPATEN WONOSOBO	11	16	27
9	KABUPATEN MAGELANG	9	2	11
10	KABUPATEN BOYOLALI	13	12	25
11	KABUPATEN KLATEN	2	8	10

No.	PROV/KAB/KOTA	Tingkatan		TOTAL
		Terampil	Ahli	
1	2	3	4	6
12	KABUPATEN SUKOHARJO	1	6	7
13	KABUPATEN WONOGIRI	3	39	42
14	KABUPATEN KARANGANYAR	6	15	21
15	KABUPATEN SRAGEN	23	17	40
16	KABUPATEN GROBOGAN	13	13	26
17	KABUPATEN BLORA	10	17	27
18	KABUPATEN REMBANG	1	12	13
19	KABUPATEN PATI	8	20	28
20	KABUPATEN KUDUS	-	4	4
21	KABUPATEN SEMARANG	18	14	32
22	KABUPATEN TEMANGGUNG	17	4	21
23	KABUPATEN KENDAL	4	6	10
24	KABUPATEN BATANG	2	11	13
25	KABUPATEN PEKALONGAN	9	6	15
26	KABUPATEN PEMALANG	9	2	11
27	KABUPATEN TEGAL	8	7	15
28	KABUPATEN BREBES	6	13	19
29	KABUPATEN JEPARA	8	3	11
XIV. D.I. YOGYAKARTA		34	17	51
1	Prov. D.I. YOGYAKARTA	4	5	9
2	KABUPATEN KULONPROGO	2	2	4
3	KABUPATEN BANTUL	-	3	3
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	14	5	19
5	KABUPATEN SLEMAN	14	2	16
XV. JAWA TIMUR		228	234	475
1	Prov. JAWA TIMUR	2	1	3
2	KABUPATEN PACITAN	35	6	42
3	KABUPATEN PONOROGO	-	17	18
4	KABUPATEN TRENGGALEK	8	6	14
5	KABUPATEN TULUNGAGUNG	4	15	19
6	KABUPATEN BLITAR	6	20	26
7	KABUPATEN KEDIRI	1	7	8
8	KABUPATEN MALANG	9	14	23
9	KABUPATEN LUMAJANG	7	1	8
10	KABUPATEN JEMBER	7	6	13
11	KABUPATEN BANYUWANGI	8	5	13
12	KABUPATEN BONDOWOSO	20	9	29
13	KABUPATEN SITUBONDO	-	1	10
14	KABUPATEN PROBOLINGGO	16	8	25
15	KABUPATEN PASURUAN	14	9	23
16	KABUPATEN MOJOKERTO	7	7	14
17	KABUPATEN JOMBANG	3	13	16
18	KABUPATEN NGANJUK	7	9	16
19	KABUPATEN MADIUN	8	7	15
20	KABUPATEN MAGETAN	3	19	22
21	KABUPATEN NGAWI	8	20	28
22	KABUPATEN BOJONEGORO	2	10	12
23	KABUPATEN TUBAN	8	6	14
24	KABUPATEN LAMONGAN	5	4	9
25	KABUPATEN BANGKALAN	3	7	10
26	KABUPATEN SAMBANG	13	-	14

No.	PROV/KAB/KOTA	Tingkatan		TOTAL
		Terampil	Ahli	
1	2	3	4	6
27	KABUPATEN PAMEKASAN	17	2	19
28	KABUPATEN SUMENEP	7	5	12
XVI.	BANTEN	26	13	39
1	Prov. BANTEN	-	1	1
2	KABUPATEN LEBAK	14	2	16
3	KABUPATEN SERANG	4	1	5
4	KABUPATEN PANDEGLANG	8	9	17
XVII.	BALI	61	29	91
1	Prov. BALI	1	1	2
2	KABUPATEN JEMBRANA	4	-	4
3	KABUPATEN TABANAN	19	2	21
4	KABUPATEN BADUNG	5	2	7
5	KABUPATEN GIANYAR	8	-	8
6	KABUPATEN KLUNGKUNG	1	-	1
7	KABUPATEN BANGLI	-	8	8
8	KABUPATEN KARANGASEM	12	10	22
9	KABUPATEN BULELENG	11	6	18
XVIII.	NUSA TENGGARA BARAT	79	66	146
1	Prov. NUSA TENGGARA BARAT	3	1	4
2	KABUPATEN LOMBOK BARAT	12	2	14
3	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	11	13	24
4	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	5	15	20
5	KABUPATEN SUMBAWA	12	8	20
6	KABUPATEN DOMPU	9	5	14
7	KABUPATEN BIMA	15	7	22
8	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	2	5	7
9	KOTA BIMA	3	4	7
10	KABUPATEN LOMBOK UTARA	7	6	14
XIX.	NUSA TENGGARA TIMUR	78	26	104
1	Prov. NUSA TENGGARA TIMUR	1	2	3
2	KABUPATEN KUPANG	18	3	21
3	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	11	3	14
4	KABUPATEN B E L U	7	4	11
5	KABUPATEN ALOR	7	6	13
6	KABUPATEN FLORES TIMUR	6	3	9
7	KABUPATEN SIKKA	13	-	13
8	KABUPATEN NGADA	2	2	4
9	KABUPATEN MANGGARAI	6	1	7
10	KABUPATEN SUMBA BARAT	5	-	5
11	KABUPATEN LEMBATA.	1	-	1
12	KABUPATEN SUMBA TENGAH	-	2	2
13	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	1	-	1
XX.	KALIMANTAN BARAT	10	31	41
1	Prov. KALIMANTAN BARAT	-	2	2
2	KABUPATEN SEKADAU	-	1	1
3	KABUPATEN PONTIANAK	1	2	3
4	KABUPATEN SANGGAU	2	2	4
5	KABUPATEN KETAPANG	-	2	2

No.	PROV/KAB/KOTA	Tingkatan		TOTAL
		Terampil	Ahli	
1	2	3	4	6
6	KABUPATEN SINTANG	5	10	15
7	KABUPATEN KAPUAS HULU	-	7	7
8	KABUPATEN BENGKAYANG	-	1	1
9	KABUPATEN LANDAK	-	1	1
10	KABUPATEN MELAWI	-	2	2
11	KABUPATEN KUBU RAYA	1	-	1
12	KABUPATEN MEMPAWAH	1	1	2
XXI.	KALIMANTAN TENGAH	17	32	49
1	Prov. KALIMANTAN TENGAH	-	2	2
2	KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	-	3	3
3	KABUPATEN KAPUAS	7	4	11
4	KABUPATEN BARITO UTARA	1	3	4
5	KABUPATEN SUKAMARA	2	2	4
6	KABUPATEN LAMANDAU	2	6	8
7	KABUPATEN GUNUNG MAS	2	-	2
8	KABUPATEN PULANG PISAU	-	6	6
9	KABUPATEN BARITO TIMUR	2	5	7
10	KOTA PALANGKARAYA	1	1	2
XXII.	KALIMANTAN SELATAN	24	65	89
1	Prov. KALIMANTAN SELATAN	-	1	1
2	KABUPATEN TANAH LAUT	5	2	7
3	KABUPATEN KOTA BARU	-	5	5
4	KABUPATEN BANJAR	8	6	14
5	KABUPATEN BARITO KUALA	-	4	4
6	KABUPATEN TAPIN	1	12	13
7	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	6	3	9
8	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	1	2	3
9	KABUPATEN TABALONG	1	10	11
10	KABUPATEN TANAH BUMBU	-	10	10
11	KABUPATEN BALANGAN	1	6	7
12	KOTA BANJAR BARU	1	4	5
XXIII.	KALIMANTAN TIMUR	9	43	52
1	Prov. KALIMANTAN TIMUR	-	1	1
2	KABUPATEN PASIR	1	4	5
3	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	2	10	12
4	KABUPATEN NUNUKAN	-	7	7
5	KABUPATEN KUTAI BARAT	1	9	10
6	KABUPATEN KUTAI TIMUR	5	3	8
7	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	-	3	3
8	KOTA SAMARINDA	-	2	2
9	KOTA TARAKAN	-	3	3
10	KOTA BONTANG	-	1	1
XXIV	SULAWESI UTARA	6	6	12
1	KAB. MINAHASA SELATAN	-	4	4
2	KOTA TOMOHON	6	2	8
XXV.	SULAWESI TENGAH	31	27	58
1	Prov. SULAWESI TENGAH	-	6	6
2	KABUPATEN BANGGAI	2	7	9

No.	PROV/KAB/KOTA	Tingkatan		TOTAL
		Terampil	Ahli	
1	2	3	4	6
3	KABUPATEN POSO	12	1	13
4	KABUPATEN DONGGALA	6	1	7
5	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	1	-	1
6	KABUPATEN MOROWALI	1	-	1
7	KABUPATEN BUOL	8	5	13
8	KABUPATEN TOJO UNA UNA	-	3	3
9	KOTA PALU	1	4	5
XXVI.	SULAWESI SELATAN	90	112	307
1	Prov. SULAWESI SELATAN	3	-	3
2	KABUPATEN SELAYAR	1	-	1
3	KABUPATEN BULUKUMBA	10	2	12
4	KABUPATEN BANTAENG	2	8	10
5	KABUPATEN JENEPOINTO	6	10	16
6	KABUPATEN TAKALAR	-	7	7
7	KABUPATEN GOWA	9	13	24
8	KABUPATEN SINJAI	5	13	18
9	KABUPATEN SOPPENG	-	-	25
10	KABUPATEN WAJO	-	-	5
11	KABUPATEN MAROS	-	6	8
12	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	9	7	16
13	KABUPATEN PINRANG	4	6	13
14	KABUPATEN BONE	-	-	15
15	KABUPATEN TORAJA UTARA	8	2	12
16	KOTA PALOPO	-	-	4
17	KABUPATEN LUWU UTARA	4	5	15
18	KABUPATEN PANGKEP	1	4	7
19	KABUPATEN TANA TORAJA	9	6	17
20	KABUPATEN LUWU TIMUR	1	6	7
21	KOTA PARE PARE	1	1	2
22	KABUPATEN BARRU	1	9	10
23	KABUPATEN SIDRAP	-	-	16
24	KABUPATEN LUWU	-	-	18
25	KABUPATEN ENREKANG	16	7	26
XXVII.	SULAWESI TENGGARA	46	17	97
1	Prov. SULAWESI TENGGARA	1	4	5
2	KABUPATEN KOLAKA	8	-	9
3	KABUPATEN KENDARI	1	1	2
4	KABUPATEN MUNA	21	5	26
5	KABUPATEN BUTON	4	4	8
6	KABUPATEN KONAWE SELATAN	2	3	5
7	KOTA KENDARI	-	-	3
8	KOTA BAU BAU	-	-	3
9	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	6	-	6
10	KABUPATEN BOMBANA	-	-	7
11	KABUPATEN KONAWE	3	-	16
12	KABUPATEN BUTON UTARA	-	-	3
13	KABUPATEN KOLAKA UTARA	-	-	4
XXVIII.	GORONTALO	1	15	16
1	KABUPATEN GORONTALO	-	6	6
2	KABUPATEN POHUWATO	-	2	2

No.	PROV/KAB/KOTA	Tingkatan		TOTAL
		Terampil	Ahli	
1	2	3	4	6
3	KOTA GORONTALO	-	1	1
4	KABUPATEN GORONTALO UTARA	1	6	7
<hr/>				
XXIX.	MALUKU	8	38	46
1	Prov. MALUKU	-	6	6
2	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	-	1	1
3	KABUPATEN MALUKU TENGAH	-	3	3
4	KABUPATEN BURU	2	4	6
5	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	2	9	11
6	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	3	7	10
7	KOTA AMBON	1	5	6
8	KOTA TUAL	-	3	3
<hr/>				
XXX.	MALUKU UTARA	6	34	58
1	Prov. MALUKU UTARA	-	2	2
2	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	-	5	5
3	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	3	-	6
4	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	-	8	8
5	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	-	-	15
6	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	1	4	5
7	KOTA TIDORE KEPULAUAN	-	8	8
8	KOTA TERNATE	2	7	9
<hr/>				
XXXXI.	PAPUA	26	8	34
1	KABUPATEN KEEROM	2	-	2
2	KABUPATEN SUPIORI	7	-	7
3	KABUPATEN JAYAPURA	8	-	8
4	KABUPATEN YAPEN WAROPEN	4	-	4
5	KABUPATEN BIAK NUMFOR	1	7	8
6	KABUPATEN MIMIKA	1	1	2
7	KABUPATEN MERAUKE	3	-	3
<hr/>				
XXXII.	SULAWESI BARAT	19	20	41
1	Prov. SULAWESI BARAT	-	-	2
2	KABUPATEN MAMUJU	1	1	2
3	KABUPATEN MAJENE	7	2	9
4	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	5	8	13
5	KABUPATEN MAMASA	6	7	13
6	KABUPATEN MAMUJU UTARA	-	2	2
<hr/>				
XXXIII.	PAPUA BARAT	14	41	55
1	Prov. PAPUA BARAT	2	3	5
2	KABUPATEN FAK FAK	4	18	22
3	KABUPATEN SORONG	1	2	3
4	KABUPATEN SORONG SELATAN	5	3	8
5	KABUPATEN RAJA AMPAT	-	2	2
6	KABUPATEN TELUK WONDAMA	2	13	15
<hr/>				

No.	PROV/KAB/KOTA	Tingkatan		TOTAL
		Terampil	Ahli	
1	2	3	4	6
XXXIV	KALIMANTAN UTARA	2	15	17
1	KABUPATEN BULUNGAN	-	6	6
2	KABUPATEN NUNUKAN	-	7	7
3	KABUPATEN MALINAU	-	2	2
4	KOTA TARAKAN	2	-	2
		3,669		

7. Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Tahun 2016

Tabel 4.7. Daftar Sebaran Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Tahun 2016

No.	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	
			1	2
1	2	3	3	3
1	Bali	Badung		1
		Bangli		8
		Buleleng		43
		Jembrana		11
		Karangasem		41
		Tabanan		28
	Bali Total			132
2	Bangka Belitung	Bangka		2
		Bangka Tengah		1
		Belitung Timur		2
	Bangka Belitung Total			5
3	Banten	Lebak		47
		Pandeglang		32
	Banten Total			79
4	Bengkulu	Bengkulu Selatan		7
		Bengkulu Tengah		9
		Bengkulu Utara		127
		Lebong		13
		Seluma		18
	Bengkulu Total			174
5	D.I. Yogyakarta	Bantul		2
		Gunung Kidul		2
		Sleman		1
	D.I. Yogyakarta Total			5
6	Gorontalo	Boalemo		1
		Gorontalo		1
		Pohuwatu		1
	Gorontalo Total			3
7	Jambi	Kerinci		9
		Merangin		6
		Sarolangun		1
		Sungai Penuh		6
		Tebo		1
	Jambi Total			23
8	Jawa Barat	Bandung		4
		Ciamis		1
		Cianjur		298

No.	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	
			3	3
		Cirebon	47	
		Kuningan	56	
		Majalengka	42	
		Pangandaran	37	
		Purwakarta	1	
		Subang	80	
		Sukabumi	1	
		Tasikmalaya	94	
		Sumedang	60	
	Jawa Barat Total		721	
9	Jawa Tengah	Banyumas	1	
		Jepara	1	
		Kebumen	33	
		Pemalang	1	
		Purbalingga	71	
		Rembang	93	
		Temanggung	4	
		Wonosobo	1	
		Kudus	10	
	Jawa Tengah Total		215	
10	Jawa Timur	Lumajang	1	
		Malang	43	
		Ngawi	35	
		Pacitan	1	
		Pasuruan	1	
		Sumenep	193	
	Jawa Timur Total		274	
11	Kalimantan Barat	Bengkayang	1	
		Kapuas Hulu	7	
		Ketapang	61	
		Kubu Raya	6	
		Melawi	1	
		Mempawah	3	
		Pontianak	1	
		Sanggau	7	
		Sekadau	1	
		Sintang	22	
	Kalimantan Barat Total		110	
12	Kalimantan Selatan	Balangan	13	
		Banjar	3	
		Barito Kuala	2	
		Hulu Sungai Selatan	3	
		Hulu Sungai Tengah	19	
		Kota Banjarbaru	1	
		Kotabaru	1	
		Tabalong	11	
		Tanah Bumbu	1	
		Tanah Laut	2	
		Tapin	2	
	Kalimantan Selatan Total		58	
13	Kalimantan Tengah	Barito Timur	2	
		Barito Utara	2	
		Kota Palangkaraya	12	
		Pulang Pisau	1	
	Kalimantan Tengah Total		17	
14	Kalimantan Timur	Paser	1	

No.	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA
			3
	Kalimantan Timur Total		1
15	Lampung	Lampung Selatan	17
		Lampung Timur	3
		Pesawaran	35
	Lampung Total		55
16	Maluku	Ambon	1
	Maluku Total		1
17	Maluku Utara	Halmahera Barat	1
		Halmahera Selatan	1
		Ternate	1
	Maluku Utara Total		3
18	NAD	Aceh Besar	11
		Aceh Selatan	6
		Aceh Tengah	6
		Aceh Utara	9
		Bener Meriah	13
		Bireuen	35
		Pidie	21
	NAD Total		101
19	NTB	Lombok Barat	21
		Lombok Tengah	1
		Lombok Timur	1
		Lombok Utara	38
		Sumbawa	31
	NTB Total		92
20	NTT	Kupang	2
	NTT Total		2
21	Papua	Biak Numfor	1
		Jayapura	1
	Papua Total		2
22	Riau	Bengkalis	15
		Dumai	3
		Indragiri Hilir	8
		Indragiri Hulu	6
		Kampar	18
		Kep. Meranti	6
		Kota Pekan Baru	2
		Kuantan Singingi	9
		Pelalawan	6
		Rokan Hilir	10
		Rokan Hulu	7
		Siak	8
	Riau Total		98
23	Sulawesi Barat	Majene	23
		Mamasa	5
		Mamuju	8
		Mamuju Utara	2
		Polewali Mandar	66
	Sulawesi Barat Total		104
24	Sulawesi Selatan	Gowa	32
		Luwu Timur	6
		Maros	15
		Pinrang	16
		Sinjai	1
		Luwu Utara	10
	Sulawesi Selatan Total		80

No.	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA
			3
25	Sulawesi Tengah	Banggai	18
		Buol	21
		Morowali	1
		Poso	19
		Sigi	16
		Tojo Una-una	4
		Toli-toli	29
	Sulawesi Tengah Total		108
26	Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	7
		Kolaka Timur	12
		Konawe Selatan	16
		Muna	33
	Sulawesi Tenggara Total		68
27	Sulawesi Utara	Manado	1
		Minahasa	4
		Minahasa Selatan	8
		Minahasa Tenggara	1
		Minahasa Utara	12
	Sulawesi Utara Total		26
28	Sumatera Barat	50 Kota	1
		Agam	5
		Dharmasraya	1
		Kota Padang Panjang	2
		Limapuluh Kota	3
		Mentawai	16
		Padan Pariaman	3
		Pasaman	1
		Pasaman Barat	3
		Sijunjung	4
		Solok	2
		Solok Selatan	1
		Tanah Datar	5
	Sumatera Barat Total		47
29	Sumatera Selatan	Muara Enim	6
		Musi Banyuasin	3
		Musi Rawas	46
		Ogan Ilir	2
		OKI	4
		OKU	1
		OKU Selatan	3
		OKU Timur	6
		PALI	7
		Prabumulih	6
	Sumatera Selatan Total		84
30	Sumatera Utara	Deli Serdang	13
		Simalungun	1
	Sumatera Utara Total		14
	Grand Total		2,702



8. Jumlah Penyuluhan Kehutanan Swasta Tahun 2016

Tabel 4.8. Jumlah Penyuluhan Kehutanan Swasta Tahun 2016

No.	Provinsi	Jumlah Penyuluhan Swasta
1	2	3
1	NAD	1
2	Sumatera Utara	40
3	Sumatera Barat	-
4	Riau	29
5	Jambi	64
6	Sumatera Selatan	71
7	Bangka Belitung	-
8	Bengkulu	-
9	Kep. Riau	-
10	Lampung	3
11	DKI Jakarta	8
11	Banten	2
12	Jawa Barat	18
13	Jawa Tengah	16
14	D.I.Yogyakarta	5
15	Jawa Timur	17
16	Bali	-
17	NTB	-
18	NTT	-
19	Kalimantan Utara	-
20	Kalimantan Selatan	60
21	Kalimantan Tengah	2
22	Kalimantan Barat	64
23	Kalimantan Timur	10
24	Sulawesi Barat	-
25	Sulawesi Selatan	-
26	Sulawesi Utara	-
27	Sulawesi Tenggara	-
28	Sulawesi Tengah	-
29	Gorontalo	1
30	Maluku	31
31	Maluku Utara	-
32	Papua	-
33	Papua Barat	-
JUMLAH PENYULUH		441

9. Daftar Penerima Penghargaan Juara Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2016

Lomba dan Apresiasi Wana Lestari merupakan apresiasi dan penghargaan yang dianugerahkan kepada aparat, masyarakat dan pelaku usaha yang berprestasi dalam kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Penghargaan tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian LHK untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

Tabel 4.9. Daftar Penerima Penghargaan Juara Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2016

No	Kategori	Peringkat	Nama	Instansi
1	2	3	4	5
1.	PENYULUH KEHUTANAN	Terbaik I	I GEDE SUTRESNA, SP / 19790412 200604 1 013	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem Prov. Bali
		Terbaik II	DEWI SULISTYOWATI, SP / 19680409 199803 2 004	Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kab. Sleman Prov. D.I.Yogyakarta
		Terbaik III	LOSO RIYANTO, STP / 19690303 199803 1 006	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah
2.	KELOMPOK TANI HUTAN	Terbaik I	KTH GIRI SENANG / Asep Rohman	Kampung Legok Nyenang, Desa Girimekar, Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
		Terbaik II	KTH MUTIARA HIJAU I / Samsudin	Desa Purworejo, Kec. P Sakti, Kab. Lampung Timur Prov. Lampung
		Terbaik III	KMPHP MANGROVE SARI / Rusjan	Dukuh Pandan Sari, Desa Kaliwlingi, Kec.Brebes, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah
3.	PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT	Terbaik I	SUKAMSI SH, MH	Desa Karang Duwur, Kec.Ayah, Kab.Kebumen, Prov.Jawa Tengah
		Terbaik II	I GEDE PARTADANA SH	Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasam, Prov. Bali
		Terbaik III	SUGENG APRIYANTO	Desa Katongan Ngerendu, Kec. Nglipar, Kab. Gunung Kidul Prov. D.I. Yogyakarta
4.	KADER KONSERVASI ALAM	Terbaik I	MUKIDIN	Desa Ngrancalah, Kec. Grabag Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah
		Terbaik II	IR. DIAN ROSSANA ANGGRAINI	Desa Bukit Betung Kec. Sungailiat, Kab. Bangka, Prov. BangkaBelitung
		Terbaik III	ICHVAN SOFYAN	Desa Hargomulyo, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur Prov. Lampung
5.	KELOMPOK PECINTA ALAM	Terbaik I	LAWALATA-IPB	Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Kampus IPB Dramaga, Kota Bogor Prov. Jawa Barat
		Terbaik II	OPA KOMANGJO	Rumah Mangrove , Kel. Pangen, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah
		Terbaik III	ANIMAL LOVERS OF BANGKA ISLAND (ALOBI)	Kel. Kejaksaan, Kec. Taman Sari, Kota Pangkalpinang Prov. Bangka Belitung
6.	KELOMPOK MASYARAKAT PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HKm	Terbaik I	HKm BERINGIN JAYA	Desa Margoyoso, Kec. Sumber Rejo, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
		Terbaik II	HKm MAJU BERSAMA	Desa Santon, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, Prov. NTB
		Terbaik III	HKm MAPAHII	Desa Mapahi, Kec. Pipikoro Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah
7.	KELOMPOK MASYARAKAT PEMEGANG HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA	Terbaik I	LPHN JORONG SIMANCUANG	Desa Alam Pauh Duo, Kec. Pauh Duo Kab. Solok Selatan Prov. Sumatera Barat
		Terbaik II	LPHD KERIMA PURI	Desa Merabu, Kec. Kelay, Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
		Terbaik III	LPHD TIBUSSAN	Desa Tibussan, Kec. Latimojong, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan



10. Materi Penyuluhan (Cetak dan Elektronik)

Tabel 4.10. Daftar Materi Penyuluhan Tahun 2016

No.	Judul Materi Penyuluhan
1	2
I. MATERI MEDIA CETAK (BUKU)	
1	Statistik Pusat Penyuluhan
2	Majalah Kenari 2 edisi
3	Mendulang Rupiah dari Kapulaga
4	Teknik Pendampingan KTH
5	Buku Saku Penyuluhan Kehutanan
6	Peraturan Perundang undangan Bidang Penyuluhan
7	Pendampingan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
8	Membangun Jejaring Kerja dan Kemitraan
9	Kisah Sukses Teladan Wana Lestari
10	Buku Saku Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat
11	Pendampingan Pencegahan Kebakaran
12	Aren
13	Peraturan-Peraturan Tentang Penyuluhan Kehutanan dan Angka Kreditnya Tahun 2016
14	Teknik Pendampingan Kelompok Tani Hutan
15	Menumbuhkembangkan KTH
16	Peraturan Menteri LHK Nomor : P. 43/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2016 ttg Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari
17	Profil Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2016
18	Mendulang Rupiah dari Kapulaga
19	Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan
20	Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Penyuluhan
21	Modul Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
II. MATERI PENYULUHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (VIDEO)	
1	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung
2	Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan di Kabupaten Lumajang

BAB V

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM yang terampil, professional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhhlak mulia. Penyelenggaraan kediklatan LHK dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-11/2015, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pada Tahun 2016, telah diselenggarakan diklat sejumlah 3.876 orang, meliputi Diklat Aparatur sejumlah 2.603 Orang dan Diklat Non Aparatur sejumlah 1.020 Orang.

Dalam upaya menciptakan tenaga teknis kehutanan tingkat menengah yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan siap untuk ditempatkan di lapangan, maka Kementerian LHK telah menyelenggarakan pendidikan SMK Kehutanan Negeri, pada Tahun 2016 sebanyak 713 orang lulusan siswa.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010, pemerintah akan terus menyelenggarakan kediklatan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada Buku Statistik BP2SDM Tahun 2016 ini, data yang ditampilkan terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Jumlah Peserta Diklat Aparatur Berdasarkan Bidang Diklat, Penyelenggaraan Diklat Aparatur Berdasarkan Unit Kerja, Jumlah dan Sebaran Diklat Non Aparatur Berdasarkan Bidang Diklat dan Unit Kerja, Lulusan Karyasiswa Program Pasca Sarjana Beasiswa KLHK dan Non KLHK, Jumlah Siswa dan lulusan SMKKN, Penyelenggaraan Diklat Kerjasama Tahun 2016, KHDTK Unit Kerja BDLHK Berdasarkan Luasan dan Spesifikasinya, Jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat masyarakat di desa - desa hutan, dan Daftar Akreditasi Diklat, SMKK Negeri dan SMKK binaan Kementerian LHK.

1. Jumlah Peserta Diklat Aparatur dan Non Aparatur Berdasarkan Bidang Diklat Tahun 2016

Tabel 5.1. Jumlah Peserta Diklat Aparatur dan Non Aparatur Berdasarkan Bidang Diklat Tahun 2016

No.	Jenis Diklat / Bidang	Target	Realisasi		
			L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I.	DIKLAT APARATUR	2.885	1.881	722	2.603
<i>A.</i>	<i>Prajabatan</i>	<i>441</i>	<i>217</i>	<i>224</i>	<i>441</i>
1	Prajabatan Golongan III	441	217	224	441
<i>B.</i>	<i>Diklat Kepemimpinan</i>	<i>45</i>	<i>32</i>	<i>13</i>	<i>45</i>
2	Diklat Kepemimpinan Tk. II	15	11	4	15
3	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	30	21	9	30
<i>C.</i>	<i>Diklat Teknis</i>	<i>1.868</i>	<i>1.456</i>	<i>379</i>	<i>1.835</i>
<i>a.</i>	<i>Planologi dan Tata Lingkungan</i>	<i>417</i>	<i>319</i>	<i>68</i>	<i>387</i>
4	Aplikasi GPS Bagi Polhut	54	53	1	54
5	Aplikasi GPS untuk Survey Pemetaan	30	20	10	30
6	Teknis Perpetaan Bagi Penyuluhan	60	46	14	60
7	Penggunaan GPS dan Aplikasinya	50	41	9	50
8	Sistem Informasi Geografis (SIG) bagi Operator	110	93	17	110
9	Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Ponsel	90	49	11	60
10	Sistem Informasi Geografis (SIG) Analis	23	17	6	23
<i>b.</i>	<i>Pemanfaatan Hutan Lestari</i>	<i>182</i>	<i>158</i>	<i>24</i>	<i>182</i>
11	Pejabat Penerbit SKAU	30	29	1	30
12	Pendampingan SVLK Bagi Penyuluhan	32	26	6	32
13	PUHH Bagi Polhut	30	28	2	30
14	SVLK Bagi Pendamping Lapangan	30	25	5	30
15	Survey Sosial Ekonomi Kehutanan	30	24	6	30
16	Teknik Pengeringan dan Pengawetan Kayu	30	26	4	30
<i>c.</i>	<i>Pengelolaan Daerah Aliran Sungai</i>	<i>360</i>	<i>287</i>	<i>73</i>	<i>360</i>
17	Budidaya Lebah Madu	30	22	8	30
18	Fasilitator Hutan Tanaman Rakyat	30	22	8	30
19	Pengelolaan Hutan Mangrove	30	22	8	30
20	Pembuatan Rancangan Agroforestry	30	27	3	30
21	Pembuatan Bokashi	30	22	8	30
22	Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan	30	15	15	30
23	Penyusunan Rancangan Sumur Resapan	30	24	6	30
24	Pengelolaan Hutan	30	27	3	30
25	Teknis Pembuatan Kompos dan Bokashi	30	25	5	30
26	Teknik Budadaya Kemenyan	30	30	-	30
27	Teknik Budidaya Cendana	30	25	5	30
28	Teknik Pembibitan Tanaman Hutan Bagi KPH	30	26	4	30

No.	Jenis Diklat / Bidang	Target	Realisasi		
			L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6
<u>d.</u>	<u>Konservasi SDAH dan Ekosistemnya</u>	<u>360</u>	<u>321</u>	<u>36</u>	<u>357</u>
29	Bina Cinta Alam*)	30	26	4	30
30	Dasar-dasar Lingkungan bagi Guru	30	18	12	30
31	Diklat Masyarakat Peduli Api	30	30	-	30
32	Pencegahan Kebakaran Hutan	60	54	6	60
33	Pengendalian Kebakaran Hutan	30	27	3	30
34	Pemberkasan Perkarana Bagi Polhut	30	30	-	30
35	Pemandu Wisata Alam	30	26	1	27
36	Teknik Pengendalian Kebakaran Hutan	30	30	-	30
37	Pelatihan kelompok Pencegah Kebakaran Lahan dan Hutan*)	30	30	-	30
38	Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Hutan	30	29	1	30
39	Valuasi Kawasan Hutan	30	21	9	30
<u>e.</u>	<u>Administrasi dan Manajemen</u>	<u>328</u>	<u>246</u>	<u>82</u>	<u>328</u>
40	Analisis Stake Holder	28	26	2	28
41	Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV	30	23	7	30
42	ECSCS TEST PREPARATION	60	36	24	60
43	Komunikasi Interpersonal	30	22	8	30
44	Manajemen Konflik	30	27	3	30
45	Pemetaan Konflik	90	73	17	90
46	Penulisan Karya Tulis Ilmiah	60	39	21	60
<u>f.</u>	<u>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</u>	<u>221</u>	<u>125</u>	<u>96</u>	<u>221</u>
47	Dasar-dasar AMDAL	65	37	28	65
48	Desiminasi Diklat Lingkungan Bagi Guru, Tokoh Masyarakat, Pemuda, dan Pegawai Daerah	30	21	9	30
49	Penilaian AMDAL	91	52	39	91
50	Pengendalian Pencemaran Air	35	15	20	35
D.	Diklat Fungsional	282	176	106	282
<u>a</u>	<u>FUNGSIONAL PEH</u>	<u>60</u>	<u>43</u>	<u>17</u>	<u>60</u>
51	Pembentukan PEH Tk. Ahli	60	43	17	60
<u>b</u>	<u>FUNGSIONAL PENYULUH</u>	<u>126</u>	<u>73</u>	<u>53</u>	<u>126</u>
52	Alih Tingkat Penyuluhan Kehutanan Terampil ke Penyuluhan Kehutanan Ahli	60	38	22	60
53	Pembentukan Penyuluhan Kehutanan Tk. Ahli	66	35	31	66
<u>c</u>	<u>FUNGSIONAL POLHUT</u>	<u>30</u>	<u>29</u>	<u>1</u>	<u>30</u>
54	Alih Tingkat Polhut Terampil ke Ahli	30	29	1	30
<u>d</u>	<u>FUNGSIONAL WIDYAISWARA</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>e</u>	<u>FUNGSIONAL LINGKUNGAN HIDUP</u>	<u>66</u>	<u>31</u>	<u>35</u>	<u>66</u>
55	Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Tingkat Madya	30	14	16	30
56	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	36	17	19	36

No.	Jenis Diklat / Bidang	Target	Realisasi		
			L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6
II.	DIKLAT NON APARATUR	1.056	729	291	1.020
A.	Bakti Rimbawan	600	400	200	600
	Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Rimbawan	600	400	200	600
B.	Pendamping KTH	456	329	91	420
1	Budidaya Bambu Bagi KTH	30	-	-	-
2	Pendamping KTH (Diklat Pendamping Masyarakat)	96	53	37	90
3	Pendamping KTH (Diklat Budidaya Tanaman dibawah Tegakan)	30	24	6	30
4	Pendamping KTH	90	69	21	90
5	Pendamping KTH (Budidaya Bambu)	30	23	7	30
6	Pendamping KTH (Diklat Pembuatan Bokasi)	30	24	6	30
7	Pembuatan Kebun Bibit rakyat Bagi KTH	31	26	5	31
8	Pencegahan Kebakaran Hutan bagi Masyarakat (KTH)	30	28	2	30
9	Teknik Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan Bagi KTH	29	27	2	29
10	Teknik Budidaya Jamur Kayu/Tiram bagi KTH	30	29	1	30
11	Wanatani Konservasi (KTH)	30	26	4	30
Jumlah		3.935	2.610	1.013	3.623
<i>Kerjasama Diklat</i>		-	-	-	253
TOTAL		3.935	2.610	1.013	3.876

Penyelenggaran diklat aparatur dan non aparatur berdasarkan Bidang di Pusdiklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK (Bogor, Kadipaten, Pekanbaru, Pematangsiantar, Samarinda, Makassar dan Kupang) tahun 2016 sebagai berikut:

- A. Penyelenggaraan diklat aparatur terdiri dari :
 - a. Diklat prajabatan golongan III sebanyak 441 orang.
 - b. Diklat Kepemimpinan sebanyak 45 orang dimana diklat kepemimpinan Tingkat II sebanyak 15 orang, Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 30 orang
 - c. Diklat teknis sebanyak 1.507 orang terdiri dari:
 - Diklat Bidang Planologi dan Tata Lingkungan sebanyak 387 orang .
 - Diklat Bidang Pemanfaatan Hutan Lestari 182 orang dan 253 orang (merupakan kerjasama diklat).
 - Diklat Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebanyak 360 orang.
 - Diklat Bidang Konservasi SDAH dan Ekosistemnya sebanyak 357 orang.

- Diklat Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebanyak 221 orang.

- d. Diklat administrasi dan Manajemen sebanyak realisasi 328 orang.
- e. Diklat fungsional sebanyak realisasi 282 orang.

B. Penyelenggaraan diklat bagi non aparatur terdiri dari:

- a. Diklat Bakti Rimbawan sebanyak 600 orang.
- b. Diklat Pendamping KTH sebanyak 420 orang.

2. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2016

Tabel 5.2. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2016

No	INSTANSI	APARATUR (A)				NON APARATUR (NA)				Jumlah		TOTAL
		Aparatur		Pendampingan KTH		Non Aparatur		Bakti Rimbawan		A	NA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	13	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pusdiklat SDM LHK	341	295	-	-	208	45	-	-	549	340	889
2.	BDLHK Bogor	218	99	44	16	-	-	159	91	421	206	627
3.	BDLHK Kadipaten	213	57	69	21	-	-	-	-	282	78	360
4.	BDLHK Pekanbaru	216	54	48	12	-	-	50	10	314	76	390
5.	BDLHK Pematang Siantar	225	45	57	3	-	-	23	7	305	55	360
6.	BDLHK Samarinda	221	49	53	7	-	-	52	28	326	84	410
7.	BDLHK Makassar	258	72	32	28	-	-	73	47	363	147	510
8.	BDLHK Kupang	216	24	26	4	-	-	43	17	285	45	330
	Jumlah	1.881	722	329	91	208	45	400	200	2.818	1.058	3.876

Penyelenggaran diklat aparatur dan non aparatur berdasarkan unit kerja tahun 2016 sebanyak 3.876 orang sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan diklat di Pusdiklat SDM LHK sebanyak 889 orang.
2. Penyelenggaraan diklat di BDLHK Bogor sebanyak 627 orang.
3. Penyelenggaraan diklat di BDLHK Kadipaten sebanyak 360 orang.
4. Penyelenggaraan diklat di BDLHK Pekanbaru sebanyak 390 orang.
5. Penyelenggaraan diklat di BDLHK Pematangsiantar sebanyak 360 orang.

- 
6. Penyelenggaraan diklat di BDLHK Samarinda sebanyak 410 orang.
 7. Penyelenggaraan diklat di BDLHK Makassar sebanyak 510 orang.
 8. Penyelenggaraan diklat di BDLHK Kupang sebanyak 330 orang.

3. *Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di Pusat Diklat SDM LHK Th. 2016*

Tabel 5.3. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2016

No	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana	Realisasi	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklat Pra Jabatan Golongan III Angkatan I - XII	22	441	217	224	441	Ada 6 Waktu Pelaksanaan (Januari - Juni)
2	Diklat Kepemimpinan Tk. II	31	27	11	4	15	
3	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	97	30	21	9	30	1 Agustus-18 November
4	Penilaian AMDAL	11	30	19	11	30	14-24 September
5	ECSCS TEST PREPARATION	7	60	36	24	60	14-20 April dan 18-23 Juli
6	Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV	11	30	23	7	30	22 November-2 Desember
7	Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Tingkat Madya	17	30	14	16	30	5-24 September
8	KERJASAMA DIKLAT	-	208	45	253		
	JUMLAH DIKLAT	798	549	340	889		

Diklat aparatur dan non aparatur di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2016 diselenggarakan sebanyak delapan jenis diklat dengan jumlah peserta 889 orang, Diklat tersebut meliputi diklat pra jabatan, kepemimpinan, diklat teknis, diklat fungsional dan diklat kerjasama.

4. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di BDLHK Bogor Th.2016

Tabel 5.4. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di Balai Diklat LHK Bogor

No	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana	Realisasi	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aplikasi GPS Bagi Polhut	15	30	30	-	30	2-16 Agustus
2	Teknis Perpetaan Bagi Penyuluh	6	30	26	4	30	24-29 Oktober
3	Penyusunan Rancangan Sumur Resapan	7	30	24	6	30	15-21 Mei
4	Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Hutan		30	29	1	30	24-29 Oktober
5	Dasar-dasar AMDAL	4	35	17	18	35	12-15 April
6	Pengendalian Pencemaran Air	6	35	15	20	35	11-16 April
7	Penilaian AMDAL	11	31	15	16	31	14-24 Juni
8	Komunikasi Interpersonal	7	30	22	8	30	24-30 Juli
9	Pembentukan PEH Tk. Ahli	30	30	23	7	30	12 April-12 Mei
10	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	6	36	17	19	36	16-21 Mei
11	Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Bakti Rimbawan	10	250	159	91	250	10-19 Maret
12	Pendamping KTH	6	60	44	16	60	3-7 Oktober
Jumlah Diklat			717	421	206	627	

Diklat aparatur dan non aparatur yang diselenggarakan di BDLHK Bogor Tahun 2016 sebanyak 12 jenis diklat dengan peserta 627 orang. Adapun realisasi diklat meliputi bidang teknis, administrasi, fungsional dan bakti rimbawan serta diklat pendamping KTH.

5. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di BDLHK Kadipaten Tahun 2016

Tabel 5.5. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di Balai Diklat LHK Kadipaten Tahun 2016

No	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana	Realisasi	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penggunaan GPS dan Aplikasinya	15	30	25	5	30	10-24 Maret
2	Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Ponsel	7	30	24	6	30	10-16 April
3	Budidaya Lebah Madu	7	30	22	8	30	10-16 April
4	Pembuatan Rancangan Agroforestry	10	30	27	3	30	10-24 Mei
5	Pengelolaan Hutan Mangrove	15	30	22	8	30	2-16 Agustus
6	Pembuatan Bokashi	7	30	30	-	30	22-28 Mei
7	Pencegahan Kebakaran Hutan	10	30	26	4	30	10-19 Mei
8	Teknis Penulisan Karya Ilmiah	7	30	20	10	30	10-16 April
9	Alih Tingkat Penyuluhan Kehutanan Terampil ke Penyuluhan Kehutanan Ahli	10	30	25	5	30	10-19 Mei
10	Pendamping KTH (Diklat Pembuatan Bokasi)	7	30	24	6	30	10-16 April
11	Pendamping KTH (Diklat Budidaya Tanaman dibawah Tegakan)	15	30	24	6	30	10-24 Maret
12	Pendamping KTH (Diklat Pendamping Masyarakat)	15	30	21	9	30	10-24 Maret
JUMLAH DIKLAT			360	282	78	360	

Realisasi penyelenggaraan diklat aparatur dan non aparatur di BDLHK Kadipaten Tahun 2016 sebanyak 12 jenis diklat dengan peserta 360 orang, Adapun realisasi diklat meliputi bidang teknis, administrasi, fungsional, bakti rimbawan serta diklat pendamping KTH.

6. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di BDLHK Pematangsiantar Tahun 2016

Tabel 5.6. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2016

No	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)				Waktu Pelaksanaan
			Rencana	Realisasi	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aplikasi GPS Bagi Polhut	15	24	23	1	24	2-16 Mei
2	SIG Bagi Operator	15	30	28	2	30	23 Februari- 8 Maret
3	SVLK Bagi Pendamping Lapangan	9	30	25	5	30	14-22 Maret
4	Teknik Budidaya Kemenyan	15	30	30	-	30	23 Februari- 8 Maret
5	Teknis Pembuatan Kompos dan Bokashi	15	30	25	5	30	2-16 Mei
6	Dasar-dasar Lingkungan bagi Guru	6	30	18	12	30	14-19 Maret
7	Teknik Pengendalian Kebakaran Hutan	15	30	30	-	30	2-16 Mei
8	Manajemen Konflik	18	30	27	3	30	5-22 April
9	Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tk. Ahli	18	36	19	17	36	5-22 April
10	Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Rimbawan	10	30	23	7	30	10-19 Maret
11	Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan/KTH	15	30	28	2	30	23 Maret- 8 April
12	Teknik Budidaya Jamur Kayu/Tiram bagi KTH		30	29	1	30	5-19 April
JUMLAH DIKLAT			360	305	55	360	

Diklat aparatur dan non aparatur di BDLHK Pematangsiantar Tahun 2016 diselenggarakan sebanyak 12 jenis diklat dengan jumlah peserta 360 orang, Diklat tersebut meliputi bidang teknis, administrasi, fungsional, bakti rimbawan serta diklat pendamping KTH.

7. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di BDLHK Pekanbaru Tahun 2016

Tabel 5.7. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di Balai Diklat LHK
Pekanbaru Tahun 2016

No	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana	Realisasi	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SIG Bagi Operator	15	30	24	6	30	15-29 Maret
2	Pendampingan SVLK Bagi Penyuluh	12	32	26	6	32	18-29 April
3	Fasilitator Hutan Tanaman Rakyat	6	30	22	8	30	9-14 Mei
4	Bina Cinta Alam	6	30	26	4	30	1-6 Agustus
5	Pelatihan kelompok Pencegah Kebakaran Lahan dan Hutan	6	30	30	-	30	8-13 Agustus 2016
6	Valuasi Kawasan Hutan	6	30	21	9	30	18-23 April
7	Analisis Stakeholder	6	28	26	2	28	4-9 April
8	Pemetaan Konflik	6	30	25	5	30	23-28 Mei
9	Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tk. Ahli	18	30	18	12	30	1-18 Agustus
10	Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Rimbawan	10	60	41	19	60	10-19 Maret
11	Pendamping KTH	5	30	23	7	30	22-26 Februari
12	Pendamping KTH (Budidaya Bambu)	7	30	23	7	30	23-29 Mei
JUMLAH DIKLAT			390	305	85	390	

Diklat aparatur dan non aparatur di BDLHK Pekanbaru Tahun 2016 diselenggarakan sebanyak 12 jenis diklat dengan jumlah peserta 390 orang, Diklat tersebut meliputi bidang teknis, administrasi, fungsional, bakti rimbawan serta diklat pendamping KTH.

**8. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di BDLHK Samarinda
Tahun 2016**

Tabel 5.8. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di BDLHK Samarinda
Tahun 2016

No	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana	Realisasi	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aplikasi GPS untuk Survey Pemetaan	6	30	20	10	30	25-30 April
2	Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Ponsel	7	30	25	5	30	4-8 April
3	Teknis Perpetaan Bagi Penyuluh	6	30	20	10	30	22-27 Februari
4	Teknik Pengeringan dan Pengawetan Kayu	6	30	26	4	30	4-9 April
5	Pengelolaan Hutan	7	30	27	3	30	11-17 Mei
6	Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan	7	30	15	15	30	4-10 April
7	Diklat Masyarakat Peduli Api	5	30	30	-	30	25-29 April
8	Desiminasi Diklat Lingkungan Bagi Guru, Tokoh Masyarakat, Pemuda, dan Pegawai Daerah	6	30	21	9	30	19-24 Mei
9	Penjenjangan Penyuluh Kehutanan Ahli Jenjang Muda	10	30	16	14	30	11-20 Mei
10	Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Rimbawan	10	80	52	28	80	10-19 Maret
11	Pembuatan Kebun Bibit rakyat Bagi KTH	15	31	26	5	31	23 Mei-6 Juni
12	Teknik Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH)	6	29	27	2	29	22-27 Februari
JUMLAH DIKLAT			410	305	105	410	

Diklat aparatur dan non aparatur di BDLHK Samarinda Tahun 2016 diselenggarakan sebanyak 12 jenis diklat dengan jumlah peserta sebanyak 410 orang, Diklat tersebut meliputi bidang teknis, administrasi, fungsional, bakti rimbawan serta diklat pendamping KTH.

**9. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di BDLHK Makassar
Tahun 2016**

Tabel 5.9. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di BDLHK Makassar
Tahun 2016

No	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana	Realisasi	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penggunaan GPS dan Aplikasinya	15	20	16	4	20	25 Juli-8 Agustus
2	Sistem Informasi Geografis (SIG) bagi Operator	15	20	15	5	20	29 April-13 Mei
3	Sistem Informasi Geografis (SIG) Analis	15	20	17	6	23	17-31 Mei
4	Teknik Pembibitan Tanaman Hutan Bagi KPH	15	30	26	4	30	12-26 April
5	Pencegahan Kebakaran Hutan	8	30	28	2	30	1-8 Agustus
6	Pemberkasan Perkarahan Bagi Polhut	15	30	30	-	30	12-26 April
7	Pemandu Wisata Alam	15	30	27	-	27	19 April-3 Mei
8	Dasar-dasar AMDAL	5	30	20	10	30	4-8 April
9	Penilaian AMDAL	11	30	18	12	30	4-14 April
10	Pemetaan Konflik	6	30	23	7	30	11-16 April
11	Penulisan Karya Tulis Ilmiah	6	30	19	11	30	25-30 April
12	Pembentukan PEH Tingkat Ahli	30	30	20	10	30	9 Februari s.d 9 Maret 2016
13	Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Rimbawan	10	120	73	47	120	10-19 Maret
14	Pendamping KTH (Diklat Pendamping Masyarakat)	15	60	32	28	60	18-22 Juli dan 25-29 Juli
JUMLAH DIKLAT			510	364	144	510	

Diklat aparatur dan non aparatur di BDLHK Makassar Tahun 2016 diselenggarakan sebanyak 14 jenis diklat dengan jumlah peserta sebanyak 510 orang, Diklat tersebut meliputi bidang teknis, administrasi, fungsional, bakti rimbawan serta diklat pendamping KTH.

10. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di BDLHK Kupang Tahun 2016

Tabel 5.10. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Di BDLHK Kupang
Tahun 2016

No	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana	Realisasi	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sistem Informasi Geografis (SIG) bagi Operator	15	30	26	4	30	12-26 April
2	Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Ponsel	7	30	-	-	-	
3	PUHH Bagi Polhut	7	30	28	2	30	24-30 Mei
4	Survey Sosial Ekonomi Kehutanan	7	30	24	6	30	24 Mei-7 Juni
5	Pejabat Penerbit SKAU	8	30	29	1	30	26 Juli-2 Agustus
6	Teknik Budidaya Cendana	7	30	25	5	30	12-18 April
7	Teknik Pengendalian Kebakaran Hutan		30	30	-	30	12-18 Oktober
8	Pemetaan Konflik	6	30	25	5	30	24-30 Mei
9	Alih Tingkat Polhut Terampil ke Ahli	15	30	29	1	30	12-26 April
10	Teknik Pengelolaan Hutan Bagi Tenaga Rimbawan	10	60	43	17	60	10-19 Maret
11	Budidaya Bambu Bagi KTH	7	30	-	-	-	
12	Wanatani Konservasi	7	30	26	4	30	26 Juli-2 Agustus
JUMLAH DIKLAT			390	285	45	330	

Diklat aparatur dan non aparatur di BDLHK Kupang Tahun 2016 diselenggarakan sebanyak 12 jenis diklat dengan jumlah peserta sebanyak 390 orang, Diklat tersebut meliputi bidang teknis, administrasi, fungsional, bakti rimbawan serta diklat pendamping KTH.

11. Jumlah Lulusan Karyasiswa Program Pasca Sarjana Kementerian LHK Tahun 2016

Tabel 5.11. Jumlah Lulusan Karyasiswa Program Pasca Sarjana Kementerian LHK Tahun 2016

No	Tingkatan Studi	Karyasiswa (Org)			Rincian Sponsor			
		L	P	Jumlah	Kementerian LHK	Non KLHK (Bappenas)	Sponsor Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	S3	Dalam Negeri	10	5	15	14	-	1
		Luar Negeri	0	3	3	-	-	3
	Jumlah	10	8	18	14	0	4	
2	S2	Dalam Negeri	69	35	104	49	45	10
		Luar Negeri	16	7	23	-	-	23
	Jumlah	85	42	127	49	45	33	
Jumlah Th. 2016		145		63		45	37	

Jumlah Lulusan Karyasiswa Program Pasca Sarjana Kementerian LHK Tahun 2016 sebanyak 145 orang yang dibiayai dari Kementerian LHK sebanyak 63 orang, Non Kementerian LHK 45 orang dan sponsor 37 orang.

Tabel 5.12. Lulusan Karyasiswa Kementerian LHK Program S2 dan S3 Berdasarkan Program Studi Tahun 2016

No.	Program Studi	Jumlah
1	2	3
A	Program Magister/Master (S2)	
1	Administrasi Publik	7
2	Akuntansi	3
3	Pengelolaan DAS	2
4	Ekonomi	6
5	Geografi	7
6	Kehutanan	38
7	Komunikasi	2
8	Konservasi	8
9	Lingkungan	21
10	Resolusi Konflik	1



No.	Program Studi	Jumlah
1`	2	3
11	Perencanaan	25
12	Silvikultur	2
13	Teknik Elektro	1
14	Teknik Geodesi	1
15	Pendidikan	1
16	Manajemen (M. Pembangunan Daerah)	2
Jumlah Magister/Master		127
B	Program Doktor	
1	Bioteknologi	1
2	Ekowisata	1
3	Kehutanan	12
4	Konservasi	2
5	Lingkungan	2
Jumlah Doktor		18
Jumlah Lulusan S2 dan S3		145

Tabel 5.13. Lulusan Karyasiswa Kementerian LHK Program S2 dan S3 berdasarkan Perguruan Tinggi Tahun 2016

No.	Perguruan Tinggi	Jumlah S2 dan S3
1	2	3
I	Dalam Negeri (DN)	
1	Institut Pertanian Bogor (IPB)	31
2	Institut Teknologi Bandung (ITB)	2
3	Institut Teknologi Subarabaya (ITS)	1
4	Universitas Andalas (UNAND)	4
6	Universitas Diponegoro (UNDIP)	6
7	Universitas Gadjah Mada (UGM)	52
9	Universitas Hasanuddin (UNHAS)	6
10	Universitas Indonesia (UI)	6
12	Universitas Mataram	1

No.	Perguruan Tinggi	Jumlah S2 dan S3
1	2	3
13	Universitas Mulawarman (UNMUL)	2
14	Universitas Padjadjaran (UNPAD)	5
15	Universitas Riau (UNRI)	2
17	Universitas Sriwijaya (UNSRI)	1
Jumlah Dalam Negeri (DN)		119
II	Luar Negeri (LN)	
1	Ehime University	1
2	Georg-August Universitat, Gottingen, Germany	1
3	James Cok University	2
4	National University of Singapore	1
5	Seoul National University	1
6	Southern Cross University	1
7	The Australian National University	1
8	The Flinders University-Australia	2
9	The University of Melbourne	9
10	University of Texas At El Paso	1
11	Wageningen University- Belanda	1
12	Yeungnam University	5
Jumlah Luar Negeri (LN)		26
Jumlah DN & LN		145

12. Lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) Negeri Tahun 2016

Tabel 5.14. Lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) Negeri Tahun 2016

No.	Uraian	Lulusan Per SMK (Org)										Jumlah		
		Pekanbaru		Kadipaten		Samarinda		Makassar		Manokwari		L	P	Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	13	14	15
1.	Jumlah Lulus Th. 2016 *)	117	41	127	29	103	41	102	35	84	34	533	180	713
2.	Jumlah Lulus Th. 2015	42	14	42	16	48	13	43	16	36	11	211	70	281
3.	Jumlah Lulus Th. 2014	41	21	50	12	35	24	40	20	41	13	206	90	296
4.	Jumlah Lulus Th. 2013	41	15	45	19	34	19	43	20	23	10	187	83	270

Keterangan :

- *) Tahun 2016, SMK Kehutanan meluluskan 2 (dua) angkatan yaitu angkatan yang menggunakan Kurikulum KTSP (Masa Studi 4 Tahun) dan Kurikulum 2013 (Masa Studi 3 Tahun)

Jumlah lulusan SMK Kehutanan Negeri pada tahun 2016 sebanyak 713 orang siswa. Jumlah lulusan terbanyak adalah SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru yaitu 158 orang siswa. Secara keseluruhan jumlah lulusan SMK Kehutanan Negeri tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Lulusan SMK Kehutanan Negeri tersebut banyak yang diterima menjadi pegawai pada instansi pemerintahan (Kementerian LHK 177 orang, Pemda 33 orang dan KPH 244 orang), pegawai BUMN (Perhutani 80 orang dan Inhutani 4 orang), serta pegawai perusahaan swasta bidang industri kehutanan berjumlah 5 orang, selebihnya banyak yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi.

Badan P2SDM cq. Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan selain membina lima SMK Kehutanan Negeri, secara teknis mempunyai kewajiban membina SMK Kehutanan Binaan Kemendikbud yang berjumlah 20 sekolah, dengan rincian :

- 1) 8 (delapan) SMK Negeri yaitu SMK Negeri I Rupat Utara, SMK Negeri I Tualang Siak, SMK Negeri 3 Pandeglang, SMK Negeri I Pagelaran, Cianjur, SMK Negeri I Pasir Kuda Cianjur, SMK Negeri 4 Garut, SMK Negeri I Poco Ranaka NTT, SMK Negeri I Kumbe Merauke.
- 2) 12 (dua belas) SMK Kehutanan Swasta yaitu SMKK Muhamadiyah I Rangkas Bitung, SMKK Bakti Rimba Bogor, SMKK Sobat Bumi Tasikmalaya, SMKK Rimba Bahari Sumedang, SMKK Rimba Taruna Rembang, SMKK Wali Sembilan Tuban, SMK Al Falah Gresik, SMK Walisongo Mojokerto, SMK Qamanul Huda Lombar NTB, SMK Widya Nusantara Maros Sulawesi Selatan, SMK Muhammadiyah Parigi Sulawesi Selatan, SMKK Mamasa Barat.

Pembinaan pendidikan kehutanan tingkat menengah tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Menteri Kehutanan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor NK.2/Menhut-IX/2013, serta Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan P2SDM Kehutanan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud dengan Nomor: 001/VI/KB/2013.

13. Jumlah Tenaga Pendamping KTH

Tabel 5.15. Jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan tahun 2016

No 1	Instansi 2	Jumlah (orang) 3
1	BDLHK Bogor	60
2	BDLHK Kadipaten	90
3	BDLHK Pematangsiantar	60
4	BDLHK Pekanbaru	60
5	BDLHK Samarinda	60
6	BDLHK Makassar	60
7	BDLHK Kupang	30
Jumlah		420

Diklat Pendamping KTH tersebut dilaksanakan untuk memberikan pembekalan para tenaga pendamping KTH dalam mengadakan pemberdayaan



masyarakat desa hutan. Pada tahun 2016, jumlah peserta diklat tersebut sebanyak 420 orang.

14. Akreditasi kelembagaan diklat eksternal dan internal

Tahun 2016 Pusdiklat SDM LHK meraih sertifikat akreditasi dengan predikat nilai A untuk penyelenggaraan diklat sebagai berikut:

- Akreditasi A untuk Diklat Prajabatan Golongan I dan II
- Akreditasi A untuk Diklat Prajabatan Golongan III
- Akreditasi A untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III
- Akreditasi A untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Selain diklat kepemimpinan dan prajabatan, Pusdiklat SDM LHK juga mendapatkan akreditasi untuk diklat teknis dan fungsional dari Lembaga Administrasi Negara selama 5 tahun, dengan kewenangan mengakreditasi lembaga diklat baik pemerintah, BUMN dan swasta bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

15. Penyelenggaraan Kerjasama Diklat Tahun 2016

Tabel 5.16. Penyelenggaraan Kerjasama Diklat Tahun 2016

1) Pusat Diklat SDM LHK

No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi/Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	Diklat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPPL) untuk Hutan Negara	PT. Ayamaru Sertifikasi	1	22	11	33	13	7-19 Maret	Bogor
2	Calon Auditor VLK Hutan	PT. Ayamaru Sertifikasi	1	34	5	39	13	15-26 April	Bogor
3	Calon Auditor VLK pada Industri	PT. Ayamaru Sertifikasi	1	27	9	36	13	4-14 April	Bogor
		PT. Integritas Persada Sertifikasi	1	28	-	28	11	5-15 Oktober	Palembang
		Universitas Nusa Bangsa	1	27	-	27	11	4-14 Oktober	Bogor
4	Dasar-dasar AMDAL	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	1	25	5	30	5	25-29 Juli	Bogor
		Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	2	45	15	60	5	1-5 Agustus dan 8-12 Agustus	Bogor
JUMLAH PUSDIKLAT SDM LHK			8	208	45	253			



2) BDLHK Bogor

No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi/Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	Ganis PHPL PKBR	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. VIII Pontianak)	2	46	-	46	7	11-27 April	Pontianak
		Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Jakarta)	1	25	4	29	11	8-18 Februari	Cisarua, Bogor
		Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. VI Bandar Lampung) dengan Asosiasi GANISPHPL Wil. I Jabar	1	21	2	23	16	11-26 Agustus	Cisarua, Bogor
2	Perubahan Iklim dan REDD+ bagi Pejabat PEH	BDK Bogor dan GIZ	1	11	7	18	19	1-19 Februari	Bogor
3	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat Angkatan XXIII-XXV	UNDP REDD+	3	90	-	90	6	7-12 April	Ketapang
4	Ganis PHPL Perencanaan Hutan	BPHP Wil. VIII Pontianak dan APHI Komda Kalimantan Barat	1	8	-	8	17	12-28 Oktober	BDLHK Bogor
5	Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan	BPHP Wil. VIII Pontianak dan APHI Komda Kalimantan Barat	1	25	-	25	19	12 Oktober - 1 November	BDLHK Bogor
JUMLAH BDLHK Bogor			10	226	13	239			

3) BDLHK Kadipaten

No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi/Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	Ganis PHPL PKGR	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Surabaya), BDK Kadipaten, dan ISWA Komda Jawa Timur	1	12	-	12	18	2-19 Februari	Surabaya
		BPHP Wil. VII Denpasar dan ISWA Komda Jawa Timur	1	23	-	23	15	22 November - 6 Desember	Surabaya
2	Ganis PHPL PKBR	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Surabaya), BDK Kadipaten, dan ISWA Komda Jawa Timur	2	50	7	57	18	2-19 Februari	Surabaya
		BPHP Wil. VII Denpasar dan ISWA Komda Jawa Timur	1	38	-	38	16	22 November-8 Desember	BDLHK Kadipaten



No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi/Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Ganis PHPL PKBJ	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Surabaya), BDK Kadipaten, dan ISWA Komda Jawa Timur	1	13	-	13	18	2-19 Februari	Surabaya
4	Ganis PHPL PKGJ	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Surabaya), BDK Kadipaten, dan ISWA Komda Jawa Timur	1	11	3	14	18	2-19 Februari	Surabaya
5	Ganis PHPL PKL	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Surabaya), BDK Kadipaten, dan ISWA Komda Jawa Timur	1	18	1	19	18	2-19 Februari	Surabaya
6	Penyetaraan Ganis PHPL PKGR menjadi Ganis PHPL PKBR	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP wil. VII Denpasar), BDK Kadipaten BPHP Wil. VII Denpasar dan ISWA Komda Jawa Timur	1	32	2	34	9	2-10 Agustus	Surabaya
			1	24	-	24	9	22-30 November	Surabaya
JUMLAH BDLHK Kadipaten			10	221	13	234			

4) BDLHK Pematangsiantar

No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi/Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ganis PHPL PKBR	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. I Banda Aceh)	1	30	5	35	9	18 Mei-4 Juni	BDLHK Pematangsiantar
		BPHP Wil.II Medan	1	26	3	29	8	18 Mei-3 Juni	BDLHK Pematangsiantar
2	Ganis PHPL PKGR	BPHP Wil.II Medan	1	10	5	15	8	19 Mei-3 Juni	BDLHK Pematangsiantar
3	Budidaya dan Agribisnis Jamur	Badan Koordinasi Penyuluhan Sumatera Utara	2	60	-	60	4	26-29 September	BDLHK Pematangsiantar
4	Teknik Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman	IUPHHK PT. Sumatera Riang Lestari Labuhan Batu Sunatera Utara	1	32	-	32	6	14-19 November	BDLHK Pematangsiantar
JUMLAH BDLHK Pematangsiantar			6	158	13	171			

5) BDLHK Pekanbaru

No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi/ Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dalkarlahut Berbasis	BDK Pekanbaru dan UNDP REDD+	3	76	9	85	6	10-15 Februari	Pekanbaru

No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi/ Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masyarakat Angkatan I, II, III									
2	Dalkarlahut Berbasis Masyarakat Angk. IV dan VI	BDK Pekanbaru dan UNDP REDD+	3	79	16	95	6	17-22 Februari	Pekanbaru
3	Dalkarlahut Berbasis Masyarakat Angkatan VII sd. XI	BD LHK Pekanbaru dan UNDP REDD+ Angkatan VII sd. XI	5	131	18	149	6	24-29 Februari	LPMP Jambi
4	Dalkarlahut Berbasis Masyarakat Angkatan XII sd. XVI	BD LHK Pekanbaru dan UNDP REDD+	5	128	22	150	6	2-7 Maret	Palembang
5	Dalkarlahut Angkatan XVII sd. XIX	UNDP, BD LHK Pekanbaru	3	69	21	90	6	10-15 Maret	Sekayu, Palembang
6	Teknik Pengendalian Karhutla Bagi Pemegang IUPHHK	APHI Komda Riau	1	40	-	40	6	15-20 Agustus	Pekanbaru
		APHI Komda Riau	1	40	-	40	6	26 September-1 Oktober	Base Kam Baserah
		APHI Komda Riau	1	40	-	40	6	17-22 Oktober	BDLHK Pekanbaru
		APHI Komda Riau dan PT. RAPP	1	40	-	40	6	7-12 November	BDLHK Pekanbaru
7	Penyegaran Bagi Polhut Taman Nasional Bukit Tigapuluh	Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh	1	20	-	20	6	14-18 April	Pekanbaru
8	Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan Tk. Lanjut	GAPKI Riau	1	33	-	33	6	23-28 Februari	BDLHK Pekanbaru
9	Pembentukan PEH Tk. Ahli	BD LHK Pekanbaru dan Badan Diklat Prov. Bengkulu	1	21	9	30	28	29 Maret-25 April	Bengkulu
10	Ganis PHPL PKBR	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Pekanbaru) dan APHI Komda Riau	2	50	1	51	18	1-18 Februari	Pekanbaru
		Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Pekanbaru) dan APHI Komda Palembang	1	33	3	36	17	18 Januari-3 Februari	Palembang
		Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Pekanbaru) dan APHI Komda Palembang	1	31	2	33	17	16 Februari-3 Maret	Palembang
		BPHP Wil. V Palembang	1	28	-	28	17	26 Juli-11 Agustus	Palembang
		BPHP Wil. IV Jambi, APHI Komda Jambi	1	30	-	30		17 November-3 Desember	Jambi
		BPHP Wil. IV Jambi dan APHI Komda Jambi	1	22	-	22	17	16 Mei-1 Juni	BDLHK Pekanbaru
		APHI Komda Riau	1	55	-	55	17	14-30 Oktober	BDLHK Pekanbaru



No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi/ Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	28	-	28	6	Februari
11	Teknik Dalkarhutla bagi Pemegang IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman/Restorasi Ekosistem dan Perkebunan	PT. Panca Eka	1	31	-	31	6	9-14 Mei	BDLHK Pekanbaru
		GAPKI dan Asian Agri	1	60	-	60	6	28 November-3 Desember	Pekanbaru
12	Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan Angkatan I dan II	BPHP Wil. II Pekanbaru dan APHI Komda Riau	1	46	1	47	18	18 Mei-4 Juni	BDLHK Pekanbaru
		BPHP Wil. IV Jambi dan APHI Komda Jambi	1	14	-	14	28	17 November-14 Desember	Jambi
		BPHP Wil. V Palembang	1	16	-	16	21	24 November-14 Desember	Palembang
13	Ganis PHPL PKGR	BPHP Wil. IV Jambi dan APHI Komda Jambi	1	5	1	6	17	16 Mei-1 Juni	BDLHK Pekanbaru
		BPHP Wil. IV Jambi dan APHI Komda Jambi	1	8	-	8	17	17 November-3 Desember	Jambi
14	Ganis PHPL PKLI	BPHP Wil. IV Jambi dan APHI Komda Jambi	1	5	-	5	17	16 Mei-1 Juni	BDLHK Pekanbaru
15	Pembentukan Polisi Kehutanan Tk. Terampil Fase II	Polda Riau, Dinas Kehutanan Prov. Riau dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DI. Yogyakarta	1	24	4	28	75	13-27 Juni	Pekanbaru
16	Ganis PHPL Pembinaan Hutan	APHI Komda Riau	1	33	-	33	16	14-29 Oktober	BDLHK Pekanbaru
17	Ganis PHPL Pemanenan Hasil Hutan	APHI Komda Riau dan BPHP Wil. III Pekanbaru	1	24	-	24	16	3-18 November	BDLHK Pekanbaru
18	Ganis PHPL Perencanaan Hutan	BPHP Wil. IV Jambi dan APHI Komda Jambi	1	20	-	20	25	17 November-11 Desember	Jambi
19	Operator Chainsaw	Jogja Training & Career Center	1	15		15	3	3-5 Desember	Yogyakarta
JUMLAH BDLHK Pekanbaru			48	1.295	107	1.402			

6) BDLHK SAMARINDA

No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi /Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ganis PHPL PKBR	BPHP Wil. XIII Samarinda, BD LHK Samarinda dan ISWA Komda Kaltim	2	46	10	56	18	23 Februari-11 Maret	Samarinda

No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi /Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BPHP Wil. XII Samarinda, BD LHK Samarinda dan Komda APIHI Kalimantan Timur	2	54	2	56	18	1-18 Maret	Samarinda
		BPHP Banjarbaru, BD LHK Samarinda dan ISWA Komda Kalimantan Selatan	2	46	-	46	17	7-23 Maret	Banjarbaru
		BPHP Wil. XII Palangkaraya	2	59	-	59	17	15-31 Maret	Palangkaraya
		BDLHK Samarinda , BPHP Wil. XI Samarinda dan APIHI Komda Kaltim	1	40	-	40	28	16 November-13 Desember	Samarinda
		BPHP Wil. X Palangkaraya dengan APIHI Komda Kalteng	1	26	-	26	17	1-17 Desember	Palangkaraya
2	Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan	BPHP Wil. XII Samarinda, BD LHK Samarinda dan Komda APIHI Kalimantan Timur	1	35	3	38	23	1-23 Maret	Samarinda
		Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. XII Palangkaraya)	1	24	-	24	20	15 Maret-3 April	Palangkaraya
		BDLHK Samarinda, BPHP Wil. XI Samarinda dan APIHI Komda Kaltim	1	24	-	24	23	16 November-8 Desember	Samarinda
		BPHP Wil. X Palangkaraya dengan APIHI Komda Kalteng	1		-	21	21	1-21 Desember	Palangkaraya
3	Ganis PHPL Pemanenan Hutan	BPHP Wil. XII Samarinda, BD LHK Samarinda dan Komda APIHI Kalimantan Timur	1	32	-	32	24	1-24 Maret	Samarinda
		BPHP Wil. XI Samarinda dan APIHI Komda Kaltim	1	18	-	18	22	16 November-7 Desember	Samarinda
4	Ganis PHPL Perencanaan Hutan	BPHP Wil. XII Samarinda, BD LHK Samarinda dan Komda APIHI Kalimantan Timur	1	29	3	32	29	1-29 Maret	Samarinda
		BPHP Wil. XI Samarinda dan APIHI Komda Kaltim	1	21	-	21	30	16 November-15 Desember	Samarinda
5	Ganis PHPL Pembinaan Hutan	BPHP Wil. XII Samarinda, BD LHK Samarinda dan Komda APIHI Kalimantan Timur	2	47	1	48	30	1-30 Maret	Samarinda
		BPHP Wil. XI Samarinda dan APIHI Komda Kaltim	1	27	-	27	30	16 November-15 Desember	Samarinda



No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi /Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ganis PHPL PKGR	BPHP Banjarbaru, BD LHK Samarinda dan ISWA Komda Kalsel	1	18	-	18	17	7-23 Maret	Banjarbaru
7	Dalkarhutla Bagi Pemegang IUPHHK	BD LHK Samarinda dan PT. Tanjung Redep Hutani di Kab. Berau	1	35	-	35	3	22-24 Maret	Samarinda
8	Wasganis PHPL Pengujian Kelompok Minyak	BDLHK Samarinda, Dinas Kehutanan prov. Kaltim dan BPHP Wil XI Samarinda	1	16	-	16	30	12 April-11 Mei	Samarinda
9	Teknik Pengendalian Keb. Hutan dan Lahan Bagi Pemegang IUPHHK Hutan Alam	Ecology and Conservation Center for Tropical Studies	1	34	-	34	6	26-31 Mei	Samarinda
10	Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup Darah Kab. Kutai Kartanegara	1	12	-	12	5	7-11 November	Samarinda
JUMLAH BDLHK Samarinda			26	617	19	683			

7) BDLHK Makassar

No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi /Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ganis PHPL PKGR	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. XV) dan ISWA Sulawesi Selatan	1	34	7	41	17	12-28 Januari	Makassar
		Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. XVII Jayapura)	1	10	1	11	17	18 Maret - 3 April	Jayapura
		Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. XV Makassar), Komda ISWA Sulawesi Selatan	1	28	5	33	17	17 Maret-2 April	Makassar
		BPHP Wil. XV Makassar, BDLHK Makassar dan Indonesian Sawmill and Wood Working Association (ISWA) Komda Sulawesi Selatan	1	32	-	32	17	25 Oktober-10 November	Makassar
2	Ganis PHPL PKBR	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. XV) dan ISWA Sulawesi Selatan	1	69	5	74	17	12-28 Januari	Makassar

No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi /Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. XVI Manokwari)	1	31	-	31	17	28 Maret-12 April	Makassar
		Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. XVII Jayapura)	1	22	3	25	17	18 Maret-3 April	Jayapura
		BPHP Wil. XV Makassar, BD LHK Makassar dan ISWA Komda Sulawesi Selatan	2	50	-	50	17	25 Februari-12 Maret	Makassar
		BPHP Wil. XV Makassar, BDLHK Makassar	1	32	8	40		28 Juli-13 Agustus	Makassar
		BPHP Wil. XIV Ambon, BD LHK Makassar	1	26	-	26	18	10-27 Oktober	Ambon
		BPHP Wil. XV Makassar, BDLHK Makassar dan Indonesian Sawmill and Wood Working Association (ISWA) Komda Sulawesi Selatan	1	44	-	44	17	25 Oktober-10 November	Makassar
		Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. XII Palu) 7 Asosiasi Industri dan Pedagang Kayu (AIEPK)	1	28	3	31	16	25 Juli-10 Agustus	Kab Banggai
3	Ganis PHPL Perencanaan Hutan	Ditjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP Wil. XIII Makassar), ISWA Komda Sulawesi Selatan	1	22	2	24	17	7-30 April	Makassar
		BPHP Wil. XVI Manokwari, APIHI Komda Papua Barat	1	7	-	7	24	5-28 September	Manokwari
4	Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tk. Ahli	Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Fak-Fak)	1	6	8	14	11	23 Mei-4 Juni	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Fak-fak
5	Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan	BPHP Wil. XVI Manokwari dan APIHI Komda Papua Barat	1	12	2	14	19	5-23 September	Manokwari
6	Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tk. Ahli	Pemda Makassar	1	5	8	13	17	19 September-6 Oktober	Makassar
7	Pembentukan Polhut Pola Swadana	Pemda Makassar	2	45	7	52	75	28 Juli-10 Oktober	Makassar
8	Pembentukan Polhut Fase II Angkatan XXXVI dan XXXVII		2	52	-	52	14	26 September-10 Oktober	Makassar
JUMLAH BDLHK Makassar			22	555	59	614			

8) BDLHK Kupang

No	Jenis Diklat	Kerjasama dengan Instansi /Lembaga	Ak	Realisasi			Lama Diklat (Hari)	Waktu	Lokasi Diklat
				L	P	Jml			
1	Aplikasi GPS untuk Survey dan Pemetaan	Dishutbun Kab. Ende	1	19	4	23	5	13-17 Juni	Ende
2	Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan	Community Development PT. Batutua Tembaga Raya dan PT. Batutua Kharisma Permai	1	16	-	16	6	29 Oktober-3 November	Wetar
3	Inhouse Training Aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk Perencanaan Hutan Kemasyarakatan	Puslitbanghut Bogor (AFOCO)	1	6	-	6	5	1-5 Agustus	Kupang
4	Bimtek Penggunaan GPS dan Aplikasi GIS	Dishut TTS	1	10	-	10	3	10-12 Agustus	So'e
5	Inhouse Training Penggunaan GPS dan GIS untuk Pengelolaan KPH	KPHL Mutis Timau	1	10	-	10	3	6-8 September	So'e
6	Inhouse Training Pemetaan Partisipatif untuk Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	Puslitbang (AFOCO)	1	40	-	40	3	6-8 Oktober	Desa Hikong Kab. Sikka
JUMLAH BDLHK Kupang			6	101	4	105			

Diklat kerjasama merupakan upaya Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Diklat LHK untuk memperluas jejaring kerja serta pengembangan diklat lingkungan hidup dan kehutanan dengan beberapa institusi baik yang ada di dalam maupun di luar lingkup Kementerian LHK serta lembaga non pemerintah. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan diklat kerjasama bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 3.805 orang peserta.

16. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Lingkup Badan P2SDM

Tabel 5.17. Daftar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Lingkup Badan P2SDM

No	BDLHK	LOKASI/LUAS (ha)	DASAR STATUS HUKUM	TAHUN TATA BATAS	TAHUN PENETAPAN KHDTK
					1 2 3 4 5 6
1.	Bogor	Jampang Tengah - Sukabumi / 45,148	Sertifikat Tanah No.301 No.2961/II/1995 SK Kanwil BPN Jabar No.402/HP/Kw-BPN/95 tgl. 10 November 1995 sbg Hutan Diklat	1995	
		Rumpin / 66,80	SK.338/Menhut-II/2010 tgl.25 Mei 2010 sbg KHDTK Diklat		2006 2010
2.	Kadipaten	Sawala Mandapa / 146,58	SK.164/Menhut-II/2005 tgl. 9 Juni 2005 tentang penunjukan sekaligus penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	2009	2005
3.	Pematang Siantar	Pondok Buluh / 1.272,70	SK.Dirjen Kehutanan No. 34/Kpts/DJI/1983 tgl. 8 Pebruari 1983 sbg Hutan Diklat	1998	
			SK.Menhut No.398/Kpts-II/1988 tgl. 4 Agustus 1988 sbg Hutan Diklat		2003
			SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO .1030/Menhut-VII/KUH/2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Lindung sebagai KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh seluas 1.272,70 HA di kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 April 2015	2014	2015
4	Pekanbaru	Bukit Suligi (2.183)	SK.Menhut No. 729/Kpts-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan ralat surat No S.6/Kum-1/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penetapan KHDTK Hutan Diklat Pekanbaru	1985	2009
5.	Samarinda	Loa Haur- Kab. Kutai / 4.310	SK.Menhut No.8815/Kpts-II/2002 tgl. 24 September 2002 sbg KHDTK Diklat	2000	2002
6.	Makassar	Tabo-tabo - Kec. Bungaro Kab. Pangkep Sulsel / 500	SK.Menhut No. 13/Menhut-II/2010 tgl. 14 Januari 2010 sbg KHDTK Hutan Diklat BDK Makassar	2003	2010
7.	Kupang	Sesimeini Sanam / 2.973,20	SK Menhut No. 367/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Penetapan KHDTK Hutan Diklat BDK Kupang	2007	2009

BAB VI.

PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN



Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terampil, professional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhhlak mulia. Penyelenggaraan pelatihan ini dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Pelatihan Masyarakat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan masyarakat itu sendiri dan penyelenggaraan ekspos generasi lingkungan. Sedangkan pengembangan generasi lingkungan dilaksanakan diantaranya dengan mewujudkan sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata) dan membentuk anggota saka kalpataru dan saka wanabakti yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

Harapan dari penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan ekspos generasi lingkungan ini adalah terbentuknya masyarakat yang cinta dan peduli terhadap lingkungan sehingga dapat berperan sebagai perintis, penyelamat, pengabdi dan pembina bagi masyarakat disekitarnya agar peduli pada lingkungan dan berperan aktif dalam pelestarian alam untuk mewujudkan Indonesia yang lebih lestari.

Sedangkan pengembangan generasi lingkungan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Program adiwiyata yang ditujukan kepada sekolah bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada Buku Statistik BP2SDM Tahun 2016 ini, data yang ditampilkan terkait dengan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan adalah Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Generasi Muda Lingkungan Hidup, Pelatihan Kader Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Lokasi Pelatihan, Daftar Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional, Penyelenggaraan Pelatihan Pengenalan Saka Kalpataru.

1. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Generasi Muda Lingkungan Hidup Tahun 2016

Upaya peningkatan kapasitas generasi muda LH dilaksanakan melalui Pelatihan Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Pendidik dan Peserta Didik Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Pelatihan masyarakat bagi generasi muda, pada Tahun 2016 telah diselenggarakan 6 (enam) pelatihan dengan total peserta sebanyak 906 peserta. Sebagaimana table berikut.

Tabel 6.1. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Generasi Muda Lingkungan Hidup Tahun 2016

No	Kegiatan/ Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Peserta		
				Pria	Wanita	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Pendidik Tingkat TK/RA	17 s.d 20 April 2016	Kantor Puslatmas &PGL, Kawasan Puspittek, Tangsel	0	40	40
2	Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Pendidik Tingkat SD/MI	25 s.d 27 Mei 2016	Kantor Puslatmas & PGL, Kawasan Puspittek, Tangsel	27	14	41
3	Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Peserta Didik Tingkat TK/RA	17 Mei 2016	Kota Bandung	112	188	300
4	Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Peserta Didik Tingkat SD/MI	31 Mei 2016	Kabupaten Garut	93	167	260
5	Perilaku Ramah Lingkungan Bagi Peserta Didik Tingkat SMP/MTS	31 Agustus 2016	Kota Cirebon	85	119	204
6	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Sekitar Hutan	06 s.d 08 September 2016 18 s.d 20 Oktober 2016	Kota Singkawang, Kalimantan Barat Kota Pekanbaru, Riau	28 30	3 0	31 30
TOTAL				375	531	906

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pendidik maupun peserta didik mengenai perilaku-perilaku ramah lingkungan dalam rangka mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui program pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi muda yang peduli



terhadap upaya pengelolaan, perlindungan, dan pembangunan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.

Selain pelatihan tersebut, juga diselenggarakan Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Sekitar Hutan. Melalui penyelenggaraan pelatihan ini, peserta dapat terlibat secara aktif dalam upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sehingga bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan dapat dihindari.

2. *Jumlah Pelatihan Kader Lingkungan Hidup Tahun 2016*

Pelatihan peningkatan kapasitas kader lingkungan hidup diselenggarakan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pelatihan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang telah diselenggarakan pada Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) pelatihan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.2. Jumlah Pelatihan Kader Lingkungan Hidup Tahun 2016

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Peserta (Org)	
				L	P
1	Pelatihan PPLH DAS Barito Bagian Tengah	25 - 26 Mei 2016	Banjarbaru	70	50
2	Pelatihan PPLH DAS Brantas Bagian Tengah	11 - 12 Mei 2016	Sidoarjo	50	71

Adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dapat dicegah salah satunya dengan pembentukan dan peningkatan kapasitas kader lingkungan hidup untuk masyarakat desa di daerah aliran sungai (DAS).

3. Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016

Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Tujuan program adiwiyata adalah mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Sedangkan maksudnya adalah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan program adiwiyata, terdapat empat komponen yang harus terpenuhi dan menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah adiwiyata. Empat komponen tersebut adalah :

- a) Kebijakan berwawasan lingkungan
- b) Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan
- c) Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif
- d) Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan

Penghargaan adiwiyata diberikan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Pada Tahun 2016, telah diberikan penghargaan adiwiyata nasional kepada 566 sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat menengah.

Tabel 6.3. Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
1	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	SMP	1 SMPN 1 Setia
		Kab. Aceh Tamiang	SMP	2 SMPN 4 Percontohan
		Kab. Pidie	SMP	3 SMPN Unggul Sigli
		Kab. Aceh Tengah	SMK	4 SMKN 1 Takengon
		Kota Banda Aceh	SMK	5 SMKN 1 Banda Aceh
2	Sumatera Utara	Kab. Asahan	SMP	1 SMPN 1 Aek Kuasan
			SMP	2 SMPN 2 Kisaran
			SMA	3 SMAN 3 Kisaran
		Kab. Dairi	SMK	4 SMKN 1 Sidikalang
		Kab. Deli Serdang	SD	5 SDN 101901 Lubuk Pakam
			SD	6 SDN 105325 Dalu X-A
			SD	7 SDN 107982 Lubuk Pakam

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
			SMP	SMPN 1 Percut Sei Tuan
			SMP	SMPN 2 Pancur Batu
			SMP	SMPN 4 Lubuk Pakam
			SMK	SMKN 1 Kutalimbaru
		Kab. Langkat	SD	MIN Perlis
			SD	MIN Perdamaian
			SMP	SMPN 1 Secanggang
		Kab. Tapanuli Tengah	SD	MIN Lubuk Tukko
			SMP	SMPN 2 Pandan Nauli
		Kab. Toba Samosir	SMP	SMPs Bonapasogit Sejahtera
			SMA	SMAN 1 Habinsaran
		Kota Medan	SD	SDN 067245
			SMA	SMAN 11
3	Sumatera Barat	Kab. Agam	SD	SDN 01 Pasar Tiku
			SMP	MTsN Matur
			SMP	MTsN Kamang
			SMA	SMAN 1 Tilatang Kamang
		Kab. Dharmasraya	SD	SDN 06 Pulau Punjung
		Kab. Pesisir Selatan	SMP	MTsN Salido
		Kab. Sijunjung	SD	SDN 13 Muaro
			SMP	SMPN 13 Sijunjung
		Kab. Solok	SMA	MAN Koto Baru
		Kota Bukittinggi	SD	SDN 04 Garegeh
			SD	SDN 08 Kubu Tanjung
			SD	SDN 12 Bukit Cangang
			SMA	MAN 1 Bukittinggi
		Kota Padang	SD	SDN 08 Surau Gadang
			SMP	SMPN 31 Padang
			SMA	SMAN 14 Padang
		Kota Pariaman	SD	SDN 08 Marunggi
		Kota Solok	SD	SDN 19 Kampung Jawa
4	Jambi	Kab. Bungo	SMP	SMPN 1 Pelepat Ilir
		Kab. Muaro Jambi	SMP	SMPN 6
		Kab. Sarolangun	SMA	SMAN 7 Sarolangun
		Kota Jambi	SD	SDN 60
			SMP	SMPN 7
			SMK	SMKN 4
5	Bengkulu	Kota Bengkulu	SMP	SMPN 11
6	Riau	Kab. Bengkalis	SD	SDN 51 Balai Makam Mandau
			SD	SDN 74 Balai Makam Mandau
			SMP	SMPN 1 Bantan
			SMP	SMPN 1 Bukit Batu

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
			SMA	SMAN 2 Bengkalis
		Kab. Indragiri Hilir	SD	SDN 032 Tembilahan
		Kab. Kampar	SMP	MTsN Lipat Kain
			SMP	Mts Nurul Falah Sibiruang
		Kab. Kuantan Singingi	SD	SDN 013 Pintu Gobang Kari
			SMA	SMAN 1 Kuantan Mudik
		Kab. Meranti	SMK	SMKN 1 Tebing Tinggi
		Kab. Pelalawan	SD	SDN 010 Pangkalan Kerinci
			SD	SD Global Andalan Pelalawan Estate
		Kab. Rokan Hilir	SMP	SMP Swasta Tunas Bangsa
		Kab. Siak	SD	SDN 04 Minas Jaya
			SD	SDN 15 Belutu
			SMP	SMPN 3 Tualang
		Kota Pekanbaru	SD	SDN 12
			SD	SDN 84
			SD	SDN 105
			SD	SDN 124
			SD	SDN 159
			SD	SDN 180
			SMP	SMPN 17 Pekanbaru
			SMP	SMPN 34 Pekanbaru
			SMA	SMAN 2 Pekanbaru
			SMA	SMAN 6 Pekanbaru
			SMA	SMAN 9 Pekanbaru
			SMA	SMA Cendana Pekanbaru
			SMK	SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru
7	Kepulauan Riau	Kab. Bintan	SD	SDN 017 Bintan Timur
			SMP	SMPN 1 Bintan
			SMP	SMPN 3 Bintan
			SMA	SMAN 3 Bintan
		Kota Tanjungpinang	SD	SDN 004 Tanjungpinang Timur
8	Kepulauan Bangka	Kab. Belitung	SMP	SMPN 2 Badau
	Belitung	Kota Pangkal Pinang	SD	SDN 12
			SMA	SMAN 2
9	Sumatera Selatan	Kab. Ogan	SD	SD Fransiskus Baturaja
		Komering Ulu	SD	SDN 23
		Kota Palembang	SD	SDN 30
			SD	SDN 89
			SD	SDN 99
			SD	SDN 101
			SD	SDN 114
			SD	SDN 133

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
			SD	SDIT Al-Furqon
			SMP	SMPN 14
			SMP	SMPN 27
			SMP	SMPN 29
			SMP	SMPN 39
			SMP	SMPN 46
			SMK	SMKN 3
10	Lampung	Kab. Lampung Barat	SD	SDN 1 Way Mengaku
		Kab. Lampung Utara	SMP	SMPN 7 Kotabumi
		Kota Metro	SD	SDN 1 Metro Timur
			SD	SDN 2 Metro Pusat
			SD	SDN 7 Metro Timur
11	Banten	Kab. Lebak	SMP	SMPN 5 Rangkasbitung
			SMA	SMAN 1 Rangkasbitung
			SMA	SMAN 3 Rangkasbitung
		Kab. Tangerang	SMP	MTsN 5
			SMP	SMPN 1 Kelapa Dua
		Kota Cilegon	SD	SDi Al-Azhar 40 Ypks
			SMP	SMPN 2
			SMP	SMPN 7
		Kota Serang	SMA	SMAN 4
		Kota Tangerang	SD	SDN Tanah Tinggi 2
			SMP	SMPN 1
			SMP	SMPN 19
		Kota	SD	SDN Pondok Kacang Barat 3
		Tangerang Selatan	SD	SD Islam Amalina
			SMA	SMA Insan Cendekia Madani
12	DKI Jakarta	Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	SMP	SMPN 285
		Kota Jakarta Pusat	SMP	SMPN 137
		Kota Jakarta Barat	SMP	SMPN 220
			SMP	SMPN 249
			SMA	SMAN 23
		Kota Jakarta Selatan	SD	SDN 08 Rawajati
			SMP	SMPN 85
		Kota Jakarta Timur	SD	SDN Ciracas 06 Pagi
			SMA	SMAN 42
		Kota Jakarta Utara	SMA	SMAN 110
13	Jawa Barat	Kab. Bandung	SMP	SMP Telkom Bandung
		Kab. Bogor	SD	SD Sekolah Alam Cikeas
			SMP	SMP Sekolah Alam Cikeas
			SMA	SMAN 1 Megamendung
			SMP	SMPit Fajar Hidayah
		Kab. Ciamis	SMP	SMPN 1 Panawangan

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
		Kab. Kuningan	SMP	SMPN 1 Sindangagung
		Kota Bandung	SD	SDN Gentra Masekdas
			SMA	SMAN 5
			SMA	SMAN 23
		Kota Bogor	SD	SDN Menteng
			SMP	SMPN 5 Bogor
			SMA	SMAN 7 Bogor
		Kota Sukabumi	SMP	SMPN 16
		Kota Tasikmalaya	SD	SDN Bantargedang
14	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	SMP	SMPN 2 Banjarnegara
		Kab. Banyumas	SMP	SMPN 1 Rawalo
			SMP	SMPN 1 Pekuncen
			SMP	SMPN 1 Baturaden
			SMA	SMAN 1 Sokaraja
		Kab. Cilacap	SMP	SMPN 3 Cilacap
			SMP	SMPN 5 Cilacap
			SMA	SMAN 1 Cilacap
		Kab. Demak	SD	SDN Batursari 6 Mranggen
			SMP	SMPN 1 Karangtengah
			SMP	SMPN 2 Demak
			SMA	SMAN 1 Dempet
			SMA	SMAN 2 Mranggen
		Kab. Jepara	SMA	SMAN 1 Bangsri
		Kab. Karanganyar	SD	SDN 2 Ngemplak
			SMP	SMPN 2 Colomadu
			SMP	SMPN 3 Tasikmadu
		Kab. Klaten	SMP	SMPN 1 Jogonalan
			SMA	SMAN 1 Klaten
			SMA	SMAN 1 Prambanan
		Kab. Kudus	SMP	SMPN 1 Bae
		Kab. Pati	SD	SDN Dengkek 01
			SMP	SMPN 4 Pati
		Kab. Pekalongan	SMA	SMAN 1 Kajen
			SMA	SMAN 1 Bojong
		Kab. Purbalingga	SD	SDN 1 Purbalingga Wetan
			SMP	SMPN 1 Purbalingga
		Kab. Purworejo	SMP	SMPN 2 Purworejo
		Kab. Rembang	SMP	SMPN 3 Lasem
		Kab. Sragen	SD	SDN 12 Sragen
			SMP	SMPN 1 Sragen
			SMP	SMPN 2 Sidoharjo
			SMA	SMAN 1 Gondang Sragen
			SMA	SMAN 3 Sragen

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
			SMK	35 SMKN 1 Sragen
		Kab. Tegal	SD	36 SDN Kabunan 01
			SMP	37 SMPN 2 Balapulang
		Kab. Temanggung	SD	38 SDN 2 Kedungumpul
			SD	39 SDN 2 Temanggung Ii
			SMP	40 SMPN 1 Jumo
			SMP	41 SMPN 1 Kranggan
			SMP	42 SMPN 1 Tlogomulyo
			SMP	43 SMPN 2 Kledung
			SMA	44 SMAN 1 Pringsurat
			SMA	45 SMAN 3 Temanggung
			SMK	46 SMKN 2 Temanggung
		Kab. Wonogiri	SMP	47 SMPN 2 Jatiroto
		Kota Magelang	SD	48 SDN Kramat 1 Magelang Utara
			SMA	49 SMAN 5 Magelang
		Kota Salatiga	SD	50 SDN 06 Salatiga
			SMA	51 SMAN 2 Salatiga
		Kota Surakarta	SMK	52 SMKN 2 Surakarta
			SMK	53 SMKN 4 Surakarta
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kab. Bantul	SD	1 SD Ngrukeman
			SMP	2 SMPN 3 Banguntapan
			SMA	3 SMAN 2 Bantul
		Kab. Kulon Progo	SD	4 SDN Temon
		Kab. Sleman	SMP	5 SMPN 3 Godean
		Kota Yogyakarta	SD	6 SDN Serayu
			SMA	7 SMAN 1 Yogyakarta
			SMA	8 SMAN 6 Yogyakarta
16	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	SD	1 SDN Gebang 1
		Kab. Banyuwangi	SD	2 SDk Santa Maria
			SMP	3 SMPN 1 Glenmore
			SMK	4 SMKN 1 Glagah
		Kab. Blitar	SMP	5 SMPN 1 Kanigoro
			SMA	6 SMAN 1 Talun
			SMA	7 Man Tlogo
		Kab. Bojonegoro	SD	8 SDN Dander Iv
			SMP	9 SMPN 1
			SMA	10 SMAN 1 Baureno
			SMA	11 SMAN 3
		Kab. Bondowoso	SD	12 SDk Indra Siswa
		Kab. Gresik	SD	13 SDN 1 Sidokumpul
			SD	14 SDN 2 Sidokumpul
			SD	15 SDN 3 Sidokumpul
			SD	16 SDN 1 Cerme Kidul

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
			SD	17 SDN Sukorame
			SD	18 SDN Kedanyang
			SMP	19 SMPN 1 Menganti
			SMP	20 SMPN 2 Cerme
		Kab. Jombang	SMP	21 SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng
			SMA	22 SMAN Mojoagung
			SMA	23 Man Denanyar
		Kab. Kediri	SMP	24 SMPN 1 Mojo
			SMP	25 SMPN 1 Pagu
		Kab. Lamongan	SMA	26 Man Lamongan
		Kab. Lumajang	SMP	27 SMPN 1 Sumbersuko
			SMP	28 SMPN 3
		Kab. Madiun	SD	29 Min Bancong
			SMP	30 SMPN 2 Saradan
			SMK	31 SMKN 2 Jiwan
		Kab. Magetan	SMP	32 SMPN 4 Magetan
			SMA	33 SMAN 1 Kawedanan
			SMA	34 SMAN 1 Maospati
		Kab. Malang	SMP	35 SMPN 1 Wajak
			SMP	36 SMPN 1 Sumberpucung
			SMP	37 SMPN 2 Kepanjen
			SMA	38 SMAN 1 Kepanjen
			SMK	39 SMKN 1 Singosari
		Kab. Mojokerto	SD	40 SDN Kutogirang
			SMP	41 SMPN 1 Gondang
			SMP	42 SMPN 1 Sooko
		Kab. Nganjuk	SMP	43 SMAN 2 Nganjuk
			SMA	44 Man Nglawak Kertosono
		Kab. Ngawi	SMP	45 SMPN 2 Ngawi
		Kab. Pacitan	SMP	46 SMPN 1 Arjosari
			SMP	47 SMPN 2 Kebonagung
		Kab. Pamekasan	SMP	48 SMPN 1 Pademawu
		Kab. Pasuruan	SMP	49 SMPN 1 Grati
			SMP	50 SMPN 1 Pohjentrek
			SMP	51 SMPN 2 Bangil
		Kab. Ponorogo	SMP	52 SMPN 1 Kauman
			SMA	53 SMAN 1 Babadan
			SMK	54 SMKN 2 Ponorogo
		Kab. Probolinggo	SMP	55 SMPN 1 Paiton
			SMP	56 SMPN 1 Tongas
			SMP	57 MTsN Karanganyar Paiton
		Kab. Sidoarjo	SMP	58 SMPN 3 Candi
			SMP	59 SMP Al Muslim

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
			SMA	60 SMA Hang Tuah 2
		Kab. Situbondo	SMP	61 SMPN 3
			SMA	62 SMAN 1 Asembagus
		Kab. Sumenep	SMP	63 SMPN 1 Ambunten
		Kab. Tuban	SD	64 SDN Latsari Tuban
			SD	65 SDN Kebonsari 2
			SD	66 SDN Tegalbang 01 Palang
			SD	67 SD Bina Anak Sholeh
			SMP	68 SMPN 3
			SMP	69 SMPN 4
			SMP	70 SMPN 7
			SMA	71 Man Rengel
			SMK	72 SMKN 2 Tuban
		Kab. Tulungagung	SMP	73 Mts Miftahul Huda
		Kota Batu	SD	74 SDN Tulungrejo 01
			SD	75 SDN Punten 01
		Kota Blitar	SD	76 SDN Sananwetan 2
		Kota Madiun	SD	77 SDN Sogaten
			SD	78 SDN 02 Klegen
			SD	79 SDN 03 Klegen
			SD	80 Min Demangan
			SMP	81 SMPN 1
			SMP	82 SMPN 4
			SMP	83 SMPN 6
			SMP	84 SMPN 14
		Kota Malang	SD	85 SDN Kauman 1
			SD	86 SDN Percobaan 1
			SD	87 SDN Rampal Celaket 2
			SMP	88 SMPN 7
			SMP	89 SMPN 9
			SMP	90 SMPN 16
			SMP	91 SMPN 18
			SMP	92 SMPN 22
			SMK	93 SMKN 4
			SMK	94 SMKN 12
		Kota Pasuruan	SD	95 SDN Karangketug 2
			SD	96 SDN Purutrejo 2
			SD	97 SDN Tapaan 2
			SD	98 SDN Sekargadung
			SMP	99 SMPN 1
		Kota Probolinggo	SD	100 SDN Tisnonesaran 2
		Kota Surabaya	SD	101 SDN Kaliasin 1
			SD	102 SDN Tenggilis Mejoyo 1

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
			SD	103 SD Darul Ulum
			SMP	104 SMPN 9
			SMA	105 SMAN 12
			SMK	106 SMKN 5
			SMK	107 SMKN 10
17	Bali	Kab. Badung	SMA	1 SMAN 1 Petang
		Kab. Buleleng	SMA	2 SMAN 2 Singaraja
		Kab. Gianyar	SMA	3 SMAN 1 Gianyar
		Kab. Jembrana	SMP	4 SMPN 1 Negara
		Kab. Karangasem	SD	5 SDN 1 Tiongah
			SD	6 SDN 3 Duda Timur
			SMP	7 SMPN 2 Selat
			SMA	8 SMA Pgri 1 Amlapura
		Kab. Tabanan	SD	9 SDN 1 Batunya
			SMP	10 SMPN 4 Tabanan
		Kota Denpasar	SD	11 SDN 5 Tonja
			SD	12 SDN 10 Sumerta
			SMP	13 SMPN 8
18	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	SMA	1 SMA Katolik Frateran Maumere
19	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	SMP	1 SMPN 5
		Kab. Mempawah	SMP	2 MTsN Mempawah Hilir
		Kota Pontianak	SD	3 SDN 27 Pontianak Timur
			SD	4 SDN 34 Pontianak Kota
20	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	SMA	1 SMAN 1 Kurun
			SMA	2 SMA Katolik St. Arnoldus Janssen Kuala Kurun
		Kab. Kotawaringin Timur	SD	3 SDN 4 Mentawa Baru Hilir
			SD	4 SDi Baiturrahim Sampit
			SD	5 SDIT Arafah Sampit
			SMP	6 SMPN 1 Mentaya Hilir Selatan
		Kab. Lamandau	SD	7 SDN Nanga Bulik 6
		Kab.	SD	8 SDN Tahai Jaya I
		Pulang Pisau	SMA	9 SMAN 1 Kahayan Tengah
			SMA	10 SMAN 1 Kahayan Hilir
			SMA	11 SMAN 1 Pandih Batu
			SMK	12 SMKN 1 Kahayan Hilir
		Kab. Seruyan	SD	13 SDN 1 Kuala Pembuang I
21	Kalimantan Timur	Kab. Berau	SMP	1 SMPN 2 Berau
		Kab. Kutai Kartanegara	SD	2 SDN 028 Tenggarong
			SMK	3 SMKN 1 Tenggarong
		Kab.	SD	4 SDN 001 Sangatta Utara
		Kutai Timur	SD	5 SDN 001 Sangatta Selatan
			SD	6 SDN 009 Sangatta Utara

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
			SD	7 SDN 007 Sangkulirang
		Kab. Paser	SMP	8 SMPN 2 Tanah Grogot
			SMA	9 SMAN 1 Tanah Grogot
		Kab. Penajam Paser Utara	SD	10 SDN 005 Waru
			SD	11 SDN 013 Penajam
			SMA	12 SMAN 1
		Kota Balikpapan	SD	13 SDN 001 Balikpapan Timur
			SD	14 SDN 002 Balikpapan Selatan
			SD	15 SDN 004 Balikpapan Utara
			SD	16 SDN 005 Balikpapan Kota
			SD	17 SDN 006 Balikpapan Selatan
			SD	18 SDN 006 Balikpapan Timur
			SD	19 SDN 010 Balikpapan Selatan
			SD	20 SDN 011 Balikpapan Timur
			SMP	21 SMPN 2
			SMP	22 SMPN 5
			SMP	23 SMPN 7
			SMP	24 SMPN 10
			SMP	25 SMPN 22
			SMA	26 SMAN 7
		Kota Bontang	SD	27 SDN 004 Bontang Barat
			SD	28 SD 2 Ypk Bontang Barat
			SMP	29 SMPN 3 Bontang
22	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	SD	1 SDN Sungai Paring 1
			SD	2 SD Mitra Kasih
			SMP	3 SMPN 1 Astambul
			SMP	4 SMPN 1 Kertak Hanyar
			SMP	5 SMPN 3 Martapura
			SMP	6 SMP Darul Hijrah Putera
			SMP	7 Mts Hidayatullah
		Kab. Barito Kuala	SD	8 SDN Handil Bakti
		Kab. Hulu Sungai Selatan	SMP	9 SMPN 3 Kandangan
		Kab. Kotabaru	SD	10 SDN Stagen 1
		Kab. Tabalong	SMP	11 SMPN 4 Murung Pudak
		Kab. Tanah Bumbu	SMA	12 SMAN 1 Sungai Loban
		Kab. Tapin	SMA	13 SMAN 1 Rantau
			SMA	14 Man 1 Rantau
		Kota Banjarbaru	SD	15 SDN 1 Mentaos
			SD	16 SDN 1 Guntung Payung
			SD	17 SDN 1 Landasan Ulin Timur
			SD	18 SDN 1 Palam
			SD	19 SDN 2 Komet
			SD	20 SDN 3 Komet

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
			SD	21 SDN 4 Komet
			SD	22 SDN 4 Sungai Besar
			SD	23 SDN 4 Loktabat Utara
			SD	24 SDIT Robbani
			SMA	25 SMAN 2
		Kota Banjarmasin	SD	26 SDN Antasan Besar 7
			SMP	27 SMPN 29
			SMA	28 Man 3
23	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	SD	1 SDN 001 Tanjung Selor
			SMA	2 SMAN 1 Tanjung Selor
		Kab. Nunukan	SD	3 SDN 003 Sebatik Timur
			SMP	4 SMPN 1 Lumbis
			SMP	5 SMPN 2 Nunukan
		Kota Tarakan	SD	6 SDN 013
			SD	7 SDs Yaditra
			SMP	8 SMPN 7
24	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	SMP	1 SMPN 6 Ranoyapo
		Kota Kotamobagu	SD	2 SDN 2 Kotamobagu
25	Gorontalo	Kab. Boalemo	SMA	1 SMAN 1 Paguyaman
		Kab. Bone Bolango	SD	2 SDN 10 Kabilia Bone
			SD	3 Mis Nurul Bahri
		Kab. Gorontalo	SMP	4 MTsN Batudaa
			SMA	5 SMAN 1 Boliyohuto
		Kab. Gorontalo Utara	SD	6 SDN 1 Anggrek
			SD	7 Min Sumalata Timur
			SMP	8 SMPN 2 Kwandang
		Kota Gorontalo	SD	9 SDN 30 Kota Selatan
			SD	10 SDN 34 Kota Selatan
			SMP	11 SMPN 2
			SMA	12 SMAN 2
			SMK	13 SMKN 2
26	Sulawesi Tengah	Kota Palu	SD	1 SDN 24 Palu
27	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	SD	1 Min I Kolaka Utara
		Kota Kendari	SD	2 SDN 02 Mandonga
			SD	3 SDN 3 Baruga
			SD	4 SDN 20 Kendari Barat
			SD	5 SDN 21 Kendari Barat
			SMP	6 SMPN 9 Kendari
			SMA	7 SMAN 1 Kendari
28	Sulawesi Barat	Kab. Majene	SMK	1 SMKN 3 Majene
		Kab. Polewali Mandar	SMP	2 SMPN 3 Polewali
			SMP	3 SMPN 4 Polewali
			SMA	4 SMAN 1 Polewali

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
			SMA	SMAN 3 Polewali
			SMA	Man Polman
29	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	SD	SDN 2 Lembang Cina
		Kab. Bone	SD	SD Inpres 6/75 Manurunge Tanete Riattang
			SD	SD Inpres 6/75 Pacing Awangpone
			SD	SD Inpres 6/86 Biru Tanete Riattang
			SD	SDN 132 Galung Ulaweng
			SMP	SMPN 2 Tellu Siattinge
			SMP	SMPN 3 Ulaweng
		Kab. Bulukumba	SD	SDN 37 Palambarae
			SD	SDN 221 Tanah Kongkong
			SMP	SMPN 4 Bulukumba
			SMP	SMPN 15 Bulukumba
			SMP	SMPN 35 Bulukumba
			SMP	MTsN Gantarang Kindang
			SMP	Mts Swasta Badan Amal
		Kab. Enrekang	SD	SDN 1 Enrekang
			SD	SDN 15 Kotu
			SD	SDN 20 Baraka
			SD	SDN 26 Massemba
			SD	SDN 37 Tungka
			SD	SDN 45 Talaga
			SD	SDN 117 Enrekang
			SMP	SMPN 2 Enrekang
			SMP	SMPN 5 Enrekang
			SMA	SMAN 1 Enrekang
			SMA	Man Baraka
		Kab. Jeneponto	SMP	MTsN Binamu
		Kab. Pangkajene Kepulauan	SMP	SMP Swasta Semen Tonasa I
			SMP	SMP Swasta Semen Tonasa II
			SMA	SMA Swasta Semen Tonasa
		Kab. Pinrang	SMP	SMPN 1 Mattirobulu
			SMP	SMPN 2 Pinrang
			SMP	SMPN 3 Pinrang
			SMA	SMAN 1 Pinrang
			SMA	SMAN 3 Pinrang
			SMA	SMAN 5 Pinrang
			SMA	SMAN 11 Unggulan Pinrang
		Kab. Sidenreng Rappang	SMP	SMPN 2 Watang Pulu
			SMK	SMKN 1 Sidenreng
		Kab. Tana Toraja	SMA	SMAN 1 Saluputti

No.	Provinsi	Kab. / Kota	Tingkat	Nama Sekolah
1	2	3	4	5
			SMK	40 SMKN 1 Makale
		Kab. Wajo	SMP	41 SMPN 4 Sengkang
		Kota Makassar	SD	42 SD Inspres Tamalanrea 4
30	Maluku	Kota Ambon	SD	1 SD Inspres Latta
			SMA	2 SMAN 10
31	Papua	Kab.	SMP	1 SMPN 2 Biak Kota
		Biak Numfor	SMA	2 SMAN 2 Biak Kota
		Kab. Sarmi	SMP	3 SMPN 1 Sarmi
		Kota Jayapura	SMP	4 SMPN 11 Jayapura



4. Daftar Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2016

Adiwiyata mandiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang telah menjadi sekolah adiwiyata nasional dan telah mempunyai 10 sekolah binaan yang memenuhi kriteria sebagai adiwiyata tingkat kabupaten/kota.

Adiwiyata mandiri telah diberikan kepada 140 sekolah SD/MI, SMP/MTsN, SMA/MA, dan SMK pada Tahun 2016, di seluruh Indonesia.

Tabel 6.4. Daftar Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2016

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tingkat	Sekolah	
1	2	3	4	5	
1.	Bali	Kab. Gianyar	SMP	1. SMPN 2 Gianyar	
		Kab. Karangasem	SD	2. SDN 1 Duda Utara	
			SMA	3. SMAN 1 Selat	
			SMA	4. SMAN 1 Sidemen	
2.	Kepulauan Bangka	Kota Denpasar	SD	5. SDN 17 Pemecutan	
		Kota Pangkalpinang	SMP	6. SMPN 2	
	Belitung				
	3. Banten	Kab. Lebak	SMP	7. SMPN 1 Rangkasbitung	
3.		Kota Tangerang	SD	8. SDIT Al Ikhlas Cipondoh	
			SD	9. SDN Tanah Tinggi 1	
			SD	10. SDN Tanah Tinggi 3	
4.	Bengkulu		SMA	11. SMAN 4	
		Kota Tangerang Selatan	SMP	12. SMPN 3	
	5. D.I Yogyakarta	Kota Bengkulu	SMA	13. SMAN 4	
			SMA	14. SMAN 5	
6.	DKI Jakarta	Kab. Bantul	SMP	15. SMPN 1 Pandak	
	6. DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	SMP	16. SMPN 228	
6.		Kota Jakarta Selatan	SD	17. SD Tarakanita 3	
			SMA	18. SMAN 34	
		Kota Jakarta Timur	SD	19. SDN Cibubur 11 Pagi	
		Kota Jakarta Utara	SMA	20. SMAN 80	
7.	Gorontalo	Kab. Pohuwato	SMP	21. SMPN 1 Marisa	
8.	Jambi	Kota Jambi	SMP	22. SMPN 4	
9.	Jawa Barat	Kab. Bogor	SMP	23. SMPN 1 Ciomas	
		Kab. Garut	SMA	24. SMAN 1 Garut	
	9. Jawa Barat	Kota Bandung	SMP	25. SMPN 2 Bandung	
			SMP	26. SMPN 21 Bandung	
			SMA	27. SMAN 19 Bandung	
9.	Jawa Barat		SMA	28. SMAN 14 Bandung	
		Kota Sukabumi	SD	29. SDN Suryakencana Cbm	

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tingkat	Sekolah
1	2	3	4	5
10. Jawa Tengah		Kab. Indramayu	SMA	30. SMAN 1 Sindang
		Kab. Boyolali	SMA	31. SMAN 3 Boyolali
		Kab. Demak	SMA	32. SMAN 1 Demak
		Kab. Karanganyar	SD	33. SDN 03 Jaten
			SMP	34. SMPN 1 Karanganyar
		Kab. Tegal	SMK	35. SMKN 1 Adiwerna
11. Jawa Timur		Kab. Banyuwangi	SD	36. SDN Model
			SMA	37. SMAN 1
		Kab. Bojonegoro	SMP	38. SMPN 4
		Kab. Bondowoso	SMP	39. SMPN 7
		Kab. Gresik	SMP	40. SMP Semen Gresik
			SMP	41. SMPN 1 Manyar
			SMP	42. SMPN 1 Sidayu
			SMA	43. SMAN 1 Cerme
		Kab. Jombang	SD	44. Min Pucangsimo
		Kab. Lamongan	SMA	45. SMAN 1 Mantup
			SMA	46. SMAN 3
		Kab. Nganjuk	SMA	47. SMAN 1 Tanjunganom
		Kab. Pasuruan	SMP	48. SMPN 2 Pandaan
		Kab. Tuban	SD	49. SDN Kebonsari 1
			SMP	50. SMPN 1
			SMA	51. SMAN 3
			SMK	52. SMKN 1
		Kota Madiun	SD	53. SDN Patihan
			SMP	54. SMPN 11
			SMP	55. SMPN 13
			SMA	56. SMAN 4
		Kab. Banjar	SD	57. SDN Indrasari 2 Martapura
			SD	58. SDN Jawa 2 Martapura
		Kota Banjarbaru	SD	59. SDN Idaman
12. Kalimantan Selatan		Kab. Kotawaringin Timur	SMA	60. SMAN 1 Sampit
			SMK	61. SMKN 1 Sampit
			SMK	62. SMKN 2 Sampit
		Kota Palangka Raya	SD	63. SDN Percobaan Palangka Raya
			SD	64. SDN 020 Tanah Grogot
			SMP	65. SMPN 1 Batu Sopang
13. Kalimantan Tengah			SMK	66. SMKN 1 Tanah Grogot
		Kota Balikpapan	SD	67. SDN 013 Balikpapan Selatan
		Kota Bontang	SD	68. SD 1 Ypk Bontang
			SMP	69. SMPN 5 Bontang
		Kab. Paser	SD	70. SDN 002 Nunukan
			SMP	71. SMPN 1 Nunukan

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tingkat	Sekolah
1	2	3	4	5
16.	Papua	Kota Jayapura	SD	72. SDN Inpres Kotaraja
			SMP	73. SMPN 1 Jayapura
17	Riau	Kab. Bengkalis	SD	74. SDN 01 Bengkalis
		Kota Pekanbaru	SD	75. SDN 148 Pekanbaru
			SMA	76. SMAN 1 Pekanbaru
		Kab. Siak	SMP	77. SMPN 6 Kandis
18	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	SMP	78. SMPN 1 Enrekang
		Kab. Pinrang	SD	79. SDN 161 Pinrang
			SMK	80. SMKN 3 Pinrang
		Kota Parepare	SD	81. SDN 29 Parepare
			SMP	82. SMPN 2 Parepare
		Kab. Pangkajene Dan Kepulauan	SD	83. SD Semen Tonasa Ii
			SMP	84. MTsN Ma'rang
			SMA	85. SMAN 2 Pangkajene
		Kab. Bulukumba	SMP	86. SMPN 6 Bulukumba
19.	Sulawesi Tengah	Kota Palu	SMA	87. SMAN 3 Palu
20.	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	SD	88. SDN 5 Mandonga
			SMP	89. SMPN 1 Kendari
21.	Sumatera Barat	Kab. Agam	SD	90. SDN 21 Taluak Iv Suku
		Kab. Padang Pariaman	SD	91. SDN 14 Nan Sabaris
		Kota Padang	SD	92. SDN 03 Alai
			SD	93. SD Semen Padang 1 Dan 2
			SMP	94. MTsN Parak Lawas
			SMP	95. SMPN 11 Padang
			SMP	96. MTsN Koto Tangah
			SMK	97. SMK Semen Padang
		Kota Sawahlunto	SD	98. SDN 13 Pasar Remaja
22.	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	SMA	99. SMAN 1 Lubuklinggau
23.	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	SD	100. SDN 101912 Pagar Merbau
			SD	101. SDN 104242 Lubuk Pakam
			SMP	102. SMPN 3 Lubuk Pakam
			SMP	103. SMPN 4 Sunggal
			SMA	104. SMAN 1 Galang
			SMA	105. SMAN 2 Lubuk Pakam
		Kab. Langkat	SD	106. MIN Bukit Jengkol Pangkalan Susu
		Kota Pematang Siantar	SMA	107. SMAN 6 Pematang Siantar
		Kota Tebing Tinggi	SMA	108. SMAN 4 Tebing Tinggi
			SMK	109. SMKN 4 Tebing Tinggi
		Kab. Tapanuli Tengah	SMA	110. SMAN 1 Matauli Pandan
		Kota Tanjungbalai	SD	111. SDN 130001 Tanjungbalai

5. Pelatihan Pengenalan Saka Kalpataru Tahun 2016

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu peran serta aktif masyarakat, terutama kelompok generasi muda yang berperilaku ramah lingkungan. Gerakan Pramuka yang bersifat dinamis merupakan mitra muda yang strategis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembentukan Saka Kalpataru bertujuan untuk memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan khususnya yang berkaitan dengan substansi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menjadi bekal penghidupannya untuk mengabdi pada masyarakat, bangsa dan negara.

Satuan Karya (Saka) Kalpataru adalah saka lingkungan yang merupakan satuan karya pramuka tempat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan kecakapan, dan kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pendega serta sebagai wadah untuk menanamkan kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam mengelola, menjaga dan mempertahankan serta melestarikan lingkungan untuk keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang.

Tabel 6.5. Jumlah Pelatihan Pengenalan Saka Kalpataru Tahun 2016

NO	LOKASI	KOTA / KABUPATEN	TGL, BULAN, TAHUN	PESERTA		
				PUTRA	PUTRI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	JOGJAKARTA	Kabupaten Sleman	25 SD 27 MARET 2016	45	50	483
		Kabupaten Gunung Kidul		50	50	
		Kabupaten Kulon Progo		45	52	
		Kabupaten Bantul		50	53	
		Kota Jogjakarta		44	44	
				234	249	
2	PALEMBANG	Kabupaten Banyuasin	18 SD 20 APRIL 2016	75	92	373
		Kabupaten Lahat		9	9	
		Kabupaten Muara Enim		9	9	
		Kabupaten Musi Rawas Utara		9	9	
		Kabupaten Penukai Abab Lematang Ilir		9	9	
		Kota Prabumulih		9	9	
		Kota Palembang		61	55	
				181	192	

NO	LOKASI	KOTA / KABUPATEN	TGL, BULAN, TAHUN	PESERTA		
				PUTRA	PUTRI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	LAMPUNG	Kabupaten Tanggamus	03 SD 05 JUNI 2016	39	39	468
		Kabupaten Pringsewu		32	36	
		Kabupaten Pesawaran		34	29	
		Kabupaten Lampung Selatan		39	41	
		Kota Bandar Lampung		89	90	
				233	235	
4	MAJALENGKA	Kabupaten Majalengka	28 SD 30 JULI 2016	21	38	235
		Kabupaten Indramayu		14	12	
		Kabupaten Cirebon		9	5	
		Kabupaten Sumedang		15	14	
		SMK Kehutanan Negeri		86	21	
				145	90	
5	MAKASSAR	Kabupaten Gowa	04 SD 06 AGUSTUS 2016	38	22	291
		Kabupaten Wajo		9	9	
		Kabupaten Barru		10	10	
		Kabupaten Toraja Utara		11	11	
		Kabupaten Bone		10	10	
		Kabupaten Luwu Timur		10	11	
		Kabupaten Maros		11	10	
		Kabupaten Jeneponto		11	10	
		Kabupaten Bulu Kumba		11	10	
		Kabupaten Kepulauan Selayar		5	4	
		Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		10	10	
		Kabupaten Sidenreng Rappang		10	9	
		Kota Makassar		10	9	
				156	135	
6	MAJALENGKA	Kabupaten Kuningan	23 SD 25 SEPTEMBER 2016	10	25	200
		Kabupaten Subang		22	18	
		Kabupaten Ciamis		20	20	
		Kota Cirebon		23	22	
		SMK Kehutanan Negeri		35	5	
				110	90	
		JUMLAH		2.118	1.982	2.050

BAB VII.

DUKUNGAN MANAJEMEN

DAN PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS LAINNYA



Mengacu tugas dan fungsi unit kerja Badan P2SDM sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015, pelaksanaan administrasi dan tugas teknis lainnya diselenggarakan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kebijakan pembangunan SDM lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2015 – 2019 dirumuskan melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP), dan untuk dapat menyelesaikan program tersebut diperlukan sumber daya manusia aparatur penyelenggara pemerintahan, dukungan anggaran, sarana prasarana dan peraturan perundang-undangan.

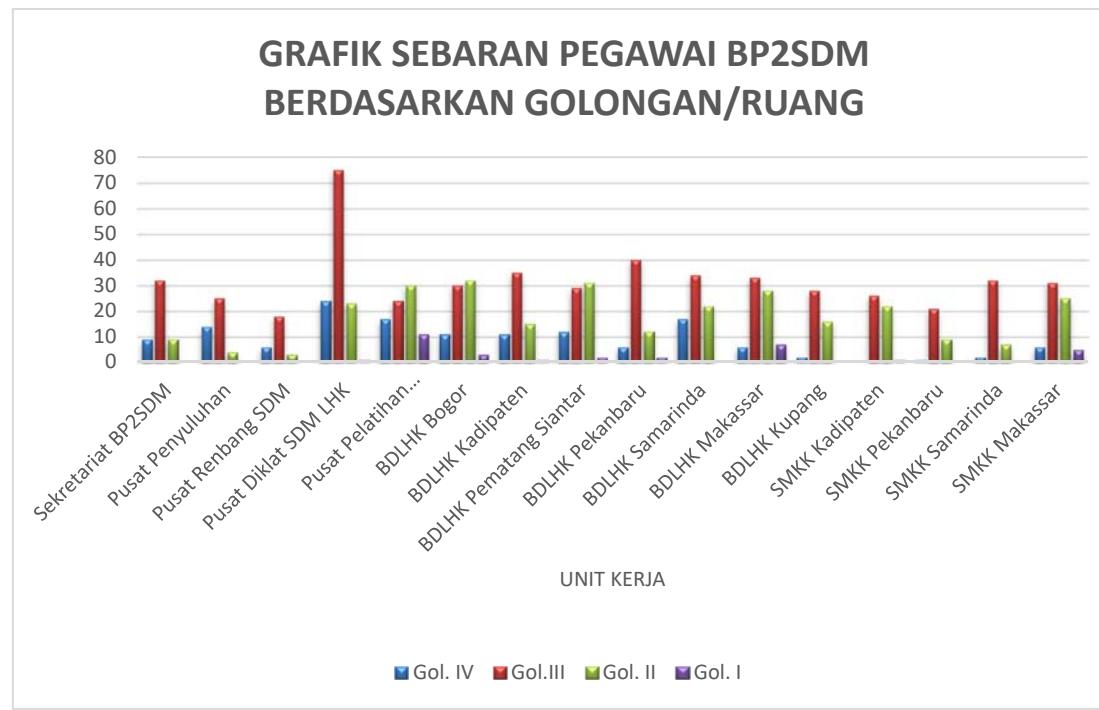
Pada Tahun 2016, Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Badan P2SDM berjumlah 1.056 orang. Pagu anggaran APBN-P Badan P2SDM Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 348.061.545.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 332.037.996.961,- atau sebesar 95,40%.

Sinergitas antara beberapa komponen lingkup Badan P2SDM meliputi Kesekretariatan, Perencanaan dan Pengembangan SDM, Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, akan mampu menjamin ketersediaan SDM yang cukup dengan kualitas yang memadai sesuai dinamika pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada Buku Statistik BP2SDM Tahun 2016 ini, data yang ditampilkan terkait dengan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya adalah Jumlah PNS Badan P2SDM Berdasarkan Golongan/Ruang, Jumlah PNS Badan P2SDM Berdasarkan Tingkat pendidikan, Jumlah PNS Badan P2SDM Berdasarkan jenis jabatan, Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA Lingkup Badan P2SDM, Kerjasama Lingkup BP2SDM, Daftar BMN Lingkup Badan P2SDM, Peraturan Perundang-undangan Lingkup Badan P2SDM.

Tabel 7.1. Jumlah PNS lingkup Badan P2SDM menurut golongan/ruang Tahun 2016

No.	Unit Kerja	Golongan/Ruang				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat BP2SDM	9	43	11	-	64
2	Pusat Penyuluhan	15	29	4	-	48
3	Pusat Renbang SDM	7	23	3	-	33
4	Pusat Diklat SDM LHK	35	77	25	0	137
5	Pusat Pelatihan Masyarakat PGL	6	26	3	1	36
6	BDLHK Bogor	17	27	28	8	80
7	BDLHK Kadipaten	11	33	30	2	76
8	BDLHK Pematang Siantar	11	33	15	1	60
9	BDLHK Pekanbaru	13	31	28	2	74
10	BDLHK Samarinda	8	41	12	2	63
11	BDLHK Makassar	17	38	17	-	72
12	BDLHK Kupang	8	39	20	7	74
13	SMKK Kadipaten	4	28	14	-	46
14	SMKK Pekanbaru	1	32	22	1	56
15	SMKK Samarinda	0	26	8	-	34
16	SMKK Makassar	4	35	4	-	43
17	SMKK Manokwari	4	32	20	4	60
Jumlah Tahun 2016		171	593	264	28	1,056
Jumlah Tahun 2015		160	606	286	30	1,082



Tabel 7.2. Jumlah PNS lingkup Badan P2SDM menurut Tingkat Pendidikan

No.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
		S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Sekretariat BP2SDM	-	15	31	9	9	-	-	-	64
2	Pusat Penyuluhan	1	16	24	2	4	-	1		48
3	Pusat Renbang SDM	2	8	17	5	1	-	-		33
4	Pusat Diklat SDM LHK	10	30	27	16	45	4	5		137
5	Pusat Pelatihan Masyarakat PGL	-	3	27	2	3	2	-		37
6	BDLHK Bogor	2	13	15	6	38	8	3		85
7	BDLHK Kadipaten	2	6	18	5	35	4	2		72
8	BDLHK Pematang Siantar	1	10	18	4	24	2	1		60
9	BDLHK Pekanbaru	2	13	10	3	42	1	3		74
10	BDLHK Samarinda	1	12	24	2	19	1	3		62
11	BDLHK Makassar	4	16	23	2	20	2	5		72
12	BDLHK Kupang	-	13	21	6	29	6	1		76
13	SMKK Kadipaten	-	5	19	2	15	3	0		44
14	SMKK Pekanbaru	-	2	21	1	30	-	1		55
15	SMKK Samarinda	-	2	19	3	9	1	-		34
16	SMKK Makassar	-	5	28	-	9	1	-		43
17	SMKK Manokwari	-	1	26	6	20	3	4		60
Jumlah Tahun 2016		25	170	368	74	352	38	29		1,056
Jumlah Tahun 2015		25	168	383	71	360	44	31		1,082

Tabel 7.3. Jumlah PNS lingkup Badan P2SDM Menurut Jenis Jabatan Tahun 2016

NO	UNIT KERJA	JENIS JABATAN												JML				
		STRUKTURAL/ESELON				FUNGSIONAL UMUM				FUNGSIONAL TERTENTU				PUU	PSM			
1	2	3	4	5	6	7	WI	Guru	Penyuluhan	Prakom	Analis	Arsiparis	Asesor	Instruktur	15	16	17	18
1	Sekretariat BP2SDM	1	1	4	12	39	-	-	-	1	4	1	-	-	1	-	64	
2	Pusat Penyuluhan	-	1	3	7	22	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	48	
3	Pusat Renbang SDM	-	1	3	7	20	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	33	
4	Pusat Diklat SDM LHK	-	1	4	9	86	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	137	
5	Pusat Pelatihan Masyarakat PGL	-	1	4	8	21	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	37	
6	BDLHK Bogor	-	-	1	3	57	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	85	
7	BDLHK Kadipaten	-	-	1	3	54	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	72	
8	BDLHK Pematang Siantar	-	-	1	3	44	11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	60	
9	BDLHK Pekanbaru	-	-	1	3	55	13	-	1	-	1	-	-	-	-	-	74	
10	BDLHK Samarinda	-	-	1	3	39	18	-	2	-	-	-	-	-	-	-	62	
11	BDLHK Makassar	-	-	1	3	45	21	-	1	-	-	-	-	-	-	1	72	
12	BDLHK Kupang	-	-	1	3	60	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	76	
13	SMKK Kadipaten	-	-	-	1	24	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	44	
14	SMKK Pekanbaru	-	-	-	1	37	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	55	
15	SMKK Samarinda	-	-	-	1	18	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	34	
16	SMKK Makassar	-	-	-	1	25	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	43	
17	SMKK Manokwari	-	-	-	1	46	-	13	-	-	1	-	-	-	-	-	60	
Jumlah Tahun 2016		1	5	25	69	692	143	83	22	1	6	4	3	1	1	2	1,056	
Jumlah Tahun 2015		1	5	24	68	768	125	62	14	1	4	0	0	0	0	0	1,082	

Keterangan :

WI = Widya Iswara; Prakom = Pranata Komputer; PUU = Perancang Undang-Undang; PSM = Penggerak Swadaya Masyarakat

Tabel 7.4. Jumlah PAGU dan Realisasi Anggaran Badan P2SDM Tahun 2016

NO.	UNIT KERJA	Tahun 2015			Tahun 2016		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU (APBN-P)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretariat BP2SDM	62,830,988,000	61,657,560,050	98,13	32.487.997.000	29.641.913.000	91,24
2	Pusat Penyuluhan	25,564,636,000	19,099,391,250	74,71	18.247.053.000	16.717.165.000	91,62
3	Pusat Renbang SDM	55,533,455,000	54,184,354,609	97,57	65.529.772.000	64.177.526.000	97,94
4	Pusat Diklat SDM LHK	87,800,479,000	76,203,677,444	86,79	42.806.458.000	39.754.975.000	92,87
5	Pusat Pelatihan Masyarakat PGL	22,357,306,000	17,874,817,512	79,95	16.341.076.000	14.024.395.000	85,82
6	BDLHK Bogor	17,817,777,000	16,606,252,015	93,20	16.458.723.000	15.896.379.000	96,58
7	BDLHK Pematang Siantar	16,794,710,000	16,196,587,977	96,44	12.631.574.000	12.298.740.000	97,37
8	BDLHK Samarinda	17,120,703,000	16,581,060,153	96,85	13.083.592.000	12.694.316.000	97,02
9	BDLHK Makassar	22,851,009,000	22,412,875,122	98,08	16.503.594.000	15.405.010.000	93,34
10	BDLHK Pekanbaru	17,195,396,000	16,735,972,627	97,33	13.718.584.000	13.465.544.000	98,16
11	BDLHK Kadipaten	17,145,655,000	16,636,528,551	97,03	14.129.686.000	13.662.509.000	96,69
12	BDLHK Kupang	18,337,536,000	17,764,141,040	96,87	15.077.021.000	14.510.929.000	96,25
13	SMKK Manokwari	12,928,361,000	10,896,857,650	84,29	15.388.259.000	14.761.666.000	95,93
14	SMKK Kadipaten	11,973,156,000	11,318,212,924	94,53	13.395.625.000	13.082.866.000	97,67
15	SMKK Makassar	11,786,908,000	11,140,830,132	94,52	13.193.625.000	13.081.315.000	99,15
16	SMKK Samarinda	13,122,448,000	12,447,302,701	94,86	15.634.281.000	15.533.147.000	99,35
17	SMKK Pekanbaru	11,972,010,000	11,377,414,541	95,03	13.434.625.000	13.329.602.000	99,22
Jumlah		443,132,533,000	409,133,836,298	92,33	348.061.545.000	332.037.996.000	95,40

Tabel 7.5. Daftar Kerjasama lingkup Badan P2SDM Tahun 2016

No	Mitra Kerja Sama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Bidang Kerja Sama	Periode
1	2	3	4	5
Kerjasama Dalam Negeri				
1	Fahutan UGM	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Penyuluhan dan Pendidikan	2010-2014
2	PP Muhammadiyah	Pelestarian Sumber Daya Hutan	Peningkatan Kapasitas SDM	2011-2015
3	ICRAF	<i>Cooperation on Agroforestry</i>	Pendidikan dan Pelatihan	2006-2011 (Kerja Sama Luar Negeri)
4	SMKK Kadipaten dan ASMINDO	Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda Dalam Bentuk Praktek Kerja Industri Pola Magang	Pendidikan	2012-2017
5	Arara Abadi dan Yayasan Dharma Eka Tjipta	Praktek Kerja Magang, Beasiswa, Kesempatan Bekerja dan Peningkatan Kualitas SDM	Pendidikan	2012-2017
6	Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia	Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pendidikan dan Pelatihan Serta Penyuluhan Kehutanan	Rehabilitasi, Diklat, Penyuluhan	2012-2015
7	PP Hidayatullah	Penanaman Pohon dan Penyuluhan Kehutanan	Rehabilitasi dan penyuluhan	2012-2015
8	Perum Perhutani	Peningkatan Kualitas SDM Kehutanan di Bidang Pendidikan Menengah, Pendidikan dan Pelatihan serta Penyuluhan Kehutanan	Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan	2012-2017
9	SAKADO	For Educational Exchange and Cooperation	Pendidikan	2013-2018 (Kerjasama Luar Negeri)
10	KABADAN DIKLAT KEMENDAGRI (MoU)	Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas	2013-2018
11	Kepala Badan Diklat Provinsi (25 Provinsi)	Penyelenggaraan Penddikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan Daerah di Bidang LHK	Peningkatan Kapasitas	2015-2020
		1. DI. Yogyakarta		
		2. NTB		
		3. Papua Barat		
		4. Kalimantan Tengah		
		5. Kalimatan Selatan		
		6. Kalimantan Barat		
		7. Banten		

No	Mitra Kerja Sama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Bidang Kerja Sama	Periode
1	2	3	4	5
		8. Lampung		
		9. Sulawesi Selatan		
		10. Sulawesi Utara		
		11. Sulawesi Tengah		
		12. Sulawesi Barat		
		13. Sulawesi Tenggara		
		14. Maluku		
		15. Maluku Utara		
		16. Papua		
		17. Kalimanta Timur		
		18. Sumatera Barat		
		19. Sumatera Utara		
		20. Bengkulu		
		21. Aceh		
		22. Riau		
		23. Sumatera Selatan		
		24. Jambi		
		25. Kepulauan Riau		
12	MENDIKBUD dan Pembinaan SMKK	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan	Pendidikan	2013-2018
13	Dirjen PMK dan KABADAN Pengembangan SDM DIKBUD	Penyelenggaran Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Pendidikan	2013-2018
14	Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada	(MoU) Peningkatan Kualitas SDM dalam bidang LHK melalui Sekolah Vokasi	Pendidikan	2015-2020
15	Kapusrenbang SDM- Direktur Sekolah Vokasi UGM	(PKS) Peningkatan Kualitas SDM dalam bidang LHK melalui Sekolah Vokasi	Pendidikan	2015-2020
16	Dekan Fahutan Instiper Yogyakarta	Pengembangan SDM bidang LHK	Pendidikan	2015-2020
17	Pusdiklat SDM LHK dengan Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (Kemenhub)	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Kemenhub	Pendidikan Pelatihan	Direncanakan di ttd tahun 2016



No	Mitra Kerja Sama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Bidang Kerja Sama	Periode
				1 2 3 4 5
18	Bupati Kabupaten Kapuas Hulu	Kerjasama Pendidikan Bagi Putra Daerah yang berasal dari Masyarakat Adat di Sekitar Kawasan Hutan Kabupaten Kapuas Hulu di SMKKN Samarinda	Pendidikan	2016-2019
Kerjasama Luar Negeri				
1	FAO	Project Document TCP (Technical Cooperation Program) antara Kepala Badan P2SDM dengan FAO Representative in Indonesia yang berjudul "Strengthening Forest Management Unit for Sustainable Forest Management and Community Empowerment"	Peningkatan kapasitas SDM KPH dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat dari KPH dalam bentuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan (Lokasi Jakarta, KPH Bantimurung, KPHK Jeneberang)	2016 - 2018
2	Senior High School at Sakado, University Tsukuba, Japan	MoU for Educational Exchanges and Cooperation Between Center For Forestry Education and Training, Ministry of Forestry of The Republic of Indonesia and Senior High School at Sakado, University of Tsukuba Japan	Kerjasama Pendidikan dengan ruang lingkup:1) Pertukaran Guru 2) Pertukaran Siswa3) Kolaborasi penelitian dan pertemuan akademik 4) Pertukaran informasi, publikasi dan materi untuk pendidikan (Lokasi 5 SMK Kehutanan)	2013 - 2018

Tabel 7.6. Daftar Barang Milik Negara (BMN) lingkup Badan P2SDM Tahun 2016

No.	Kelompok BMN	Jumlah	Unit
1	2	3	4
1	Tanah	1,298,615	M ²
2	Peralatan dan Mesin	67,032	Unit
3	Gedung dan Bangunan	1,831	Unit
4	Jalan dan Jembatan	174,181	M ²
5	Irigasi	78	Unit
6	Jaringan	120	Unit
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	6	Unit
8	Aset Tetap Lainnya	61,697	Unit
9	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	18,736	Unit

Tabel 7.7. Daftar Peraturan Perundang-undangan lingkup Badan P2SDM Tahun 2016 (di urut sesuai no peraturan)

No.	Nomor Peraturan	Judul Peraturan
1	2	3
Peraturan Menteri LHK		
1	P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016	Permenlhk tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016	Permenlhk tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri
3	P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016	Permenlhk tentang Kode Etik Revolusi Mental
4	P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016	Permenlhk tentang Penyuluhan Kehutanan Swasta dan Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat
5	P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016	Permenlhk tentang Sarana dan Prasarana Penyuluhan
6	P.42/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016	Permenlhk tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba dan Apresiasi Wanalestari
7	P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016	Permenlhk tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
8	P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016	Permenlhk tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluhan Kehutanan
9	P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016	Permenlhk tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Di Daerah
10	P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016	Permenlhk tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
11	P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016	Permenlhk tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal
12	P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016	Permenlhk tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri
Keputusan Menteri LHK		
1	SK.336/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016	Kepmen LHK tentang Dewan Pertimbangan Adiwiyata
2	SK.377/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016	Kepmen LHK tentang Tim Penilai Adiwiyata Nasional Tahun 2016
3	SK. 566/Menlhk/Setjen/Kum.1/7 /2016	Kepmen LHK tentang Tim Pakar Lomba Wana Lestari Tahun 2016
Peraturan Kepala Badan		
5	P.7/P2SDM/Set/KHOTL/OTL.2/2/2016	Perka BP2SDM tentang Pembagian Pelaksanaan Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Non Aparatur dan Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan



No.	Nomor Peraturan	Judul Peraturan
1	2	3
6	P.12/P2SDM/SET/KUM.1/7/2016	Hidup dan Kehutanan Perka BP2SDM tentang Perubahan Perkabadian No P.9 P2SDM/SET/KUM.1//2016/ ttg Paket Keahlian pada SMKKN
7	P.14/P2SDM/SET/KUM.1/9/2016	Perka BP2SDM tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Pusat
8	P.15/P2SDM/SET/PEG.1/10/2016	Perka BP2SDM tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan UPT
9	P.18/P2SDM/SET/OTL.0/12/2016	Perka BP2SDM tentang Prosedur Kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	P.11/P2SDM/SET/KUM.1/5/2016	Perka BP2SDM tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari
11	P.1/P2SDM-Setbadan/2016	Perka BP2SDM tentang Standar Kompetensi Tenaga Pendamping Kesatuan Pengelolaan Hutan
12	P.2/P2SDM-Setbadan/2016	Perka BP2SDM tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bakti Rimbawan
13	P.20/P2SDM/SET/SDM.1/12/2016	Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Tata Cara Registrasi Lembaga Sertifikasi Profesi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
14	P.3/P2SDM/Set/OTL.2/2/2016	Perka BP2SDM tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di SMKKN
15	P.4/P2SDM/Set/OTL.2/2/2016	Perka BP2SDM tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMKKN
16	P.5/P2SDM/Set/OTL.2/2/2016	Perka BP2SDM tentang Paket Keahlian pada SMKKN
17	P.6/P2SDM/Set/OTL.2/2/2016	Perka BP2SDM tentang Pembinaan Peserta Didik pada SMKKN
18	P.13/P2SDM/LATMAS/KUM.2/8/2016	Perka BP2SDM tentang Pedoman Teknis Penilaian Sekolah Adiwiyata Nasional
Keputusan Kepala Badan		
1	SK.9/P2SDM/SET/KUM.1/5/2016	Kepka BP2SDM tentang Penetapan Lagu Mars Penyuluhan Kehutanan
2	SK.8/P2SDM/SET/KUM.1/5/2016	Kepka BP2SDM tentang Penempatan Penyuluhan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Wilayah Kerja
3	SK.7/P2SDM/SET/KUM.1/5/2016	Kepka BP2SDM tentang Pembidangan Penyuluhan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	SK.11/P2SDM/SET/KUM.1/6/2016	Kepka BP2SDM tentang Tim Penilai

No.	Nomor Peraturan	Judul Peraturan
1	2	3
		Tingkat Nasional Lomba Wana Lestari Tahun 2016
5	SK.12/P2SDM/SET/KUM.1/6/2016	Kepka BP2SDM tentang Panitia Penyelenggaraan Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2016
6	SK.17/P2SDM/SET/KUM.1/11/2016	Kepka BP2SDM tentang Tim Penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetang Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup
7	SK. 18/P2SDM/SET/KUM.1/12/2016	Kepka BP2SDM tentang Panitia Sarasehan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016
Surat Edaran Kepala Badan		
1	SE.1/P2SDM/SET/SDM.1/12/2016	Surat Edaran tentang Akreditasi dan Registrasi Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)
Perjanjian Kerja Sama		
1	PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016; 99/VII/NK/2016; 11a/M/NK2016; 9 Tahun 2016; 660/26688A/SJ	Nota Kesepahaman Menteri LHK dgn Mendikbud, Menristek & Dikti, Menag, dan Mendagri
2	HK.201/1/6/PPSDMAP-2016; PKS 2/DIK/PEPE/KUM.3/6/2016	Perjanjian Kerja Sama antara Kampusdiklat dengan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan
3	PKS.1/P2SDM/SET/DIK.4/5/2016; 420/II/MOU/SETDA/HK-B/2016	Nota Kesepahaman Badan P2SDM dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

BAB VIII.

PENUTUP



Stistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Badan P2SDM sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga menyusun Statistik tingkat Eselon I sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyajikan data dan informasi lingkup penyuluhan dan pengembangan SDM dengan rincian per provinsi atau unit-unit wilayah tertentu yang relevan berdasarkan tahun takwim.

Statistik Badan P2SDM Tahun 2016 disusun untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi tentang penyuluhan dan pengembangan SDM pada Tahun 2016.

Ketersediaan data yang objektif, akurat dan terpercaya amat dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh para stakeholder dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara umum, maupun program penyuluhan dan pengembangan SDM secara khusus.